



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS FRAMING STUDI KASUS KOMPAS DAN MEDIA
INDONESIA DALAM LIPUTAN KERUSUHAN
DI TEMANGGUNG 8 FEBRUARI 2011**

TESIS

**Nama : Kristanto Hartadi
NPM : 1006744710**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU KOMUNIKASI**

**JAKARTA
Juni 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS FRAMING STUDI KASUS KOMPAS DAN MEDIA INDONESIA
DALAM LIPUTAN KERUSUHAN DI TEMANGGUNG 8 FEBRUARI 2011**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

**Kristanto Hartadi
1006744710**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
KEKHUSUSAN MANAJEMEN KOMUNIKASI**

**JAKARTA
Juni 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Kristanto Hartadi

NPM : 1006744710

Tanda Tangan : 

Tanggal :

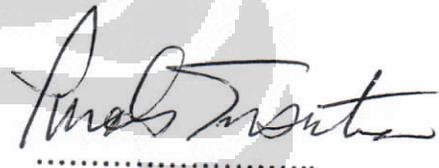
HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Kristanto Hartadi
NPM : 1006744710
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Kekhususan : Manajemen Komunikasi
Judul Tesis : Analisis Framing Studi Kasus Kompas dan Media
Indonesia Dalam Liputan Kerusuhan di Temanggung 8
Februari 2011

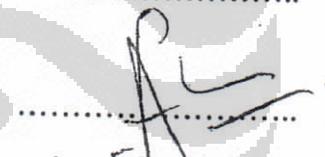
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

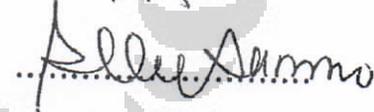
Ketua Sidang : DR. Pinckey Triputra, M.Sc



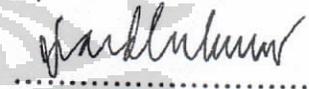
Pembimbing : DR. Ade Armando, MA



Penguji Ahli : DR. Billy K. Sarwono, MA



Sekretaris Sidang : Drs. Eduard Lukman, MA



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 27 Juni 2012

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus yang dengan rahmatNya yang besar telah memberi kekuatan dan hikmat kepada penulis sehingga dimampukan untuk menyelesaikan tesis ini, sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Program Pascasarjana, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Polittik, Universitas Indonesia, pada tahun 2012 ini. Penulis menilai media mempunyai peran besar dalam upaya merawat kebhinekaan Indonesia dan mengawal proses demokratisasi agar tidak dibelokkan ke arah yang salah, khususnya di masa transisi ini. Sehingga peran media massa untuk membangun pendapat umum yang tepat dan sehat dalam mempengaruhi proses politik untuk pembuatan kebijakan publik sangatlah penting. Melalui studi analisis framing terhadap surat kabar *Kompas* dan *Media Indonesia* terkait dengan peliputan kerusuhan di Temanggung 8 Februari 2011, penulis berharap akan membantu banyak media massa di Indonesia untuk menyempurnakan kapasitas dan kemampuan mereka dalam memainkan peran pada berbagai proses politik demi kepentingan umum.

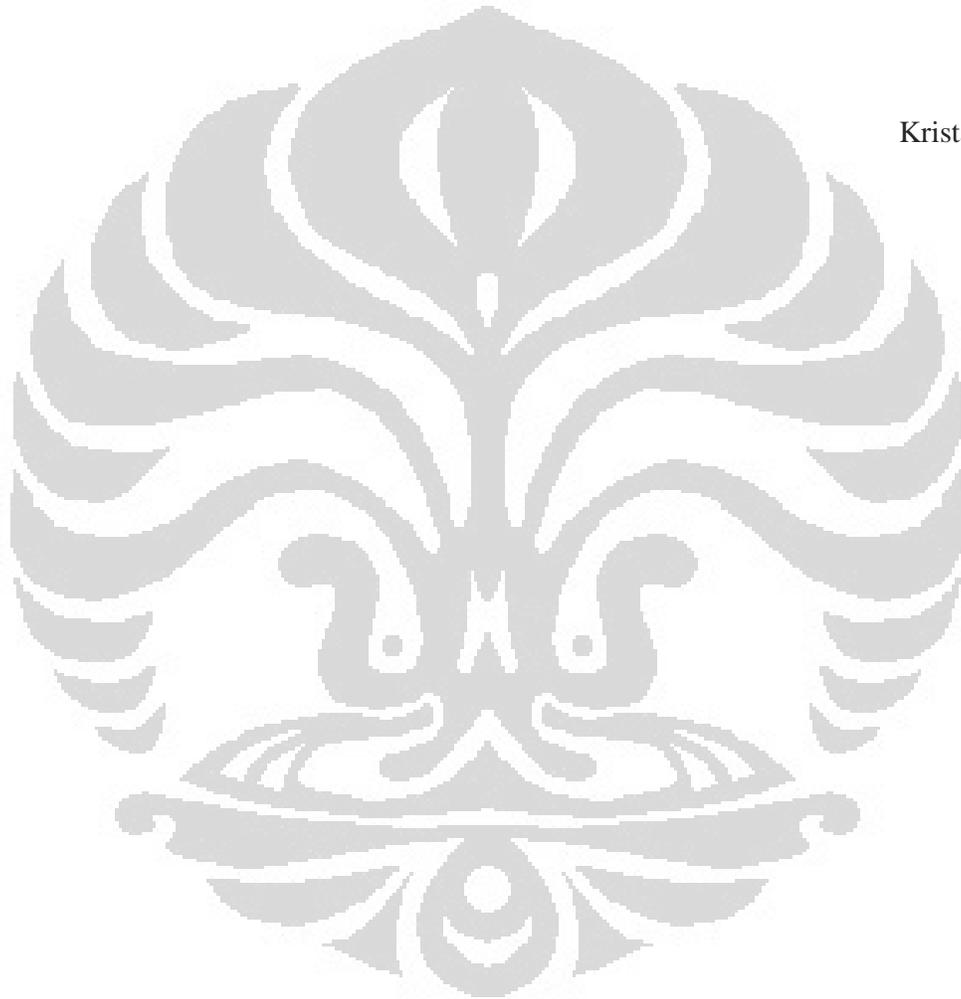
Penyelesaian penulisan tesis ini tidak akan tercapai tanpa dukungan berbagai pihak yang secara langsung atau pun tidak ikut membantu penulis, mereka adalah:

1. Isteri tercinta Ir Anastasia Eveline Damanik,MSi yang terus memberi dukungan doa dan semangat, juga anak-anak Rut Setio Nastiti dan Stefanus Anugerah yang senantiasa mendoakan dan memberi inspirasi kepada penulis.
2. Bapak DR Ade Armando, selaku dosen pembimbing yang memberikan saran dan masukan, maupun dorongan dan pengertiannya, untuk menyelesaikan perkuliahan ini tepat waktu.
3. Para Dosen dan Staf Kesekretariatan Program Pascasarjana Jurusan Komunikasi FISIP Universitas Indonesia di Kampus Salemba, Jakarta Pusat, yang telah membagikan ilmu pengetahuan dan membukakan wawasan baru, dan dukungan administrasi selama penulis menuntut ilmu.
4. Para Narasumber yang telah meluangkan waktu, data dan perhatiannya demi melengkapi tesis ini, yakni: Pemimpin Redaksi *Media Indonesia* Bapak Usman Kansong, Wakil Pemimpin Redaksi *Kompas* Bapak Trias Kuntjahjono, pengajar Lembaga Pers Doktor Soetomo yang juga mantan Ketua Dewan Pers Bapak Atmakusumah, Sekretaris Eksekutif Setara Institut Romo Antonius Benny Susetyo, Pr. Juga kepada sahabat penulis Bapak DR Sukardi Rinakit yang banyak memberikan saran dan masukan.
5. Para pimpinan di harian *Sinar Harapan* tempat penulis bekerja, yakni: Pemimpin Umum Bapak Rosihan Arsyad, Chief Operating Officer Ibu Chin Mei Fong, Direktur Umum dan SDM Bapak Edward Harianja dan rekan-rekan di redaksi atas pengertian dan dukungannya. Penulis

berterimakasih atas segala bantuan yang diberikan, dan mendoakan kiranya Bapak, Ibu dan rekan semua, serta berbagai pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, mendapat balasan dari Tuhan yang Maha Kasih. Kiranya tesis ini bermanfaat bagi pengembangan pers di Indonesia, dan bangsa Indonesia.

Jakarta, 27 Juni 2012

Kristanto Hartadi



ABSTRAK

Nama : KRISTANTO HARTADI
Program Studi : Komunikasi Politik
Judul : Analisis Framing Studi Kasus Kompas dan Media Indonesia Dalam
Liputan Kerusuhan di Temanggung 8 Februari 2011

xii + 120 halaman, 33 halaman lampiran, 4 tabel, 1 diagram & grafik, 40 buku dan tesis, 9 jurnal dan makalah, 7 artikel Internet, 8 berkas putusan pengadilan.

Tesis ini menelaah mengenai bagaimana dua surat kabar nasional *Kompas* dan *Media Indonesia* membuat framing dalam liputan mereka atas kasus kerusuhan di Kota Temanggung, pada 8 Februari 2011. Penelitian yang bersifat kualitatif dan deskriptif ini menggunakan metode analisis framing untuk membuktikan bahwa meski kedua surat kabar melancarkan framing, yang mendesak Pemerintah agar melindungi warga negara dan kaum minoritas dari kekerasan atas nama agama dan mendesak pembubaran ormas anarkistis, namun pada prakteknya proses itu tidak tuntas, sehingga efek yang diharapkan juga tidak terlalu kuat. Hasil penelitian ini menyarankan agar kedua surat kabar memahami kiat-kiat melancarkan framing yang efektif, mendidik para wartawannya untuk belajar memahami dan menggali konteks, mengembangkan pola pemberitaan interpretatif (*interpretative story*), serta meningkatkan kemampuan dan kompetensi untuk meliput agama-agama (*how to cover religions*) dalam upaya memelihara pluralitas dan demokrasi di Indonesia.

Kata kunci:
framing, pluralisme, *interpretative story*

ABSTRACT

Name : KRISTANTO HARTADI
Study Program : Political Communication
Title : Framing Analysis A Case Study on Kompas and Media Indonesia in Covering Riot in Temanggung, February 8, 2011

xii + 120 pages, 33 pages of annex, , 4 tables, 1 diagram & graphic, 40 books and thesis, 9 journals and papers, 7 articles in Internet, 8 court verdicts.

This thesis examines how two national newspapers *Kompas* and *Media Indonesia* made framing in their coverage of the riot in Temanggung, February 8, 2011. This thesis is a qualitative and descriptive research using framing analysis methods to prove that despite the newspapers launched framing -- in order to urge the Government to protect its own people from violence and persecution in the name of religion, and urged the dissolution of anarchistic organizations -- the process was incomprehensive. This thesis suggests that the two newspapers need to enhance their ability to launch effective framing, build the skill of their journalists about the importance of understanding context, and developing their skill on interpretative stories. They also need to increase the skill and competence of their journalists on how to cover religions issues, because this competency is an important part of our effort to maintain plurality and democracy in Indonesia.

Key words:
framing, pluralism, interpretative story

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kristanto Hartadi
NPM : 1006744710
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Kekhususan : Manajemen Komunikasi
Komunikasi Politik
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Politik

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: *Analisis Framing Studi Kasus Kompas dan Media Indonesia Dalam Liputan Kerusuhan di Temanggung 8 Februari 2011* beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal :

Yang menyatakan



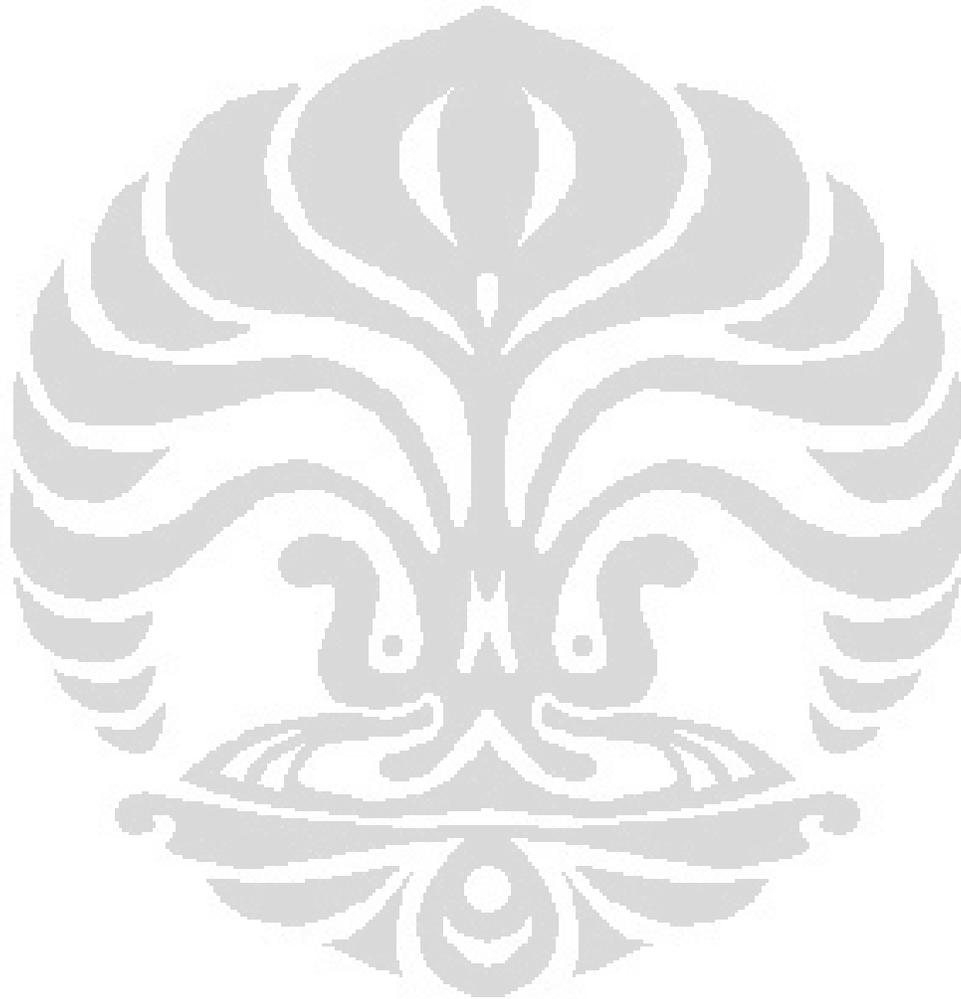
(Kristanto Hartadi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Pertanyaan Penelitian	9
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Signifikansi Penelitian	10
1.5.1. Signifikansi Teoritis	10
1.5.2. Signifikansi Praktis	11
1.6 Keterbatasan Penelitian	11
1.7. Sistematika Penulisan Tesis	12
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL	13
2.1. Konservatisme di Media	13
2.2. Realitas Media	16
2.3. Kekerasan Bernuansa Agama dan Ormas Anarkistis	19
2.4. Model Analisis Framing	24
2.5. Surat kabar	34
2.5.1. Kompas	34
2.5.2. Media Indonesia	35

BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Metode Penelitian Kualitatif	37
3.1.1 Analisis Isi Kualitatif	38
3.1.2 Wawancara	43
BAB IV ANALISIS DATA	44
4.1. Trend Pemberitaan Kompas dan Media Indonesia	44
4.2. Kasus Kerusakan Temanggung: Mengapa Harus di-frame?	54
4.2.1 Framing Kompas: Negara Gagal Lindungi Warga: Massa Merusak Gereja di Temanggung	58
4.2.2 Framing Kompas: Kerusakan – Dalam Kepanikan, Ada Titik Solidaritas	65
4.2.3. Framing Kompas: Tajuk Rencana – Kegagalan Dalam Hidup Bernegara	72
4.2.4. Framing Media Indonesia: Giliran Temanggung Rusuh	78
4.2.5. Framing Media Indonesia: Ketika Akal Sehat Tidak Lagi Berfungsi	87
4.2.6. Framing Media Indonesia: Ormas Anarkistis	93
BAB V DISKUSI, KESIMPULAN DAN SARAN	100
5.1. Diskusi	100
5.1.1. Skema Dalam Hardnews	105
5.1.2. Framing Dalam Feature	106
5.1.3. Framing Dalam Tajuk Rencana	108
5.1.4. Memunculkan Konteks Dalam Pemberitaan	109
5.2. Kesimpulan dan Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN	
Wawancara Usman Kansong - Pemimpin Redaksi Media Indonesia	126

Wawancara Trias Kuntjahjono - Wakil Pemimpin Redaksi Kompas	137
Wawancara Atmakusumah - Mantan Ketua Dewan Pers	140
Wawancara Rm. Benny Susetyo – Sekretaris Eksekutif Setara Institut	145



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat terhenyak ketika pada Februari 2011 lalu secara berturut-turut terjadi dua aksi kekerasan bernuansa agama, yakni penyerangan terhadap rumah milik Jamaah Ahmadiyah di kampung Cikeusik, Pandeglang, yang menewaskan tiga orang (6 Februari 2011) dan dua hari kemudian disusul dengan kerusuhan di Pengadilan Negeri Temanggung yang merembet pada pengrusakan tiga buah gedung gereja dan sekolah Kristen di kota itu (8 Februari 2011). Kedua kejadian yang nyaris serentak itu menjadi berita utama di berbagai surat kabar dan pemberitaan di media elektronik, dan langsung menuai banyak reaksi kemarahan dari berbagai elemen masyarakat. Pada umumnya mereka menentang aksi-aksi kekerasan atas nama agama, dan di sejumlah kalangan makin menguat penilaian bahwa negara gagal melindungi warga negaranya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika berada di Kupang untuk menghadiri Hari Pers Nasional, ikut menyatakan kemarahannya dan membuat pernyataan pada 9 Februari 2011, “Jika ada kelompok dan organisasi resmi yang selama ini terus melakukan aksi kekerasan, kepada penegak hukum agar dicarikan jalan yang sah atau legal, jika perlu dilakukan pembubaran atau pelarangan.” Kalangan pers, menurut Presiden, perlu mendukung upaya memperkokoh kerukunan antarumat beragama di negeri ini. “Kita harus mencegah aksi kekerasan dari kelompok atau organisasi mana pun yang merobek atau menghancurkan kerukunan antarumat,” katanya.

Namun reaksi yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi maupun Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, sama sekali tidak mendukung pernyataan Presiden agar organisasi anarkistis itu dibubarkan. Dan sebagai penawarnya, akhirnya Polri menjanjikan membentuk sebuah lembaga baru bernama Detasemen Antianarki, yang sampai kini juga tidak terdengar sudah sampai dimana kemajuannya.

Banyak pengamat dan analis politik menilai maraknya kasus-kasus kekerasan bernuansa agama belakangan ini antara lain dikarenakan sejumlah hal:

Pertama, konsolidasi demokrasi belum tuntas, yang ditunjukkan oleh perilaku para elite politik maupun massa yang tidak didasarkan pada konstitusi negara maupun aturan-aturan yang ada di bawahnya.¹ Bukti ketidaksinkronan antara aturan dan tindakan itu terlihat, misalnya, dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28E, 28I menjamin kebebasan beragama namun dalam pelaksanaan tidaklah begitu. Demikian pun UU No 12/2005 mengenai Ratifikasi Kovenan Sipil dan Politik yang salah satu pasalnya menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan, artinya Indonesia terikat dengan hukum internasional mengenai kebebasan beragama, namun kita tidak konsisten menerapkannya.

Pemerintah melalui UU No 1 tahun 1965/PNPS membatasi kebebasan beragama atau berkeyakinan di ranah publik, melalui pelarangan menyebarluaskan penafsiran yang menyimpang dari pokok ajaran agama atau menodai agama. Dan hal itulah yang terjadi di Pandeglang, massa menyerang jemaah Ahmadiyah karena dianggap menyebarkan ajaran yang menyimpang, sementara di Temanggung massa yang tidak puas terhadap putusan pengadilan yang memvonis terdakwa penistaan agama selama 5 tahun sesuai aturan undang-undang.

Kedua, Pemerintah gagal memelihara demokrasi dengan cerdas, dimana partisipasi dan kedaulatan rakyat, kebebasan sipil, serta sirkulasi pemerintahan secara damai ternyata bermuara menjadi ketidaktaatan hukum.² Aksi-aksi anarkis itu pada umumnya terjadi di depan mata aparat keamanan (Polri) dan hampir tanpa pencegahan sama sekali, atau para pelakunya jarang dihukum dan kalau pun dihukum sekadarnya saja. Sehingga banyak yang menyayangkan mengapa negara absen atau gagal melindungi warga negaranya sendiri.

Ketiga, peningkatan intoleransi di masyarakat. Hasil penelitian oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang dirilis pada akhir Maret 2011 menunjukkan: radikalisme agama kian menguat belakangan ini, diwujudkan dalam bentuk kemerosotan toleransi terhadap kelompok atau agama lain, bahkan berkembang radikalisme, dan

¹ Ikrar Nusa Bhakti, *Kompas*, Jumat 11 Februari 2011, halaman 6

² Syamsudin Haris, "Demokrasi Merayakan Anarki?", *Kompas*, 23 Februari 2011, hal. 6

pandangan ingin menjadikan Islam sebagai sistem hukum publik (syariat Islam), atau mendirikan khilafah. Penelitian dengan metodologi random sampling, melibatkan 1.200 responden berusia di atas 17 tahun, antara 2000-2010. PPIM mengkuatirkan bila kecenderungan ini dibiarkan maka akan berujung pada terkikisnya kesadaran ke-Indonesiaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang plural dan menghargai perbedaan.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan kajian Setara Institute bahwa kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dalam lima tahun terakhir belum mengalami kemajuan signifikan. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum mampu memperlihatkan kemampuan untuk mengatasi masalah yang timbul terkait kebebasan tersebut pada 2011. Menurut peneliti Setara Institute, Ismail Hasani, sepanjang 2011 ada 19 kali Presiden SBY menyampaikan pesan toleransi, namun semua tak ada bekasnya, termasuk ketidakmampuan menegur Walikota Bogor, dalam kasus pencabutan Izin Mendirikan Bangunan untuk Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin.³ Demikian pun Menteri Agama Suryadharma Ali kerap tidak menampilkan sikap toleransi untuk mengatasi berbagai diskriminasi atas nama agama. Dalam catatan lembaga itu selama 2011 terjadi 244 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang mengandung 299 bentuk kekerasan. Dengan Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan tingkat pelanggarannya tertinggi. Korban yang paling banyak teraniaya adalah jemaah Ahmadiyah, disusul jemaat Kristiani. Dua kelompok yang paling banyak melanggar HAM itu adalah Front Pembela Islam (FPI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam kajian lembaga tersebut, bila kasus persekusi terhadap Jemaah Ahmadiyah dikeluarkan maka tingkat pelanggaran itu akan kecil saja. Menurut lembaga ini ada dua pemicu kekerasan beragama, yakni: (1) negara terus memproduksi perundangan yang restriktif terhadap warga negara yang memeluk agama/keyakinan yang dianggap berbeda dari mainstream; (2) minimnya

³ Dalam Refleksi Akhir Tahun Kondisi Kebebasan Beragama dan Hak Asasi Manusia 2011, di Jakarta, Senin (19 Desember 2011), sebagaimana dilaporkan oleh *Suara Pembaruan* pada 20 Desember 2011, <http://www.suarapembaruan.com/home/2011-tak-ada-kemajuan-kebebasan-beragama/15051>.

pengetahuan publik menyangkut hak-hak kebebasan sipil warga negara, sehingga memicu aksi intoleransi dan anarki. (Setara Institut, 2008: viii-ix)

Khusus terkait dengan rentetan kekerasan seperti di Cikeusik dan Temanggung, di tengah masyarakat sempat muncul pro-kontra untuk membubarkan organisasi-organisasi yang anarkistis itu, meski tidak secara jelas menyebutkan organisasi itu adalah FPI, misalnya. Dan hal itu antara lain dipicu oleh pernyataan Presiden SBY di Kupang. Pada sejumlah kasus memang FPI, antara lain melalui Laskar Pembela Islam (LPI), menjadi pelaku aksi-aksi anarkis itu. Sehingga pemimpinnya, Rizieq Shihab, dan pemimpin LPI, Munarwan, dihukum penjara terkait kasus kekerasan terhadap kelompok AKKBB pada 1 Juni 2008 lalu. Juga tokoh FPI di Bekasi, Murhali Barda, pada Desember 2010 divonis penjara 5½ bulan karena terlibat aksi penusukan dan penganiayaan terhadap penatua dan pendeta HKBP Cikeuting Udik, Bekasi. FPI juga ditengarai banyak terlibat dalam aksi-aksi pengrusakan berbagai properti milik kelompok Jamaah Ahmadiyah.

Seperti biasa wacana pembubaran atau pun penindakan terhadap kelompok-kelompok anarkistis itu menguap begitu saja tanpa ada tindak lanjutnya. Bisa jadi hal itu terkait dengan janji Kapolri yang akan membentuk Detasemen Antianarki tersebut, yang diharapkan dapat dan mampu mencegah pecahnya kerusuhan bernuansa agama. Atau, bisa pula ketika ketegangan telah menurun media tidak lagi melihat masalah ini sebagai persoalan serius yang harus disikapi dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak menarik lagi untuk dimunculkan dalam pemberitaan. Padahal, bila media konsisten terus meliput isu aksi anarkis tersebut secara kritis dan kontekstual, terbuka kemungkinan wacana penindakan secara maksimal terhadap ormas anarkis akan berlanjut ke tindakan yang lebih konkret, sebagai salah satu upaya mencegah terulangnya berbagai aksi kekerasan.

Kemampuan media untuk meliput secara kritis, komprehensif dan berimbang dalam kasus-kasus kekerasan bernuansa agama diyakini akan berperan besar untuk membawa publik ke sebuah pengertian yang benar terhadap akar masalah kekerasan bernuansa agama maupun upaya-upaya penyelesaian konflik, karena media telah menempatkan masalah itu dalam konteks yang tepat. Namun

bila pada sisi lain media semata menyajikan konflik demi konflik dengan mengabaikan konteks yang lebih mendasar dan tanpa mendorong upaya mencari solusi maka kemungkinan besar yang muncul adalah pemupukan rasa marah, stigmatisasi, kebencian, dan antitoleransi.

Banyak pengelola newsroom pada saat ini cenderung tidak menganggap agama sebagai sebuah bidang liputan yang menarik dan penting, kalah dibandingkan dengan liputan politik atau ekonomi, atau bahkan olahraga. Mungkin karena adanya anggapan yang keliru selama ini bahwa bidang liputan agama tak lebih dari seremoni demi seremoni seperti lebaran, naik haji, natal, nyepi, paskah dll. Agama dinilai sebagai sebuah persoalan yang banyak terkait dengan Tuhan, padahal tidak mungkin meminta konfirmasi kepada Tuhan. Dalam praktek jurnalistik, bidang ini dianggap “kurang seksi” dibanding bidang liputan lainnya. Di Amerika, media arus utama di sana telah meningkatkan perhatian mereka pada masalah agama, namun tetap saja jumlahnya sangat kecil. Pemantauan oleh Pew Research Center menunjukkan jumlah ruang dan waktu yang dialokasikan media terhadap soal keagamaan meningkat antara 2009-2010, naik 1 persen menjadi 2 persen dari total liputan mereka.⁴

Hal itu tidak sesuai dengan kenyataan bahwa agama pada hari-hari ini menjadi faktor terbesar dalam memicu berbagai konflik global, regional, bahkan lokal di berbagai belahan dunia. Konflik-konflik itu terjadi karena banyak pemimpin dunia hari ini yang memanipulasi agama untuk kepentingan politik mereka, khususnya pasca peristiwa 11 September 2001. Bahkan, demokrasi dinilai banyak berpengaruh dalam penguatan peran agama dalam kehidupan politik. “*God is winning in global politics. And modernization, democratization, and globalization have only made him stronger*”. (Shah dan Toft, dalam Marshall et al, 2009: 28)

Media massa di Indonesia diharapkan mampu mengonstruksi relasi antar umat beragama di Indonesia dengan baik dan komprehensif sebagai upaya bersama

⁴ Pew Research Center, PEJ/Pew Forum Joint Release, 24 Februari 2011, “Religion in the News: Islam Was No. 1 Topic in 2010,” , www.pewforum.org/www.journalism.org

membangun sebuah Indonesia yang plural seperti diamanatkan oleh para Bapak Bangsa ketika mereka mendirikan negara ini. Kegagalan media massa membangun sebuah konstruksi sosial mengenai nilai-nilai positif sebuah masyarakat yang plural, menghargai perbedaan, menghormati hak-hak asasi orang lain, tidak mendiskriminasi kelompok lain khususnya minoritas dapat bermuara pada kehancuran bangsa ini.

Konflik Ambon mengajarkan kepada kita betapa media di sana, atau para wartawan dan pemilik media, kehilangan orientasi ketika konflik dengan nuansa agama itu meledak (atau diledakkan). Harian *Suara Maluku*, yang selama puluhan tahun menjadi koran yang menyuarakan pluralitas, seketika kehilangan cirinya itu ketika segregasi masyarakat menajam, sehingga akhirnya kelompok media Jawa Pos mendirikan *Ambon Ekspres* untuk mewadahi wartawan yang muslim dan melayani komunitas muslim Maluku. Atau *RRI Ambon* yang akhirnya dinilai lebih menyuarakan kaum Kristen Maluku, mendorong Laskar Jihad mendirikan stasiun radio *Suara Perjuangan Muslim Maluku*. Lengkaplah segregasi masyarakat di Ambon berdasarkan garis agama, dan realitas itulah yang dibangun media-media tersebut. (Eriyanto, 2003)

Kelemahan para wartawan media mainstream dalam memahami kekerasan atas nama agama, atau pun kehilangan konteks bahwa tindakan kekerasan bernuansa agama itu merupakan hal yang diskriminatif dan melanggar HAM pada akhirnya juga akan terefleksi dalam pemberitaan mereka. Ketidapahaman itu akan bermuara pada ketidaktuntasan pemberitaan mengenai perlunya kelompok-kelompok anarkis seperti itu ditindak dengan tegas bila berbuat kekerasan, misalnya, atau pun perlunya negara melindungi hak-hak asasi warga negaranya dalam beragama dan berkeyakinan karena itu adalah amanat konstitusi.

Misalnya, dalam kasus aksi-aksi kekerasan di Cikeusik dan Temanggung, media gagal mendesakkan rekomendasi dan penggalangan opini agar aparat hukum dan Pemerintah bertindak tegas serta menghukum berat terhadap kelompok-kelompok anarkis pelaku kekerasan, atau penyebar kekerasan tersebut. Kegagalan dalam mengidentifikasi faktor-faktor pemicu konflik-konflik bernuansa agama berpotensi mempertajam salah persepsi di tengah masyarakat atas sebuah situasi

ketegangan yang sedang berlangsung, dan bahkan dapat memperkuat konservatisme agama karena mereka yang berbuat kekerasan merasa tidak berbuat kesalahan.

1.2. Perumusan Masalah

Sebuah survei dengan responden 600 wartawan di 10 provinsi di Indonesia yang dibuat oleh The International Journal of Press dan Yayasan Pantau, diluncurkan pada Agustus 2011 lalu. Di situ didapati hasil yang kontradiktif, yakni 64,3 persen responden mendukung pelarangan Ahmadiyah, 96 persen responden mengakui menyuarakan kaum minoritas adalah kewajiban mereka, dan 70 persen responden setuju bahwa masalah hak-hak asasi manusia merupakan isu penting. Hasil penelitian itu juga menyimpulkan bahwa pengaruh Islam di ruang redaksi (*newsroom*) meningkat, namun pada sisi lain para wartawan mendukung pemisahan masjid dari negara, dan menolak kelompok-kelompok militan Islam. (Pintak dan Setyono, 2010, hal.8-11). Mengenai hasil penelitian itu Andreas Harsono, ketua Yayasan Pantau, mengatakan meski para wartawan menyadari perlunya penerapan prinsip-prinsip jurnalistik, namun keyakinan agama mereka secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sudut pandang mereka dalam isu-isu sosial dan keagamaan.⁵

Memanfaatkan data dari hasil penelitian itu, dapatlah diduga bahwa meski ada pengaruh agama dalam ruang redaksi, namun para wartawan media mainstream juga menyadari peran dan tugas mereka untuk menjaga pluralitas bangsa dan melindungi hak-hak kaum minoritas. Sayangnya, peneliti mengamati banyak pengelola *newsroom* di Indonesia cenderung mengabaikan konteks yang lebih besar dari sebuah peristiwa kasus kekerasan bernuansa agama, dan pada umumnya hal itu tercermin pada pemberitaan yang hanya memberitakan peristiwa, mengabaikan kedalaman, meski harus diakui berbagai media arus utama itu pada umumnya menentang aksi-aksi kekerasan. Padahal, pemahaman terhadap konteks

⁵ "Indonesian journalists support Islamic fundamentalism: Survey", *thejakartapost.com*, 25 Agustus 2011.

dalam pemberitaan amatlah penting, khususnya kalau hal itu terkait kekerasan atau persekusi terkait agama amatlah penting. “*Religion in the true, broad sense underlies, controls, permeates at least half the stories in the news, probably a lot more,*” demikian Jeff Sharlot, editor *The Revealer*, media online khusus mengkaji isu keagamaan milik New York University (Marshall et all, 2009: 3). Memang proporsi yang dinyatakannya itu bisa diperdebatkan, namun intinya adalah agama merupakan faktor penting di dunia modern, dan dalam berbagai liputan berita-berita besar, sehingga kalau wartawan tidak paham mengenai agama-agama dengan berbagai implikasinya, terutama kalau itu konflik, maka hal itu akan berdampak pada pemberitaan mereka.

Dalam penelitian ini ingin dibuktikan bahwa meski para pengelola media massa arus utama di Indonesia paham terhadap konteks pluralisme dan dalam hal ini gangguan dalam hubungan antar umat beragama dan prinsip-prinsip kebebasan beragama di masyarakat, dan pentingnya melindungi nilai-nilai itu, namun pada pemberitaan yang dimunculkan cenderung kurang memunculkan konteks yang tepat sehingga kalau yang diharapkan adalah terbentuknya pendapat umum dan tekanan terhadap Pemerintah, mungkin itu akan sulit dicapai. Juga ingin digali faktor-faktor apakah yang membuat media massa mainstream cenderung meliput secara tidak tuntas mulai dari awal sampai akhir sebuah peristiwa konflik.

Peneliti menduga para reporter atau pun editor tidak cukup komprehensif memahami konteks dan implikasi berbagai kasus kekerasan atas nama agama yang berkembang belakangan ini, terutama konteks kebangsaan dan pelanggaran HAM, dan hal bisa saja karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan luar yang juga berubah menjadi semakin konservatif. Untuk menjawab permasalahan itu, peneliti akan menggunakan pendekatan analisis framing (*framing analysis*) dalam upaya memahami bagaimana media memperlakukan sebuah fakta mengenai pluralisme, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh media tersebut, dalam kasus kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah, 8 Februari 2011. Pada prinsipnya framing adalah upaya para wartawan untuk menyeleksi sejumlah aspek dari realitas yang mereka

pahami dalam pemberitaan mereka demi memberikan penonjolan atau bahkan penghilangan sejumlah fakta untuk kepentingan tertentu.

Obyek penelitian adalah peliputan dua surat kabar nasional yakni *Kompas* dan *Media Indonesia* terhadap kasus kerusuhan di Temanggung, mulai dari pecahnya kerusuhan pada 7 Februari 2011 sampai para provokator kerusuhan diadili dan divonis pada Juni 2011. Kedua surat kabar nasional tersebut dikenal sekuler dan tidak condong ke satu ideologi atau agama tertentu. Dalam penelitian ini peneliti sengaja tidak mengkontraskan dengan harian nasional lain seperti *Republika*, misalnya, yang jelas mempunyai mindset Islam dan cenderung konservatif.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian:

- Apakah framing (pembingkaiian) yang dibuat oleh dua surat kabar mainstream, yakni *Kompas* dan *Media Indonesia*, pada berita, feature dan tajuk rencana dalam kasus kerusuhan di Temanggung telah cukup dalam dan luas memperhatikan konteks situasi yang berkembang di lapangan dan lingkungan?
- Apakah framing yang dibuat oleh *Kompas* dan *Media Indonesia*, khususnya dalam kasus konflik agama, akan memberi sumbangan yang cukup signifikan dalam pengembangan toleransi antar umat beragama di Indonesia?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini menganalisis isi dua surat kabar mainstream di Indonesia, yakni *Kompas* dan *Media Indonesia*, terkait dengan pemberitaan mereka pada kasus di Temanggung yang terjadi pada 8 Februari 2011 lalu, yakni mulai dari penyerangan terhadap tiga properti milik umat Kristiani di Temanggung, sampai kepada proses hukum terhadap para pelaku kekerasan itu.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengungkapkan bahwa meski dua surat kabar mainstream yang terbit di Jakarta itu, mempunyai kebijakan redaksi (*editorial policy*) ataupun “ideologi” yang akan sangat menentukan arah pemberitaan mereka pada kasus kekerasan bernuansa agama, namun ada faktor-faktor teknis yang membuat konteks sebuah kejadian kurang dimunculkan dalam pembuatan berita, feature maupun tajuk rencana.
2. Mengungkapkan bahwa meski ada kecenderungan terjadi konservatisme agama di lingkungan sosial, politik, ekonomi (eksternal) pasca kejatuhan Orde Baru, namun di sejumlah media massa mainstream masih hidup nilai-nilai kebersamaan sebagai bangsa yang majemuk.
3. Mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman konteks maupun ketrampilan teknis dalam meliput keberagaman akan menghasilkan liputan yang kurang tajam atau tidak tuntas dari awal sampai akhir sebuah kejadian.

1.5. Signifikansi Penelitian

1.5.1. Signifikansi Teoritis

Secara akademis peneliti berharap penelitian ini akan memperkaya kajian bidang komunikasi, khususnya media massa, yakni menyangkut pengetahuan mengenai faktor-faktor yang menyumbang pada keberhasilan/kegagalan media massa di Indonesia membangun konsensus melalui pembentukan pendapat umum

yang menentang berbagai aksi kekerasan bernuansa agama di Indonesia, atau membangun nilai-nilai pluralitas. Diharapkan penelitian ini akan melengkapi kajian yang memakai metode analisis framing untuk menjelaskan bagaimana media massa memberikan makna dan perspektif melalui penyajian pilihan realitas dalam peliputan mereka terhadap kasus-kasus kekerasan bernuansa agama, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi framing tersebut.

1.5.2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini akan membantu pengembangan pers di Indonesia, khususnya bila didapati bahwa dalam membuat framing, khususnya pada kasus-kasus kekerasan atas nama agama, juga harus disertai dengan pemahaman yang komprehensif terhadap konteks peristiwa tersebut, dan perlunya meningkatkan ketrampilan teknis para wartawan terhadap liputan bidang agama. Melalui penelitian ini, peneliti ingin menggugah para stakeholder pers di Indonesia mengenai perlunya mengajarkan teknik-teknik jurnalisme damai khususnya keahlian meliput agama-agama, selain juga *civic education* mengenai kebangsaan Indonesia, pluralitas Indonesia, yang dicita-citakan para Bapak Bangsa ketika mendirikan Republik Indonesia.

1.6. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya mengambil satu contoh kasus saja, yakni kerusuhan di Temanggung pada 8 Februari 2011 sebagai obyek studi kasus, dan hanya dua surat kabar yang dipilih, yakni *Kompas* dan *Media Indonesia*. Dengan demikian kesimpulan penelitian ini tidaklah dapat dijadikan generalisasi untuk menggambarkan secara keseluruhan bagaimana kedua surat kabar itu meliput kasus-kasus konflik bernuansa agama lainnya di Indonesia, atau bagaimana surat kabar di Indonesia pada umumnya meliput konflik agama.

Juga dalam penelitian ini peneliti merasa bahwa profesi peneliti sebagai wartawan juga berpengaruh (bias) terhadap analisis isi kualitatif pada isi kedua

suratkabar itu, namun sedapat mungkin hal itu dieliminir sedemikian rupa agar analisis yang dibuat cukup obyektif.

Sistematika Penulisan Tesis

Penulisan tesis ini akan terdiri dari lima bab. Bab 1 adalah Bab Pendahuluan, di situ diuraikan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi teoritis maupun praktis penelitian ini, dan sistematika penulisan tesis.

Kemudian Bab 2 Kerangka Konseptual, akan menjelaskan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya untuk menjelaskan mengapa sebuah media mengapa suratkabar membuat framing dalam kasus-kasus kekerasan bernuansa agama di Indonesia.

Bab 3 Metodologi akan menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini termasuk metode pengumpulan data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini.

Bab 4 Hasil Penelitian dan Analisis Data, yang memuat semua hasil pengumpulan data dan analisis terhadap data-data itu, termasuk wawancara dengan sejumlah narasumber.

Bab 5 adalah Diskusi, Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 Konservatisme di Media

Mantan ketua umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr Ahmad Syafii Maarif menilai maraknya fundamentalisme Islam di Indonesia lebih disebabkan oleh kegagalan negara mewujudkan cita-cita kemerdekaan berupa tegaknya keadilan sosial dan terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Korupsi yang begitu dalam merasuk ke berbagai sendi kehidupan bangsa, dan itu adalah ujud kegagalan negara, disikapi dengan jalan pintas, yakni menegakkan syariat Islam melalui jalan kekuasaan. (Wahid, 2009: 7-10) Namun dalam tulisan yang sama, dia juga menyebutkan bahwa fundamentalisme itu muncul karena kegagalan umat Islam menghadapi arus modernitas yang dinilai telah sangat menyudutkan Islam.

Senada dengan itu, Muhamad Abdun Nasir, salah seorang pemikir Islam di Indonesia, menilai sekarang ini berlangsung “de-sekularisasi” global yang ditandai dengan menguatnya gerakan-gerakan keagamaan konservatif atau orthodox yang menolak *aggiornamento* (penyesuaian agama dengan persoalan kontemporer dan modernitas), dan hal itu terjadi di hampir semua tradisi agama dunia, termasuk Islam. Pemicunya adalah penolakan terhadap nilai-nilai modernitas yang merasionalkan dan mensekulerkan berbagai aspek kehidupan manusia, karena hal itu dianggap mengancam sakralitas dan otentisitas agama.⁶

Konservatisme itu telah muncul dan berkembang dengan pesat, dan dibuktikan dalam sejumlah penelitian. Dalam kasus Indonesia, maraknya kemunculan kelompok konservatif dan radikal agama justru terjadi setelah era-reformasi, yang juga mengizinkan munculnya berbagai gerakan sosial dan keagamaan seperti Front Pembela Islam, Majelis Mujahidin, dan Hizbut Tahrir,

⁶Mohamad Abdun Nasir, MA, “Menyoal Konservatisme Agama di Media Massa: Meneguhkan Peran Kritis Jurnalisme Kampus”, *sejuk.org*, Kamis, 28 Juli 2011

dimana semasa Orde Baru kelompok-kelompok militan seperti itu akan ditindas. Konservatisme itu juga antara lain ditunjukkan oleh hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan dirilis pada Maret 2005 bahwa tingkat persetujuan terhadap organisasi/kelompok keagamaan semacam Front Pembela Islam (FPI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan organisasi/kelompok seperti Jaringan Islam Liberal (JIL), misalnya. Survei lain yang dibuat oleh Lembaga Kajian Islam dan Pluralisme (LAKIP), dengan responden 1.600 guru agama Islam dan siswa SMP dan SMA muslim se-Jabodetabek, dalam periode Oktober 2010-Januari 2011 menunjukkan sekitar 50% responden setuju dengan aksi radikalisme atas nama agama yang ditujukan kepada pihak lain.⁷

Di ruang media konservatisme itu dapat saja muncul dan terjadi, antara lain ketika berbagai media mainstream meliput konflik-konflik bernuansa agama. Dalam pengamatan Pemimpin Redaksi harian *Media Indonesia*, Usman Kansong, ada sejumlah indikasi yang membuktikan munculnya gejala konservatisme dalam media massa di Indonesia, yang dapat dilihat dari:

Pertama, penggunaan diksi yang tidak tepat pada pemberitaan menyangkut kasus-kasus keagamaan. Misalnya, dalam kasus kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik ada media yang memilih menggunakan kata “bentrok” atau “bentrokan,” padahal yang terjadi adalah “penyerangan” oleh kelompok yang lebih besar kepada kelompok yang lebih kecil, di lokasi Ahmadiyah. Atau menggunakan kata “sesat” untuk Ahmadiyah, ungkapan yang dipakai oleh kelompok mayoritas dominan, dan itu artinya pers tidak netral. Sebab hanya Tuhan yang berhak menilai sesat atau tidak sesat. Pers seharusnya cukup menyebut Ahmadiyah sebagai aliran yang berbeda (dengan aliran arus utama). Menurut Kansong, kesengajaan memilih diksi yang tidak tepat dimaksudkan untuk menstigma kelompok Ahmadiyah.

⁷Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP), “Radikalisme Remaja Mengkhawatirkan”, <http://icrp-online.org>, 24 Oktober 2011

Kedua, ada ketakutan atau cenderung menghindari memberitakan konflik agama. Menurut Usman, pers Indonesia masih dihinggapi fobia SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan, akronim yang populer semasa Orde Baru), sehingga kerap enggan memuat persoalan keberagaman atau konflik antarkelompok. Dia menunjuk, misalnya, harian *Kompas* yang tidak memuat berita penyerangan pengikut Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, Februari 2011. Padahal, koran-koran lain memuatnya sebagai berita utama atau di halaman depan. Lebih lanjut dia menulis, kalau pun memuat, pers kadang menempatkan berita isu-isu keberagaman secara tidak proporsional. Pers kadang menyembunyikan berita isu-isu keberagaman di halaman dalam dengan ukuran ala kadarnya.

Ketiga, inkonsisten. Hanya meliput kejadian kekerasan bernuansa agama, namun kelanjutan proses hukumnya tidak diliput lagi. “. . . ketika peristiwa tersebut sampai pada proses hukum, pers hanya sesekali memberitakannya. Jika suatu perkara sudah memasuki ranah hukum, pers biasanya hanya memberitakan sidang perdana atau dakwaan, tuntutan, dan vonis.”

Keempat, kesengajaan mbingkai korban menjadi pelaku. Dia meminjam analisis yang dibuat Ade Armando terhadap perlakuan laman internet *VOA-Islam*, yang menempatkan jamaah Ahmadiyah sebagai pelaku kejahatan dan bukan korban (16 Februari 2011), maupun dalam *Republika Online* (18 Februari 2011), pada kedua laman itu disebutkan di rumah jamaah Ahmadiyah ditemukan banyak senjata tajam atau mereka sengaja memancing serangan, padahal mereka hanya ingin membela diri karena sudah terlalu sering dianiaya.

Kelima, menjadikan sumber resmi sebagai sumber utama. Sumber resmi dalam hal ini adalah aparat pemerintah, dan mereka dijadikan sumber utama dalam peliputan isu-isu keberagaman dan konflik yang menyertainya. Dia menilai fenomena ini merupakan sebuah ironi, sebab negara seringkali absen dalam isu-isu keberagaman, dan pemakaian sumber resmi itu kerap tidak diikuti dengan verifikasi.

Keenam, ada kecenderungan sejumlah media tertentu mengobarkan “jurnalisme perang”, dan bukannya jurnalisme damai. Hal itu sudah terbukti dalam konflik horizontal bernuansa agama di Maluku, misalnya.

Ketujuh, suka memberi panggung kepada kelompok radikal. Memang bila ditilik dari sudut keberimbangan semata, seolah-olah hal ini merupakan upaya menyeimbangkan pandangan. Namun, kalau kepada kaum radikal diberi panggung yang signifikan hal itu sama saja dengan memberi publikasi gratis kepada radikalisme. Dalam kasus pemakaman dua pelaku bom Bali I yang telah dihukum mati, beberapa media (terutama televisi) menempatkan para teroris itu seperti pahlawan yang mati syahid, padahal mereka telah membunuh lebih 200 orang.⁸

Yang dikhawatirkan adalah apabila isu-isu, terutama konflik, bernuansa agama hanya dijadikan komoditi dalam upaya meningkatkan rating atau mengikat konstituen tertentu sebagai kelompok khalayaknya. Menurut Mohamad Abdun Nasir, MA, tidak sedikit media massa yang demi mengejar oplah dan keuntungan secara tidak langsung, sengaja atau tidak, terbawa arus wacana keagamaan mayoritas yang kadang konservatif karena dipandang menguntungkan, daripada mengekspose kelompok minoritas yang kurang memberikan kontribusi ekonomis bagi industri media massa. Dalam penelitian ini akan dibuktikan bahwa meski lingkungan eksternal pada umumnya berkembang semakin konservatif, namun hal itu tidak tercermin dalam pemberitaan yang dibuat oleh dua surat kabar mainstream yang diteliti.

2.2 Realitas Media

Sudah tidak diragukan lagi bahwa media/pers mempunyai peranan dalam mengonstruksi realitas sosial (*construction of social reality*), bahkan menjadi *defining agency* karena pers/media tidak bisa menjadikan dirinya hanya sebagai sebuah saluran (*channel*) yang netral, pasif, atau sekadar kumpulan medium yang melaporkan realitas sosial begitu saja. Jadi media punya peran ikut mendefinisikan isu/permasalahan apa yang relevan, memberi konteks/makna pada berbagai kejadian yang dilaporkannya.

⁸Usman Kansong, "[Media, Konservatisme, dan Keberagaman](http://sejuk.org)", *sejuk.org*, Selasa, 15 November 2011

Upaya media untuk memberi konteks terhadap realitas sosial tersebut dalam ilmu komunikasi disebut sebagai *framing* (pembingkai), yakni upaya media mendefinisikan suatu realitas sosial melalui penyajian yang terkesan obyektif, berimbang, atau tidak memihak (non partisan). Meski ada upaya untuk tidak memihak, namun pada kenyataannya tetap ada niatan dari para pengelola media untuk mendefinisikan realitas sosial itu dalam kerangka (bingkai) tertentu, dari angle/sudut pandang nilai-nilai pengelola media, dengan pemilihan penggunaan kata/kalimat yang tertentu pula, atau bahkan cara berpikir tertentu pula. (Nugroho et all, 1999: viii-ix). Atau framing dapat diartikan sebagai sebuah proses dimana penekanan atau konstruksi sebuah pesan berdampak pada interpretasi di pihak penerima.

Mereka yang mengembangkan teori mengenai peran media dalam menyusun realitas sosial pada umumnya mendapati bahwa efek jangka panjang media terjadi tanpa disadari, dan itu merupakan hasil dari kecenderungan organisasi media, praktek dalam pekerjaan, keterbatasan teknis dan penerapan sistematis dari sejumlah nilai berita, pembingkai dan pemformatan. Paletz dan Entman (1981) menyebut dengan istilah *pack journalism* yakni kecenderungan para wartawan bekerja bersama-sama, membentuk konsensus bersama, meliput berita yang sama dan juga sumber berita yang sama. Wartawan-wartawan media Barat, misalnya, cenderung membingkai berita mengenai konflik di Balkan, Perang Teluk (1990-1991) yang mendukung aksi Amerika Serikat dan sekutunya (McQuaill, 2005, halaman 522). Bahkan dalam agresi Amerika Serikat ke Irak, sangat jelas media massa di negara itu telah menjadi alat disinformasi, propaganda, dan menyebarkan kebohongan demi mendukung Presiden Bush dan Pentagon. Media hanya menelan mentah-mentah fakta yang disodorkan pemerintah, dan abai terhadap fakta lain yang tidak sejalan dengan pemerintah, demi membangun pendapat umum yang mendukung rencana agresi (Kellner, 1995, halaman 198 – 226).

Media juga punya kemampuan mengembangkan apa yang disebut *pseudo-events* atau peristiwa-peristiwa semu yang diliput sedemikian rupa dengan tujuan mencapai perhatian khalayak terbesar atau untuk menciptakan kesan tertentu.

Praktek seperti ini biasa diterapkan semasa kampanye politik, atau kesengajaan untuk menimbulkan kesan tertentu. Dan media massa (mainstream) di Indonesia sebenarnya dapat mendefinisikan sebuah realitas sosial kalau mereka menyadari bahwa mereka dapat mengonstruksi relasi antar umat beragama di Indonesia dalam upaya bersama membangun sebuah Indonesia yang plural seperti diamanatkan oleh para Bapak Bangsa ketika mereka mendirikan negara ini. Kegagalan media massa membangun sebuah konstruksi sosial mengenai nilai-nilai positif sebuah masyarakat yang plural, menghargai perbedaan, menghormati hak-hak asasi orang lain, tidak mendiskriminasi kelompok lain khususnya minoritas dapat bermuara pada kehancuran bangsa ini.

Media massa di Inggris, misalnya, pernah secara sengaja dan dalam "koordinasi" dengan Pemerintah mengembangkan *journalistic diplomacy*, ketika pemerintah di London sudah putus akal berupaya membatasi peliputan aksi-aksi terorisme yang dilancarkan para gerilyawan Tentara Republik Irlandia (IRA). Artinya, media memang menjalankan tugas mereka ketika melaporkan kejadian kepada publik mengenai serangan-serangan teror, meski bukan tujuan mereka untuk memberi keuntungan kepada para IRA dalam perjuangan politik mereka. Maka melalui *journalistic diplomacy* sejumlah wartawan diminta memunculkan dalam laporan-laporan mereka mengenai kemungkinan rekonsiliasi antara kubu Katolik (Sinn Fein, yang pro kemerdekaan Irlandia Utara) dengan kubu protestan (Unionist yang ingin tetap bergabung dengan Inggris). Akibatnya, gagasan mengenai rekonsiliasi itu menjadi topik perdebatan panjang di antara para tokoh politik di berbagai surat kabar dan berujung pada perdamaian pada pertengahan tahun 1998 (Kaid dan Bacha, 2008: 783-787). Artinya, media massa di Inggris dapat membangun sebuah konsensus bersama mengenai perlunya suatu penyelesaian damai di Irlandia Utara, mengingat kekerasan tidak akan pernah menjadi suatu solusi permanen.

Dalam konteks Indonesia, ada kecenderungan wartawan melaporkan kekerasan demi kekerasan benuasa agama apa adanya, karena konflik itu -- apakah itu persekusi/aniaya, penindasan, bentrok antar masyarakat, konflik di

antara dua pemeluk agama dalam hal perkawinan, tokoh berpindah agama dll -- sesuai dengan prinsip *bad news is good news*, yakni menyajikan sebuah peristiwa sebagai berita selama ada aksi di situ. Peliputan berbagai konflik bernuansa agama yang cenderung mengabaikan pemahaman latar belakang masalahnya, akan terefleksi dalam pelaporan para wartawan yang hanya melihat kejadian itu sebagai sekadar sebuah (rangkai)an kejadian/event, ketimbang sebagai sebuah fenomena gunung es dari permasalahan lain yang lebih luas. Kalau fenomena ini yang terus dikembangkan, wartawan akan selalu kesulitan memahami sebuah situasi konflik keagamaan yang dihadapi secara jernih, mereka akan dengan akan sangat mudah tersesat di tengah rimba persoalan dan sulit menemukan akar masalah. Sehingga kalau ini situasi yang berkembang di banyak media, maka, dari hari ke hari laporan yang dibuat para wartawan tidak akan beranjak dari satu konflik ke konflik yang lain, tanpa berusaha mengangkat akar persoalan demi mencari jalan keluar.

Peneliti mengamati bahwa berbagai kekerasan dan aksi anarki bernuansa agama di Indonesia jarang dilaporkan sebagai bentuk perbuatan yang melanggar hak-hak asasi manusia, pengabaian bahkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan sebagai aksi yang diskriminatif. Faktor-faktor tersebut jarang diangkat sebagai topik liputan kemungkinan besar karena banyak wartawan di lapangan yang tidak paham latar belakang tersebut, atau pun para editor juga paham hal itu namun dipengaruhi oleh ideologi atau pun pandangan agamanya sendiri. Seandainya saja para wartawan di Indonesia senantiasa mengaitkan berbagai konflik bernuansa agama tersebut dalam konteks pencideraan terhadap paham kebangsaan, maka membangun sebuah agenda bersama dengan tujuan mendesak Negara bertindak tegas secara hukum terhadap kelompok-kelompok anarkis kemungkinan besar dapat terwujud.

2.3 Kekerasan Bernuansa Agama dan Ormas Anarkistis

Selama ini berbagai kekerasan bernuansa agama di Indonesia dalam kaitan hubungan antar agama kerap dilancarkan oleh kelompok-kelompok radikal

keagamaan, di antaranya yang paling sering disorot adalah Front Pembela Islam (FPI), namun bisa pula oleh berbagai organisasi lainnya. Sayangnya, dalam kenyataan polisi jarang menindak kelompok-kelompok tersebut. Sejarah pembentukan berbagai kelompok radikal itu tidaklah sama. Di sini peneliti memberikan contoh pembentukan FPI yang antara lain pemrakarsanya adalah Jenderal Wiranto (ketika itu Panglima ABRI) untuk menghadapi aksi unjuk rasa para mahasiswa yang menuntut reformasi (Fealy and White, 2008: 192-210) Kapolda Metro Jaya ketika itu, Mayjen (Pol) Nugroho Djajusman, dalam wawancara dengan penulis buku tersebut mengakui polisi mendukung aksi-aksi FPI guna menghadapi para mahasiswa ekstrem yang mendesakkan reformasi. Uang itu didapat polisi dari para pengusaha. Bantuan itu bisa berupa logistik maupun finansial. Namun dalam perjalanannya, FPI membebaskan diri dari patron mereka dan menjadi sebuah kelompok independen yang mencari sumber-sumber dana mereka sendiri. (Fealy and White, 2008)

FPI, yang dipimpin oleh Muhammad Rizieq Shihab, didirikan di Pondok Pesantren Al Umm, Cempaka Putih, 17 Agustus 1998. Dasarnya adalah keprihatinan terhadap semakin maraknya kemaksiatan dan pornografi, yang terkesan dibiarkan oleh aparat keamanan. Kelompok ini bertindak berdasarkan prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar* (menganjurkan/mengajak melakukan hal-hal yang bersifat kebaikan, dan mencegah hal-hal yang buruk) di segala aspek kehidupan dan siapa pun yang bertentangan dengan syariah Islam harus dilawan. Untuk menjalankan prinsip itu dibentuklah dua kelompok, yakni Jamaah yang bertugas menjalankan *amar ma'ruf* (termasuk dakwah). Dan Laskar Pembela Islam (LPI) untuk menjalankan *nahi munkar*. FPI tidak pernah bercita-cita mendirikan negara Islam namun lebih peduli pada penerapan nilai-nilai syariah dalam masyarakat karena hal itu yang akan menyelamatkan umat. "Islam identik dengan syari'ah, adalah solusi untuk semua persoalan," kata Rizieq, dalam berbagai kesempatan. (Fealy and White, 2008)

Bila FPI pada awalnya banyak terlibat dalam aksi-aksi penyisiran, penyerangan, dan perusakan tempat-tempat yang dianggap sebagai sumber kemaksiatan (diskotik, lokalisasi prostitusi, bar dan karaoke, tempat judi,

menyerang kontes waria dll), maka belakangan ia bermetamorfosa sebagai sebuah gerakan politik, termasuk mengkritisi berbagai persoalan politik yang muncul dan tidak lagi sekadar isu kemaksiatan. (Mubarak, 2007: 116-118). Gerakan-gerakan politik yang dilancarkan FPI antara lain menyerang pawai damai AKKBB pada 1 Juni 2008, menyerang kantong-kantong kelompok Ahmadiyah, menyerang gereja yang dianggap tidak punya izin misalnya dalam kasus HKBP Cikeuting Udik Bekasi, bersama Forum Umat Islam ikut menekan Pemerintah agar segera mengeluarkan SKB Pelarangan Ahmadiyah, bahkan mengancam akan menggulingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bila dia benar-benar akan membubarkan ormas Islam yang anarkis. "Andaikata ada ormas Islam yang dibubarkan SBY dengan cara-cara keji, dengan cara biadab, dengan cara curang, dengan cara kejam, maka saya akan ajak umat Islam di manapun berada: kita gulingkan SBY," Rizieq menyerukan⁹.

Dalam ilmu politik, kelompok-kelompok seperti FPI dapat dikategorikan sebagai *interest group* atau pun *pressure group*, yakni kelompok yang bukan partai politik namun mencoba menggalang opini publik melalui cara-cara tertentu demi mempengaruhi kebijakan pemerintah. Berbeda dengan partai politik, *interest/pressure group* pada umumnya tidak berupaya mencapai kekuasaan (berkuasa), namun hanya mencoba menggalang dukungan seluas mungkin dan mencoba menjadi representasi kelompok-kelompok yang sealian dengannya. *Interest/pressure group* dapat menggunakan cara-cara kekerasan dan gangguan untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah bahwa mereka akan terus bertindak seperti itu bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Atau memakai cara-cara legal (hukum) juga dalam rangka membela cita-cita dan aspirasi perjuangan mereka. (Shively: 229-250).

Kehadiran kelompok-kelompok para militer dengan pendekatan kekerasan yang dianutnya, tak bisa dipungkiri merupakan buah dari perjalanan bangsa Indonesia yang mencoba menerapkan prinsip-prinsip berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pasca perubahan politik tahun 1998. Dalam

⁹*Vivanews.com*, 14 Februari 2011.

sejarah politik dunia juga tercatat bahwa kaum gangster/preman merupakan pihak yang ikut mengambil keuntungan dari demokrasi politik yang berbasiskan pemilihan umum, entah berperan sebagai kandidat, *powerbroker*, pencari dana, mengintimidasi lawan-lawan politik, atau peran lain yang dikehendaki oleh kliennya. Mereka ini sangat mudah berganti seragam dan haluan politik, yang penting menguntungkan. Jadi, meski kelompok-kelompok radikal merekrut para preman untuk menjadi anggotanya, misalnya, namun mereka akan membantah kalau disebut organisasi preman. (Fealy and White, 2008:207)

Sayangnya, Pemerintah bersikap lemah bahkan cenderung membiarkan bila kelompok radikal beraksi menganiaya (persekusi) kelompok yang berpandangan berbeda dengan mereka, padahal mereka sama sekali tidak punya hak untuk melancarkan aksi-aksi bernuansa kekerasan tersebut. Selain melanggar hukum, aksi-aksi anarkis tersebut juga mencederai, bahkan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam penelitian ini, kerusuhan Temanggung masuk dalam kategori kekerasan bernuansa agama yang dipicu oleh vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung terhadap Antonius Richmond Bawengan (50) seseorang dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta yang didakwa menista agama Islam. Dalam kasus ini majelis memvonisnya dengan hukuman maksimal lima tahun penjara sesuai KUHP. Namun, massa yang dipimpin KH Syihabudin bin Sukaeni menilai persidangan tidak adil seharusnya terdakwa dihukum mati, dan bahkan mengancam akan membunuh hakim dan jaksa. Gedung pengadilan negeri dirusak dan seribuan massa yang ada di luar pengadilan merusak tiga gedung gereja yang ada di kota Temanggung dan membakar kendaraan yang ada di lokasi-lokasi itu, yakni: Gereja Bethel Indonesia Shekinah (di belakang Kantor Dinas Pertanian), Gereja Pantekosta di Indonesia (dekat Pasar Kliwon), dan Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus (di sebelah Polres Temanggung). Aksi itu terjadi nyaris tanpa dicegah oleh aparat Polri/TNI dan aparat negara lainnya. Pasca kerusuhan, ada sejumlah pelaku yang ditangkap polisi dan kemudian diadili serta divonis hukuman penjara dengan bertempat di Pengadilan Negeri Semarang.

Kerusuhan di Temanggung, bila dicermati dari fakta yang terungkap di pengadilan bukanlah dilakukan oleh ormas seperti FPI, misalnya, namun lebih

diarahkan kepada massa yang berasal satu kampung dengan KH Syihabuddin atau pun ratusan massa lain yang tidak dideteksi oleh polisi. Dalam fakta persidangan ada disebut-sebut sejumlah orang yang memakai atribut Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) yang adalah organisasi di bawah payung Partai Persatuan Pembangunan, namun hal ini tidak dikembangkan lebih jauh dalam penyelidikan atau pun penyidikan. Terdakwa KH Syihabuddin sendiri adalah Ketua Gerakan Pemuda Kabah (GPK) Jawa Tengah sejak 2003 merangkap anggota Majelis Pertimbangan Wilayah (DPW) Jawa Tengah. Atau juga orang-orang yang menutup muka mereka dengan kain.¹⁰ Dalam penelitian ini, seluruh proses mulai dari pecahnya kerusuhan sampai vonis dijatuhkan kepada para terdakwa pelaku yang menjadi liputan dua surat kabar yang diteliti akan dianalisis.

Peneliti sengaja memilih kasus kerusuhan Temanggung dan bukan kasus Cikeusik atas sejumlah pertimbangan subyektif:

1. Kerusuhan Temanggung (8 Februari 2011) terjadi hanya selang dua hari setelah insiden penyerangan rumah jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, oleh seribuan massa yang menewaskan tiga orang. Kasus Ahmadiyah menjadi menonjol karena ada SKB tiga menteri yang melarang kelompok ini melancarkan aktivitasnya, sementara ada kelompok-kelompok tertentu yang terus berusaha agar aliran ini dibubarkan. Sedangkan kasus kerusuhan di Temanggung tidak ada hubungannya dengan kasus Ahmadiyah, meski dipicu oleh kasus yang kurang lebih satu benang merah yakni penistaan agama. Pada kerusuhan ini dan tidak jatuh korban jiwa, namun aksi massa itu tampaknya sudah mengincar sejumlah sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Maka, meski kasusnya berbeda, namun persoalannya sama: sekelompok orang dengan ideologi tertentu memprovokasi massa untuk melancarkan persekusi (aniaya) terhadap umat yang dianggap minoritas. Dalam kaitan ini peneliti ingin melihat framing (pembingkai) yang dibuat oleh surat kabar terhadap kasus

¹⁰Putusan No. 199/Pid.B/2011/PN.SMG: Putusan Sela Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara terdakwa Syihabuddin bin Sukaeni.

Temanggung, apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pasca kejadian mengeluarkan pernyataan untuk membubarkan organisasi massa yang anarkistis.

2. Melalui kasus kerusuhan Temanggung, yang mungkin hanya satu kejadian tunggal berbeda dengan masalah yang dialami jamaah Ahmadiyah, peneliti juga ingin melihat apakah media massa meliput kasusnya dalam konteks yang tepat dan konsisten mengangkat tema tertentu, apakah peliputan dilakukan sampai kasusnya tuntas dari awal sampai akhirnya.

2.4 Model Analisis Framing

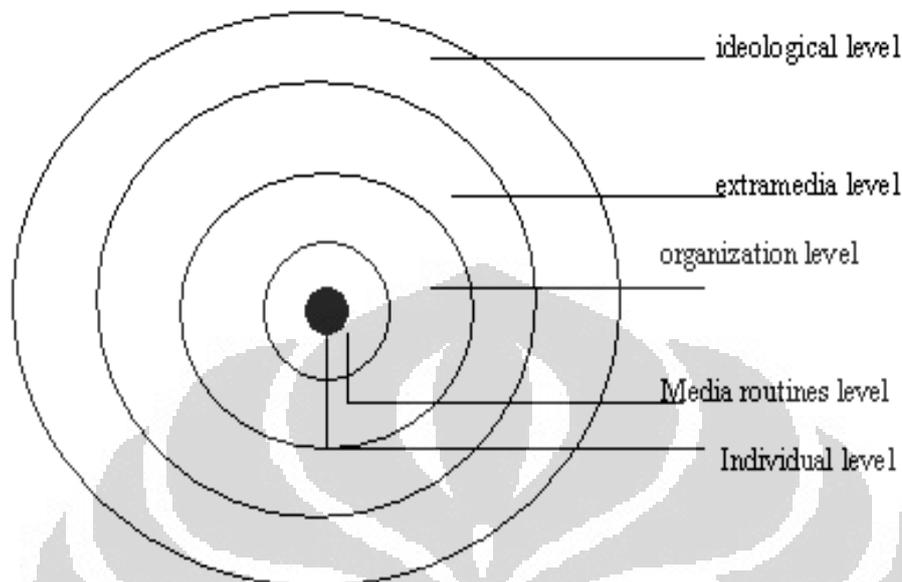
Apa pun yang ditampilkan oleh media, tentulah ada maksud yang ingin dicapai, selain tujuan-tujuan entah itu komersial, ideologis, atau sekadar rutin. Dalam kajian mengenai hal-hal apa saja yang mempengaruhi isi media Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese dalam buku mereka *Mediating the Message Theories of Influences on Mass Media Content* ingin membalik berbagai tradisi penelitian mengenai efek media selama ini, dengan menyatakan bahwa isi media pun dipengaruhi oleh banyak faktor. Mereka mengemukakan lima hipotesis untuk menjelaskan asumsi itu, bahwa:

- Isi sebagai cerminan realitas sosial dengan sedikit atau tanpa distorsi (*mirror approach*), yakni: media secara akurat menyampaikan realitas yang ada di masyarakat, namun tetap saja realitas itu adalah hasil kompromi antara mereka yang menjual informasi itu dan pembeli informasi tersebut.
- Isi dipengaruhi oleh sosialisasi dan perilaku para pekerja (*communicator centered*), yakni: ada faktor-faktor psikologis yang intrinsik di kalangan para pengelola media sehingga realitas sosial yang ditampilkan merupakan hasil kesekapatan berbagai kelompok sosial dan itulah yang dijadikan norma. Bila ada hal-hal baru atau menyimpang dalam masyarakat akan diperlakukan sebagai eksentrik dan patut diabaikan .

- Isi dipengaruhi oleh rutin di media (*organizational approach*), yakni: para pekerja di media bekerja di bawah pengaruh sistem dan struktur yang dibangun oleh organisasi. Misalnya, menulis berita harus dalam struktur piramida terbalik.
- Isi dipengaruhi oleh berbagai lembaga sosial dan kekuatan lain (*external factors*), yakni: kekuatan ekonomi dan budaya, maupun khalayak menentukan isi media. Pendekatan kekuatan pasar, misalnya memaksa komunikator memenuhi selera khalayak. Atau pendekatan tanggungjawab sosial misalnya, cenderung memenuhi apa yang menjadi kebutuhan khalayak ketimbang apa yang mereka inginkan.
- Isi media merupakan fungsi posisi ideologi dan menjaga status quo (*hegemony approach*), yakni: pendekatan yang berpandangan bahwa isi media dipengaruhi oleh mereka yang berada di kekuasaan dalam masyarakat. Sebagai bagian dari sistem ekonomi yang dikendalikan oleh kekuatan ekonomi, media massa menjunjung sebuah ideologi yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan tersebut, demi memastikan bahwa masyarakat akan tetap dalam formatnya seperti sekarang.

Dengan lima kategori itu Shoemaker dan Reese kemudian menyusun apa yang disebut sebagai model *hierarchy of influences on media content* yang mencoba menjelaskan bahwa pengaruh terhadap isi media itu berpusar pada lingkaran terpusat yang terdiri dari lima lapisan mulai dari faktor individual, rutin, organisasi, faktor eksternal, dan ideologi. (Shoemaker and Reese, 1996: 6-7)

Grafik 2.1 Hierarchy of Influences on Media Content on Individual Level
(Shoemaker, Reese: 64)



Melalui modelnya itu keduanya ingin mengemukakan bahwa pandangan yang selama ini meyakini bahwa hanya individu yang dominan mempengaruhi isi media tidaklah tepat karena ada empat faktor lainnya. Mereka juga ingin memberikan alternatif bagi studi efek media yang selama ini berlangsung, yang senantiasa menjadikan media (sebagai variabel independen) yang mempengaruhi khalayak (sebagai variabel dependen). Dengan model ini terlihat bahwa media ternyata juga merupakan variabel dependen yang dipengaruhi berbagai faktor. Dan, penelitian mengenai efek terhadap isi media dapat dilakukan pada berbagai lapisan pengaruh tersebut.

Level Individu. Pada lapisan ini sejumlah faktor intrinsik yang berpengaruh pada para wartawan adalah: 1) latar belakang kepribadian dan profesionalnya, misalnya pendidikannya, lama bekerja dst; 2) sikap terhadap nilai-nilai dan keyakinannya yang merupakan akibat dari latar belakang atau pengalamannya, misalnya orientasi politik, agama dst; 3) apakah para wartawan punya konsep dan orientasi mengenai profesinya, misalnya, apakah harus bersikap

netral dalam memberitakan atau aktif mengembangkan berita, apakah akan patuh pada kode etik dst.

Level Rutinitas Media. Yang dimaksud pada level ini adalah pola kegiatan yang sudah terpola dan berulang-ulang dikerjakan dikerjakan oleh para profesional di media. Misalnya peran gatekeeper untuk menyeleksi berbagai informasi yang masuk dan mana-mana yang layak jadi berita. Rutinitas ini dilakukan dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas dalam bekerja, dan itu semua melibatkan faktor-faktor seperti sources/suppliers dan khalayak/konsumen. Rutinitas ini sangat mempengaruhi isi media, karena ia membentuk sebuah lingkungan langsung tempat para pekerja media melaksanakan pekerjaan mereka.

Level Organisasi. Bagaimana pun berbagai struktur dalam organisasi mengatur tugas dan kewenangan orang-orang yang berada dan mengisi struktur tersebut berpengaruh terhadap isi media. Dengan demikian struktur organisasi menentukan siapa yang membuat kebijakan isi, siapa yang harus melaksanakan dst. Termasuk di situ adalah apakah pemilik juga mempengaruhi isi media, apakah bagian niaga juga mempengaruhi isi media dst.

Level Pengaruh Eksternal. Isi media juga dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berada di luar media, mereka itu bisa berupa: sumber informasi (nara sumber, Humas perusahaan dll), sumber penerimaan keuangan (pemasang iklan, khalayak), berbagai lembaga lain (bisnis, pemerintah, LSM, agama), situasi ekonomi, juga perkembangan teknologi (missal internet)

Level Ideologi. Ideologi dalam pengertian ini adalah sebuah mekanisme simbolik yang berperan sebagai faktor pengikat dan perekat dalam masyarakat. Ideologi itu dapat berupa seperangkat nilai-nilai dan keyakinan, dan melaluinya masyarakat melihat dan menilai dunia dan dari situ kita bertindak. Ideologi bukanlah sesuatu yang berada pada level individu, melainkan ada di tingkat masyarakat, atau sebuah *total structure*. Dalam praktek, ideologi ini berpengaruh misalnya ketika sebuah media berusaha mendelegitimasi kelompok lain yang tidak seideologi dengannya, misalnya.

Shoemaker dan Reese mencoba menjelaskan bahwa meski ada pengaruh individu pada isi media, namun pengaruh itu kalah kuat dibandingkan dengan rutin

di media. Demikian pun rutin di media kalah pengaruhnya dibandingkan dengan struktur organisasi dalam menentukan isi media. Dan orang-orang di struktur organisasi masih dapat dipengaruhi oleh mereka yang berada di luar media. Dan pada akhirnya ideologi yang paling kuat dan luas mempengaruhi keseluruhan proses menentukan isi media tersebut.

Kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi isi media dapat membantu menjelaskan bahwa pembuatan framing (*frame building*) merupakan proses yang berlapis-lapis dan tidak ditentukan hanya oleh satu atau dua faktor, melainkan sejumlah faktor. Namun, apa pun faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses *frame building*, tidaklah dipungkiri salah satu tujuannya adalah untuk membentuk pendapat umum. Mengacu pada pandangan Walter Lippmann (1922) maka pendapat umum itu tak lebih dari bayangan yang terdapat dalam benak masyarakat, sebagai buah dari tindakan media membuat *frame* terhadap realitas dari berbagai kejadian yang ada di dunia. Dan meski tidak memakai konsep framing, berbagai studi terkait sudah dimulai pada awal 1940-an, namun masih terfokus pada upaya memahami dan mencari tahu pengaruh komunikasi terhadap perilaku manusia, dan itu berupa kajian di bidang psikologi, sosiologi, komunikasi politik dll (Hallahan, 1999, hal 205)

Terminologi framing banyak dipengaruhi dan didominasi paradigma konstruksi sosial (*social constructivism*), yang prinsip dasarnya adalah realitas merupakan hasil produksi terus-menerus oleh manusia secara dialektis, dinamis dan plural (bermakna banyak). Dua asumsi penting pendekatan konstruktivisme yakni: pertama segala hal yang dialami manusia patut mendapat interpretasi, apakah itu data yang ditangkap indera kita sampai berbagai data sosial seperti artefak, bahasa dan ritual. Kedua, realitas yang kita perbincangkan dalam konstruktivisme adalah dunia kita sehari-hari dan difahami bersama (Nabi&Oliver, 2009, halaman 55-56).

Dalam kajian ilmu komunikasi, para pendukung teori konstruksi sosial beranggapan bahwa karena masyarakat dari segi struktural, ideologi, kekuatan (ekonomi, politik) juga kultural adalah bentukan manusia, maka masyarakat itu akan selalu berubah dibentuk dan terbentuk tergantung bagaimana masyarakatnya

memiliki interpretasi terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam proses perubahan tersebut media berperan besar dalam membentuk opini dan juga dalam memberikan makna atau pun interpretasi masyarakat terhadap lingkungan. Bahkan media dapat digunakan untuk membuat "*false consciousness*" seperti dalam propaganda. Media dapat berpedan sangat besar dalam mempromosikan nasionalisme, kerukunan sosial, yang mencakup banyak aspek kehidupan, termasuk kerukunan umat beragama (yang dapat dijadikan contoh sebagai sebuah konstruksi sosial/*social construction*).

Namun, hal yang menjadi catatan khusus dan dapat disebut sebagai kekurangan sebuah konstruksi sosial adalah, news (berita) tidak mungkin menyiarkan secara utuh sebuah kejadian atau rangkaian kejadian, dan hanya dapat menyampaikan fragment atau bagian-bagian tertentu, sedangkan pengamatan/observasi terhadap sebuah kejadian yang dilancarkan oleh media akan memberikan makna (*meaning*) tertentu tergantung dari frame (pembingkaihan) yang diambil, sudut pandang (*angle*) dan perspektif yang dibangunnya. Dengan demikian, konstruksi sosial mengacu pada proses-proses dimana berbagai peristiwa, manusia, nilai-nilai, dan gagasan-gagasan didefinisikan dan diinterpretasikan sedemikian rupa, lalu diberi nilai dan prioritas oleh media massa, dengan tujuan membangun konstruksi (personal) mengenai lukisan realitas yang lebih besar, disinilah gagasan mengenai framing dan skema menjadi penting. (Dennis McQuail, 2000, 101)

Dalam konteks berita, sebuah teks berupa berita haruslah dipandang sebagai konstruksi atas realitas. Sehingga sangat mungkin terjadi sebuah peristiwa dikonstruksi (dilaporkan) secara berbeda di media yang berbeda karena para wartawan memiliki sudut pandang (*angle*) dan konsepsi sendiri-sendiri ketika melihat sebuah kejadian (fakta). Berita dalam pandangan konstruksi sosial bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti yang sesungguhnya, karena ia merupakan hasil produk interaksi dan dialektika antara wartawan dengan fakta. (Eriyanto, 2002, halaman 17-18). Dengan demikian kalau media massa menggelar framing melalui seleksi dan pemilihan fakta hal itu tak lain karena tidak semua hal dapat diliput oleh media sehingga harus dipikirkan mana-mana yang terpenting dalam upaya menjelaskan berbagai isu-isu sosial politik yang menonjol. Dari

media-lah publik mengetahui berbagai peristiwa yang telah diseleksi itu, sehingga mereka juga bergantung pada sudut pandang media.

Para pakar konstruksivisme mempunyai pandangan tersendiri mengenai berita yang membedakan dengan kaum positifis. Eriyanto mencoba menjelaskan hal itu dalam sejumlah butir:

- 1) Fakta/peristiwa adalah hasil konstruksi yang bersifat subyektif. Sehingga kebenaran suatu fakta bersifat relatif, berlaku sesuai konteks tertentu.
- 2) Media adalah agen konstruksi, jadi ia tidak sekadar menjadi saluran (channel) melainkan telah mendefinisikan realitas tersebut melalui berbagai seleksi yang dilakukannya.
- 3) Berita bukan refleksi dari realitas melainkan konstruksi dari realitas, dimana unsure dramatisasi ada di situ.
- 4) Berita bersifat subyektif, opini tidak dapat dihilangkan karena ketika meliput sebuah peristiwa wartawan memiliki perspektif dan pertimbangan yang subyektif.
- 5) Nilai etika, atau keberpihakan wartawan tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan dan pelaporan sebuah peristiwa.
- 6) Dan dalam penelitian yang terilhami pendekatan konstruksivisme nilai, etika, dan pilihan moral peneliti menjadi bagian yang integral pula dalam penelitian. (Eriyanto, 2002, halaman 19 -36)

Dengan penjelasan itu, maka framing memang merupakan bagian dari upaya mengkonstruksi realitas sosial dan ia memainkan peran integral dalam studi komunikasi, terutama dalam proses peliputan di media mau pun ketika publik menggunakan frame yang disajikan media untuk menerjemahkan situasi di sekitarnya.

Menurut salah satu pakar framing, Robert Entman (1993) dalam framing terjadi proses seleksi dan penonjolan, karena “pada proses pembingkaiian terjadi seleksi sejumlah aspek untuk memahami realitas dan membuatnya lebih penting dalam mengkomunikasikan teks”. Dalam proses itu terjadilah: *problem definition*, *causal interpretation*, *moral evaluation*, dan/atau *treatment recommendation* untuk item yang digambarkan (Entman, 1993, halaman 52). Dengan demikian dalam

frame yang dibuat oleh media haruslah terdapat pendefinisian persoalan (*define problems*), pengidentifikasian akar persoalan (*identify causes to the problems* atau *causal interpretation*), membuat penilaian dengan mengevaluasi berbagai agen dan dampaknya (*make judgments by evaluating agents and their effects* atau *moral evaluation*), dan memberi saran penyelesaian masalah (*suggest remedies by offering treatments for those problems*) dan memprediksi berbagai efek yang dapat terjadi.

Entman (1993) juga berpendapat bahwa sekurangnya ada empat lokasi terjadi pembingkaiannya itu di dalam proses komunikasi: pada komunikator (*communicator*), pada teks (*text*), pada penerima (*receiver*), dan pada budaya (*culture*). Pertama, komunikator (*communicator*) secara sadar atau tidak membuat bingkai mengacu pada sistem nilai yang diyakini organisasi. Pada lokasi kedua, yakni teks (*text*), pembingkaiannya itu dimanifestasikan melalui kehadiran atau penghilangan sejumlah kata-kata, frasa gambar-gambar tertentu, narasumber tertentu, yang mendukung sudut pandang yang dipilih untuk memperkuat fakta-fakta atau penilaian. Dengan demikian konsep framing secara konsisten menawarkan sebuah cara untuk menggambarkan kekuatan teks komunikasi (Entman, 1993, p. 51 - 52). Pada lokasi ketiga, penerima (*receiver*), atau para individu, menggunakan berbagai frame sebagai pengetahuan utama untuk secara efisien memproses informasi. Dan pada lokasi keempat proses pembingkaiannya itu biasanya meminta bingkai budaya (*culture*) yang lebih besar. Budaya adalah bingkai besar yang banyak digunakan dalam berbagai diskursus sosial. Sehingga “framing pada keempat lokasi itu sama-sama melibatkan fungsi-fungsi: seleksi dan penegasan (*highlighting*) dan penggunaan elemen-elemen yang sudah mendapat penonjolan untuk mengkonstruksi sebuah argumen mengenai berbagai persoalan dan penyebab, evaluasi maupun solusinya (Entman, 1993, halaman 53).

Dalam proses framing yang terjadi bukanlah peristiwa yang statis melainkan dinamis yang mencakup kegiatan *frame building* (bagaimana pembingkaiannya itu muncul) dan *frame-setting* (pertautan antara frame media dan kecenderungan khalayak). *Frame-building* mengacu pada faktor-faktor yang

mempengaruhi kualitas struktur frame berita. Berbagai faktor internal di newsroom menentukan bagaimana para wartawan dan organisasi media membingkai isu (Shoemaker & Reese, 1996). Dan sangatlah penting memperhatikan faktor-faktor yang ada di luar media. Proses pembingkaiannya itu terjadi dalam suatu interaksi yang berkesinambungan antara wartawan dan para elit (Gans, 1979; Tuchman, 1978) dan gerakan sosial (Cooper, 2002; Snow & Benford, 1992). Hasil proses *frame-building* tercermin di dalam teks.

Frame-setting mengacu pada interaksi antara frame media dan para individu terkait pengetahuan dan sikap mereka. Framing dalam proses pemberitaan dapat berdampak pada pembelajaran, interpretasi, dan evaluasi terhadap berbagai isu atau kejadian. Telah banyak penelitian diadakan terkait dengan *frame-setting*, kerap dengan tujuan untuk menggali sampai sejauh mana dan dalam kondisi seperti apa khalayak merefleksikan dan mencerminkan pembingkaiannya yang mereka terima itu, berita. Konsekuensi framing dapat terjadi pada level individu atau pun sosial. Pada level individu dapat berdampak pada perubahan sikap terhadap sebuah isu didasarkan pada terpaan terhadap frame tertentu. Pada level masyarakat, frame dapat menyumbang pada proses sosial seperti sosialisasi politik, pembuatan keputusan, dan aksi bersama.

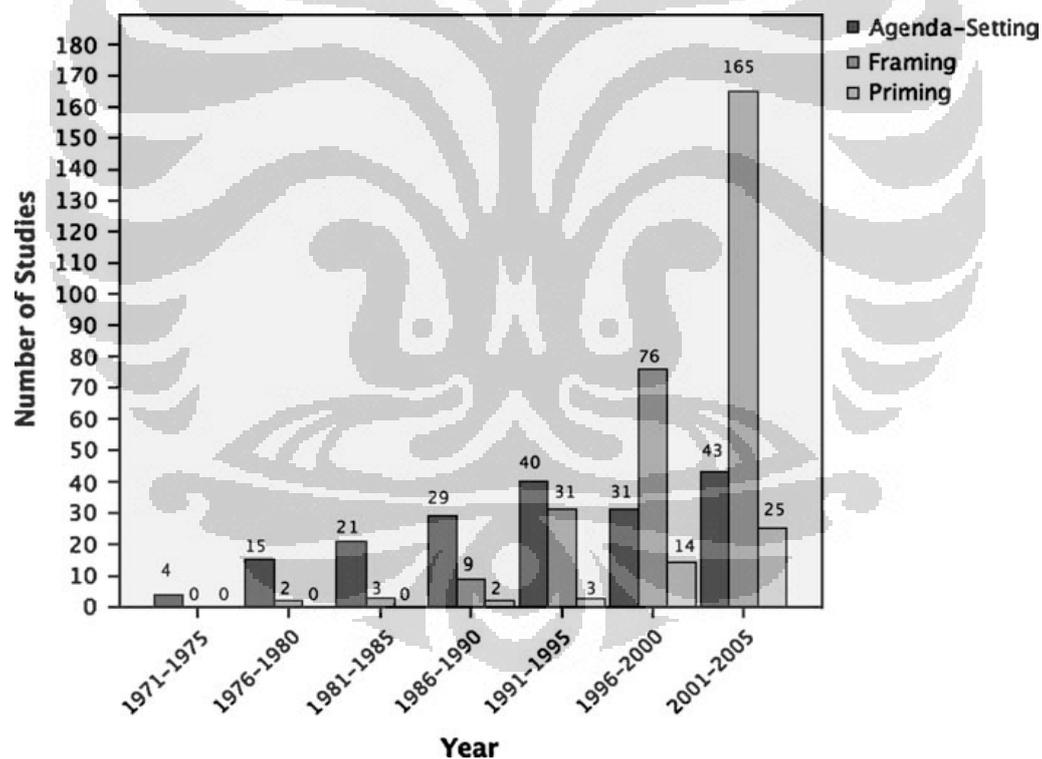
Frame lebih menekankan pada penonjolan aspek yang berbeda menyangkut sebuah topik, dimana di situ penyajian menjadi penting, terutama dalam framing berita, dalam hal ini bukan hanya faktor "*wording*" atau pemilihan kata yang dipentingkan. Misalnya, dalam kasus rencana kenaikan harga BBM, ketika pemerintah mencoba mengurangi subsidi BBM maka frame yang disajikan media massa di Indonesia bisa berupa ketidakberesan kebijakan energi, mafia BBM yang cenderung menolak rencana tersebut. Artinya, framing dapat disajikan sebagai bentuk argumentasi-argumentasi politik, norma-norma jurnalistik, atau diskursus yang terjadi di masyarakat. Dia merupakan cara alternatif untuk mendefinisikan sebuah persoalan kepada dunia politik dan sosial.

Belakangan ini analisis framing banyak digunakan oleh para peneliti bidang komunikasi untuk memahami perilaku media dan efek yang dihasilkannya. Misalnya, David H. Weaver dalam kajiannya yang mencoba membandingkan

penelitian agenda setting, framing dan priming, mendapati ada kecenderungan peningkatan yang dramatis dalam jumlah penelitian komunikasi yang menggunakan pendekatan framing. Menurut dia hal itu terjadi karena dalam framing terkandung lebih banyak faktor dibandingkan agenda setting atau priming.

Dengan mengambil data dari *Communication Abstracts*, pada periode 1976–1980, 1996–2000 dan 2001–2005 terlihat lonjakan tajam dalam penelitian framing. Tidaklah jelas mengapa framing menjadi demikian populer di kalangan para peneliti komunikasi, namun tampaknya hal itu terkait dengan ambiguitas atau pendekatan menyeluruh dalam terminologi itu. (Weaver, 2007, 142-147)

Grafik 2.2 Trend Penggunaan Metode Penelitian Agenda Setting, Framing dan Priming (Weaver 2007)



2.5. Surat Kabar

Dalam penelitian ini akan dianalisis dua isi surat kabar nasional yang terbit di Jakarta, yang dapat dikatakan sebagai surat kabar mainstream (umum), yakni *Kompas* dan *Media Indonesia*. Tentu saja pilihan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan yang sifatnya subyektif dan purposif.

2.5.1 Kompas

Kompas adalah surat kabar yang cukup tua, terbit tahun 1965 oleh kelompok katolik (Partai Katolik) yang kemudian berkembang secara pesat, dan pada perjalanannya menjadi harian yang independen. Motto yang disandang harian ini adalah: *Amanat Hati Nurani Rakyat*. Mengenai motto tersebut, Jakob Utama, salah satu pendiri *Kompas* yang masih hidup menguraikan: “Hati nurani yang menghasratkan kesejahteraan, sesuai dengan martabat pribadi dan sosialnya, sesuai dengan kesatuan badani dan rohaninya. Kesejahteraan demikian itulah panggilan yang diamanatkan Tuhan. Tetapi realisasinya harus disertai dengan perjuangan, oleh karena manusia juga dikaruniai kemauan bebas. Ada syarat-syarat obyektif yang dibutuhkan untuk mewujudkan tuntutan hati nurani; yakni kebebasan, keadilan dan rahmat Tuhan. Oleh karena setiap bentuk penindasan dan penghisapan memungkinkan syarat-syarat obyektif, maka hati nurani akan menentang segala bentuk penindasan...” (St. Sularto ed., 2007, 122) dengan demikian sikap *Kompas* mengenai isu-isu ketidakadilan sangatlah tegas. Dalam perkembangannya *Kompas* dianggap sebagai salah satu media terbaik di Indonesia dan dikenal luas sebagai ‘lembaran catatan’ atau *paper of record* negeri ini.

Awalnya *Kompas* dimiliki oleh Yayasan Bentara Rakyat, namun ketika dia menjadi sebuah konglomerasi media yang besar maka status hukumnya berubah menjadi PT Kompas Media Nusantara, di bawah naungan Kelompok Kompas Gramedia, maka ia menjadi koran yang independen dan berorientasi bisnis. Bagaimana pun, *Kompas* tetap memiliki akar katolik meski di ruang medianya para wartawan tidaklah homogen. Bahkan, selama sekian tahun harian tersebut pernah dipimpin oleh seorang pemimpin redaksi Suryopratomo, yang bukan seorang katolik, meski tetap di bawah bayang-bayang salah satu tokoh pendirinya, Jacob

Oetama. Menurut Trias Kuntjahjono, Wakil Pemimpin Redaksi *Kompas*, jumlah wartawan yang non-muslim dan muslim komposisinya 50:50, dan komposisi yang demikian tidak menjadi masalah, sebab ketika merekrut wartawan, kebijakan yang ditempuh adalah bukan melihat latarbelakang agama atau sukunya melainkan karakternya baik atau tidak, dan kedua intelektualitasnya. Agama dijadikan prioritas yang kesekian dan cenderung tidak diperhitungkan.

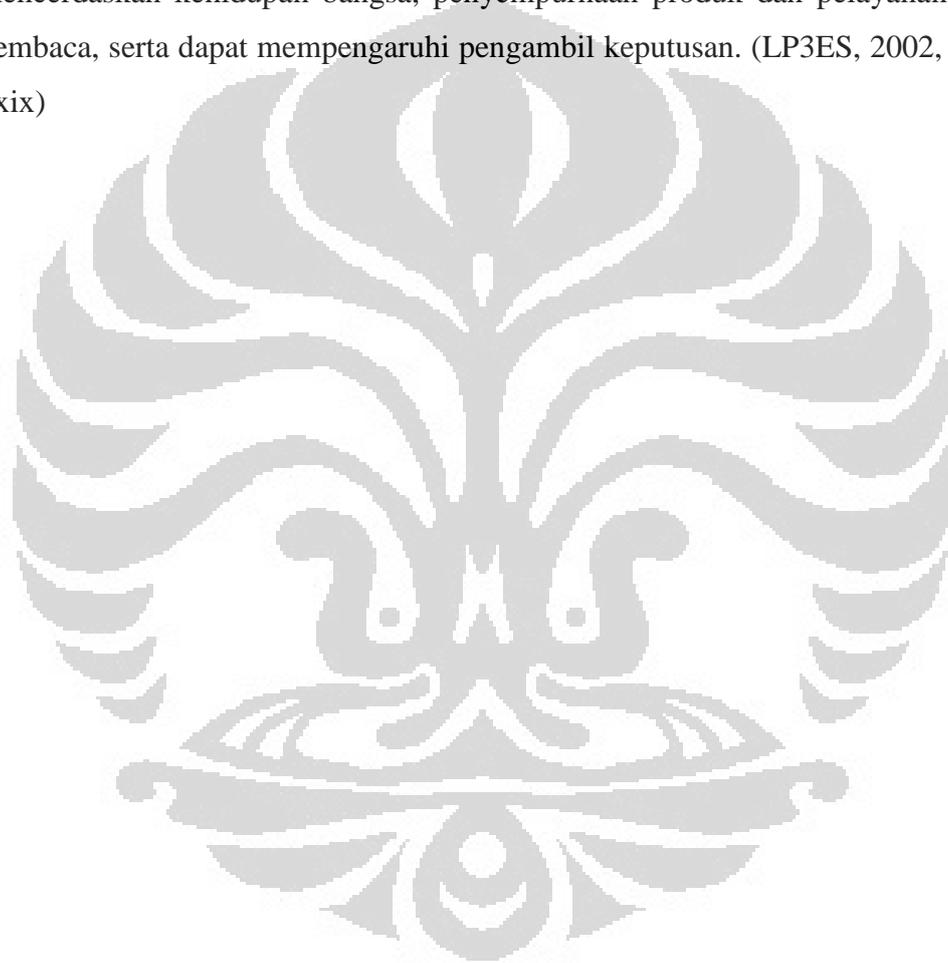
Sebagai harian dengan oplah terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara (lebih dari 500.000 eksemplar per hari, belum lagi pengguna laman internetnya) maka *Kompas* adalah surat kabar yang sangat berpengaruh baik secara politik, ekonomi, dan sosial. (Hill, 2011: 97-101, 209)

2.5.2 Media Indonesia

Media Indonesia adalah surat kabar yang dibeli oleh pengusaha Surya Paloh pada tahun 1989 di bawah bendera PT Surya Persindo, untuk menggantikan surat kabar miliknya terdahulu *Prioritas* dibredel oleh rezim Orde Baru pada tahun 1987. Pada awalnya, Surya Paloh bekerjasama dengan salah satu putra Presiden Soeharto, Bambang Trihatmojo, dan pemiliknya tersebut merupakan salah satu tokoh politik di Golkar yang kemudian berubah menjadi Partai Golkar.

Sebagai koran yang cukup agresif mengembangkan usahanya, kelompok Media Group juga berkembang menjadi kekuatan media yang cukup besar karena memiliki koran-koran daerah sebagai anak-anak perusahaan di berbagai pelosok Indonesia, dan kemudian juga memiliki stasiun televisi berita pertama di Indonesia, *Metro TV* (sejak tahun 2000). Harian ini dikenal dengan pandangannya yang sekuler dan tidak punya latar belakang agama tertentu, namun cukup simpatik dalam memberitakan mengenai perkembangan dunia Islam. (Hill, 2011: 108-116). Mengenai hal ini, Pemimpin Redaksi *Media Indonesia*, Usman Kansong, mengatakan Pancasila adalah ideologi surat kabar yang dipimpinnya, dengan mengedapankan semangat kebangsaan, dan menjunjung empat pilar bangsa yakni Undang Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Komposisi agama di ruang redaksi, 50:50 untuk muslim dan nonmuslim, tidak menjadi masalah karena semua yang menjadi wartawan di

Media Indonesia paham ideologi surat kabar tersebut. *Buku Pegangan Wartawan Harian Media Indonesia* menyebutkan visinya: “Media Indonesia adalah surat kabar pembawa suara rakyat yang berpijak pada asas kebangsaan, independen dan nonpartisan.” Dan senantiasa bertekad menjadi koran referensi yang berkualitas, selalu bersikap kritis dan inovatif, peka terhadap kemajuan teknologi, demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, makmur dan demokratis. Sedangkan misi yang diembannya adalah: menyajikan berita berimbang, obyektif dan akurat, mencerdaskan kehidupan bangsa, penyempurnaan produk dan pelayanan kepada pembaca, serta dapat mempengaruhi pengambil keputusan. (LP3ES, 2002, xxviii – xxix)



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian Kualitatif

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif, yakni suatu jenis penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data berupa (1) wawancara mendalam (*in-depth*) dan terbuka (*open-ended*); (2) pengamatan langsung (*direct observation*); atau pun (3) mempelajari dokumen tertulis. Data dari wawancara berisikan kutipan-kutipan langsung dari para nara sumber mengenai pengalaman mereka, opini mereka, perasaan, atau pun pengetahuan. Sedangkan data hasil pengamatan berisikan rincian deskripsi kegiatan orang-orang, perilaku, aksi, proses interaksi antar manusia atau di dalam organisasi yang semua dapat diamati. Sedangkan kajian atau analisis dokumen mencatat hal-hal yang relevan dengan penelitian dari berbagai alat rekam apakah itu buku, manuskrip, koran, film dan lain sebagainya (Patton, 1990: 10).

Dalam kajian ilmu komunikasi, metode kualitatif banyak digunakan untuk mengadakan penelitian mengenai budaya media (*cultural studies*), khususnya terkait dengan institusi-institusi yang memproduksi simbol-simbol, produk itu sendiri. Metode kualitatif terbukti cukup baik digunakan untuk meneliti mengenai teks, maupun berbagai aspek terkait interaksi antara teks dengan khalayak. Salah satu penekanan utama dalam metode kualitatif adalah penggunaan interpretasi untuk membangun sebuah konstruksi sosial, dengan asumsi bahwa sebagai makhluk sosial realitas adalah produk yang tiada henti. (Lindlof, dalam Nabi dan Oliver, 2009, 53-66). Selain itu penelitian kualitatif juga lebih fokus pada proses interaksi ketimbang variabel, kata kuncinya adalah otentisitas dan bukan reliabilitas, nilai-nilai boleh dihadirkan jadi tidak harus bebas nilai, bisa merupakan analisis tematik, kasusnya boleh kecil dan terbatas, dan peneliti dapat terlibat dalam proses penelitian itu (Neuman, 2006: 13-14).

Penelitian ini merupakan penelitian terapan (*applied research*) yang berupaya menjawab permasalahan tertentu yang berkembang di masyarakat dan tidak dimaksudkan untuk membangun sebuah teori yang baru. Dan penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi kalangan pers dan media di Indonesia, terutama dari sisi tujuan praktisnya memelihara pluralitas dan kebangsaan Indonesia.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan:

1. Analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) dengan meneliti teks (berita-berita) di surat kabar yang diteliti, yakni *Kompas* dan *Media Indonesia*, melalui pemberitaan mereka terkait isu kekerasan atas nama agama, yakni kasus Temanggung. Melalui analisis isi kualitatif ini dicoba untuk diketahui framing apa yang dibuat oleh kedua surat kabar itu dalam upaya membela nilai-nilai kemajemukan di Indonesia.
2. Wawancara dengan para pimpinan kedua surat kabar yang diteliti, dengan pakar pers, dengan pakar politik dalam upaya menggali pandangan-pandangan mereka mengenai proses pemberitaan sampai terbentuknya framing.

3.1.1. Analisis Isi Kualitatif

Analisis isi kualitatif adalah salah satu metode analisis data dalam penelitian kualitatif terhadap isi teks. Isi teks itu dapat berupa kata-kata, makna, foto, lukisan, simbol-simbol, karikatur, audio, video atau pesan apa pun yang dapat dikomunikasikan dan itu dapat ditemukan dalam buku, koran, majalah, film, lirik lagu dll. Dalam penelitian kualitatif, analisis terhadap isi lebih menyelidiki mengenai makna yang terkandung dalam teks dan disesuaikan dengan konteks sosialnya. Sehingga ia bersifat nonreaktif, karena proses penempatan kata-kata, pesan, simbol dalam teks untuk berkomunikasi dengan khalayak sudah ada tanpa ada pengaruh dari peneliti yang mempelajari isinya.

Disini para peneliti pada umumnya meneliti konteks suatu teks mulai dari proses penciptaannya (apa yang menjadi niat atau minat sang pencipta),

distribusinya, maupun penerimaannya. Sehingga teks diperlakukan sebagai sebuah obyek budaya yang di dalamnya mengandung makna sosial. Menurut pendekatan kualitatif, orang berpikir dan bertindak atas dasar makna, termasuk kata-kata dan angka. Karena, dalam penelitian kualitatif dikenal adanya teks analisis yakni sebuah proses dekonstruksi yang menyelidiki beroperasinya teks, proses pembentukannya, bagaimana dia membentuk arti, dan seperti apa makna tersebut. (Neuman, 2006: 323).

Teks sendiri merupakan representasi baik material maupun ideologi. Secara material teks adalah produk dari teknologi atau sebuah tanda yang menjelaskan apa yang diwakilinya, apakah itu benda (obyek) atau gagasan. Namun, dia tidak berdiri sendiri, dari sisi ideologi, teks mewakili sebuah gagasan. Dalam proses komunikasi, khalayak, dalam hal ini pembaca surat kabar berinteraksi dengan teks. Interaksi itu memunculkan gagasan, yang mungkin saja dikehendaki oleh produsen teks itu, tetapi bisa pula secara kritis merupakan hasil olah pikir sang pembaca (Graeme Burton, 2009: halaman 61-63). Dalam penelitian ini, analisis isi kualitatif akan digunakan untuk mengetahui makna yang dikandung dalam teks/pesan yang di-frame oleh kedua surat kabar yang menjadi obyek penelitian.

Sejauh ini berbagai penelitian analisis framing mencoba mengembangkan metode-metode untuk memahami bagaimana dan dimana framing itu terjadi, yang semua tujuannya sama ingin membentuk pendapat umum:

Pengemasan. Meski media menggunakan pbingkaian untuk membentuk opini publik, Semetko dan Valkenburg (2000) menggunakan lima langkah deduktif untuk memperlihatkan lima jenis pbingkaian yang dipakai dalam berita: konflik, human interest, ekonomi, moralitas dan tanggungjawab. Dengan melakukan hal itu, Semetko dan Valkenburg telah mengambil pendekatan deduktif untuk menentukan pbingkaian mana yang dominan. Hasilnya, framing tanggungjawab (*responsibility*) yang paling banyak dipakai, disusul dengan konflik. Dampak ekonomi, human interest, dan moralitas diakui ada, namun lebih jarang dipakai dalam laporan-laporan internasional. Paket

framing tersebut dipakai untuk mengelola gagasan, sehingga media bisa memilih bagaimana cara menyampaikan pesan kepada khalayak.

Episodik dan Tematik. Penelitian oleh Iyengar (1991) mengenai pembingkaihan yang episodik dan tematik mendapati bahwa berita-berita politik biasanya di-frame secara tematik dan episodik. Framing episodik biasanya terkait isu-isu spesifik, sementara berita yang diframe secara tematik pada umumnya menempatkan peristiwa politik dalam konteks yang umum. Sehingga peristiwa luar biasa pada umumnya tidak dikategorikan sebagai berita umum. Misalnya: gempa bumi dan tsunami di Aceh, yang merenggut banyak jiwa dan menimbulkan kerusakan masif. Kejadian-kejadian seperti itu berujung pada framing episodik.

Penempatan dan Ukuran. Bagaimana berbagai topik disajikan, termasuk penempatan artikel dan ukurannya, mempengaruhi topik yang didiskusikan (Ghanem, 1997). Misalnya, ada sebuah artikel sepanjang 2.000 kata mengenai persoalan pariwisata dan ekonomi di halaman utama koran *Times Picayune* membuat masalah tersebut mendapat perhatian. Namun sebuah artikel sepanjang 200 kata mengenai Gubernur Blanco yang menjanjikan akan membangun kembali dan ditempatkan di halaman belakang koran itu mungkin akan kurang pengaruhnya karena penempatan dan ukurannya.

Induktif vs Deduktif. Salah satu pendekatan lain yang dipakai dalam analisis framing adalah induktif yakni mencoba menganalisis berita tanpa apriori bahwa berita-berita itu sudah dibingkai (Gemson 1992; Neuman et al. 1992) dimana frame itu muncul dalam proses analisis. Berbagai studi yang memakai pendekatan induktif ini banyak dikritik karena terlalu bergantung pada sampel yang kecil sehingga sulit untuk mengadakan replikasi (Hertog & McLeod, 2001). Pendekatan lainnya lebih bersifat deduktif dan investigatif, dimana pembingkaihan itu sudah didefinisikan dan dioperasionalkan untuk kemudian diinvestigasi.

Banyaknya metode itu memperlihatkan bahwa sejauh ini tidak ada konsensus bagaimana mengidentifikasi framing dalam pemberitaan, dan berbagai riset memakai definisi yang tentatif mengenai framing itu tergantung

pada studi yang dibuat. Meski demikian para pakar menyarankan penggunaan empat kriteria frame yang harus dipenuhi: *pertama*, sebuah berita yang dibingkai secara konseptual karakter linguistiknya harus dapat diidentifikasi; *kedua*, hal itu harus dapat dilihat sebagai praktek yang wajar dalam dunia jurnalistik; *ketiga*, harus dapat dibedakan antara frame yang satu dari frame yang lain, *keempat*, sebuah frame harus memiliki “validitas” (misalnya dapat dikenali pula oleh orang lain) dan tidak semata bukan isapan jempol atau imajinasi sang peneliti (Cappella & Jamieson, 1997, pp. 47; 89).

Dalam penelitian ini pendekatan deduktif itu yang akan dipakai, dengan menentukan terlebih dahulu komponen yang berkonotasi framing. Hal itu mengacu pada Entman (1993, p.52) bahwa sebaiknya frame dalam berita diteliti dan diidentifikasi melalui “kehadiran atau ketidakhadiran sejumlah kata-kata kunci, kumpulan frasa, gambar-gambar yang stereotip, sumber-sumber informasi dan kalimat yang secara tematis memperkuat kumpulan (cluster) fakta atau penilaian. Sejalan dengan itu Shah et al. (2002, p. 367) menganjurkan untuk memperhatikan “pemilihan bahasa, kutipan, dan informasi relevan”. Gamson dan Modigliani (1989) mengidentifikasi “alat-alat framing” yang memadatkan informasi dan menawarkan suatu “pemaketan oleh media” terhadap sebuah isu. Mereka mengidentifikasi: (1) metafora, (2) contoh-contoh, (3) penggalan frasa, (4) penggambaran, dan (5) gambar visual. Namun yang paling komprehensif dan empiris adalah yang ditawarkan oleh Tankard (2001, p. 101) yang menyarankan 11 daftar mekanisme framing atau *focal points* untuk mengidentifikasi dan mengukur framing berita:

1. Penjudulan (headlines)
2. Anak judul (subheads)
3. Foto-foto
4. Teks foto (*captions*)
5. Lead
6. Pemilihan nara sumber
7. Pemilihan kutipan
8. Pull quotes

9. Logo-logo (kalau ada)
10. Statistik dan gambar infografis (charts)
11. Kalimat dan paragraf penutup (ending).

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan sejumlah kategori tersebut untuk membuat analisis mengenai isi media dengan mengombinasikan berbagai model analisis framing yang telah ada selama ini. Sedangkan proses analisis isi terhadap teks berita, feature dan tajuk rencana menggunakan metode analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*). Pada dasarnya analisis isi kualitatif dapat diterapkan pada berbagai media komunikasi yang terekam seperti transkrip wawancara, rekaman video atau pun audio, dokumen tertulis dll. Yang dianalisis bukan saja material yang nyata (*manifest*) tetapi juga yang tersirat (*latent*). Untuk itu MAYRING (2000a) menawarkan sebuah definisi untuk analisis isi kualitatif:

*an approach of empirical, methodological [sic!] controlled analysis of texts within their context of communication, following content analytical rules and step by step models, without rash quantification" (15). [52]*¹¹

Melalui metodologi ini meski ada kebebasan untuk menganalisis isi teks, tetap ada metode pengendalian secara ketat tahap demi tahap. Dalam setiap proses analisis isi selalu dibuat kategorisasi, dan kategorisasi tersebut haruslah sesuai dengan model komunikasi yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah masing-masing tiga berita dalam bentuk news, feature, dan tajuk rencana di surat kabar *Kompas* dan *Media Indonesia*, dengan kategori yang dianalisis adalah: (1) Penjudulan (*headlines*), (2) Anak judul (*subheads*), (3) Lead, (4) Pemilihan nara sumber, (5) Pemilihan kutipan, (6) Kalimat dan paragraf penutup (*ending*).

¹¹ Kohlbacher, Florian, *Forum Qualitative Social Research*, Volume 7, No.1, Art. 21 – January 2006, "The Use of Qualitative Content Analysis in Case Study Research", <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/75/153>

3.1.2. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang tujuannya adalah mencari tahu apa yang ada di dalam benak maupun yang sudah dinyatakan oleh narasumber, dengan tujuan mendapatkan akses terhadap perspektif narasumber, dan mendapatkan informasi dari hal-hal yang tidak dapat ditangkap selama proses observasi atau pun pengolahan data. Pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan bila melalui analisis framing sudah mulai dapat diketahui kecenderungan masing-masing surat kabar dalam meliput aksi-aksi bernuansa kekerasan.

Metode wawancara tidak menggunakan daftar pertanyaan yang kaku, dan dapat dikembangkan selama masih terkait persoalan yang hendak digali melalui wawancara tersebut. Daftar pertanyaan itu dipersiapkan demi memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan akan diperoleh dari beberapa narasumber. Dalam proses ini pewawancara dapat bebas mengarahkan pertanyaan, menjelaskan atau mencerahkan mengenai suatu subyek tertentu, namun tetap fokus pada pokok persoalan yang telah ditetapkan. Dengan cara ini data yang akan dikumpulkan dapat lebih komprehensif, dan sistematis. (Patton, 1990: 277-290).

Dalam mengumpulkan data melalui wawancara ini, peneliti akan mewawancarai pimpinan redaksi dari kedua surat kabar tersebut, tokoh pers nasional, dan pakar politik/kebudayaan. Dengan mengetahui perspektif mereka terhadap isu kekerasan atas nama agama, diharapkan dapat melengkapi data yang telah diolah dan makin menguatkan kesimpulan apakah memang kedua surat kabar yang diteliti telah melakukan framing secara baik, konsisten, dan komprehensif.

BAB IV

ANALISIS DATA

4.1. Trend Pemberitaan *Kompas* dan *Media Indonesia*

Dalam penelitian ini peliputan yang dianalisis dimulai dari pemberitaan kerusuhan di Temanggung, yang oleh berbagai surat kabar di Indonesia mulai disiarkan sehari setelah kejadian, yakni Rabu, 9 Februari 2011. Dalam penelitian ini, dari harian *Kompas* peneliti menemukan sekurangnya 27 laporan dalam berbagai bentuk penulisan (hardnews, feature/softnews, editorial, artikel opini, foto, infografik) sementara di *Media Indonesia* memuat sekurangnya 39 laporan dalam format yang sama termasuk surat pembaca dan respon dari para pembaca melalui SMS atau pun surat pembaca melalui surat dan e-mail.

TABEL 4.1. Pemberitaan Kasus Rusuh Temanggung 8 Februari 2011 di *Kompas* dan *Media Indonesia*

Jenis Laporan	Kompas		Media Indonesia		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
1. Hardnews	15	56	24	61	39	59
2.Feature/Softnews	3	11	2	5	5	7,6
3. Editorial	1	3,5	1	2,6	2	3
4. Wawancara Khusus	-	-	3	7,7	3	4,6
5. Artikel Opini	7	26	3	7,7	10	15
6. Foto	6*		15*		21*	
7. Infografik	5*		10*		15*	
8.Jajak Pendapat	1	3,5	-		1	1,6
9. Surat Pembaca			6	15,4	6	9,2
TOTAL	27 (38)*	100 %	39 (64)*	100 %	66 (102)*	100%

*) Data mengenai foto dan infografik sengaja tidak dimasukkan dalam hitungan karena mereka tidak berdiri sendiri melainkan bagian dari artikel yang disajikan sebagai ilustrasi maupun informasi yang penting. Kehadiran foto dan infografik penting dalam mendukung framing namun karena jumlahnya besar angka tersebut dapat berpengaruh pada persentase.

Dari data di Tabel 4.1 nampak bahwa meski dari sisi item *Media Indonesia* lebih banyak memuat laporan dibanding *Kompas* dalam peliputan kasus kerusuhan Temanggung, namun secara umum kedua surat kabar memberikan pemberitaan dalam proporsi yang kurang lebih sama dalam hal genre (jenis pemberitaan) yakni hardnews (*Kompas* menyajikan 56%, dan *Media Indonesia* 61%), editorial (*Kompas* 3,5%, dan *Media Indonesia* 2,6%). Perbedaan pendekatan yang signifikan tampak dalam hal feature/softnews (*Kompas* 11%, dan *Media Indonesia* 5%), wawancara khusus (*Kompas* 0%, *Media Indonesia* 7,7%), pemuatan artikel opini (*Kompas* 26%, *Media Indonesia* 7,7%), jajak pendapat (*Kompas* 3,5%, *Media Indonesia* 0%) dan surat pembaca (*Kompas* 0%, *Media Indonesia* 15,4%). *Kompas* mengandalkan para penulis opininya yang umumnya para ahli untuk melontarkan pandangan kritis dan tidak dalam posisi membela Pemerintah menyangkut isu yang tengah disoroti. Demikian pun tokoh-tokoh yang diwawancarai secara khusus oleh *Media Indonesia*, mereka tidak berada dalam posisi mendukung Pemerintah, melainkan kritis terhadap Pemerintah. Hal yang sebenarnya disayangkan adalah sedikitnya feature/softnews ditampilkan dalam upaya mengangkat dan menjelaskan latar belakang maupun konteks kerusuhan yang terjadi di Temanggung tersebut, padahal laporan feature/human interest pada umumnya lebih kuat dan ekspresif dibandingkan dengan kutipan dan ucapan para pakar, pejabat pemerintah atau narasumber lain dalam berita keras (hardnews) hal itu juga tercermin dalam pemilihan narasumber (Tabel 4.2.).

TABEL 4.2. Pemilihan Narasumber dalam Pemberitaan Kasus Rusuh Temanggung 8 Februari 2011 di *Kompas* dan *Media Indonesia*

Narasumber	Kompas		Media Ind		Total	
	N	%	N	%	N	%
Pejabat Negara	9	24,1	15	32	24	29
Pakar	4	11	6	13,8	10	12
Politisi	3	7,6	4	8,5	7	8
Civil Society	4	11	7	14,9	11	13
Pemuka Agama	6	16,5	4	8,5	10	12
Korban	2	5,5	3	6,9	5	6
Pelaku	4	11	3	6,9	7	8
Litbang	3	7,6	--		3	4
Masyarakat Umum	2	5,5	4	8,5	6	8
TOTAL	37	100 %	47	100 %	84	100 %

Data dalam Tabel 4.2 menunjukkan kecenderungan bahwa pejabat pemerintah (presiden, menteri, kapolda, pangdam, bupati, kapolresl dll) masih mendominasi banyak pemberitaan khususnya hardnews di kedua surat kabar (*Kompas* 24,2%, *Media Indonesia* 32%, dan secara keseluruhan mencapai 29%). Sementara menjadikan para korban (dalam hal ini mereka yang secara langsung terdampak aksi kerusuhan) sebagai narasumber jumlahnya sangat kecil (*Kompas* 5,5%, *Media Indonesia* 6,9% dan secara keseluruhan hanya 6%). Biasanya, kisah atau kutipan mengenai para korban itu muncul dalam berbagai feature atau cerita-cerita *human interest*, dan ternyata jumlah feature sangat terbatas dan tampaknya bukan menjadi prioritas dalam kebijakan pemberitaan ketika ingin membuat framing. Demikian pun upaya untuk menggali motif para pelaku kerusuhan misalnya dengan menjadikan mereka narasumber juga sangat terbatas (*Kompas* 11%, *Media Indonesia* 6,9% dan secara keseluruhan 8%) dan pada umumnya bila ada kutipan mengenai para pelaku maka itu bersumber hanya dari pihak pengacara yang memberikan keterangan mewakili para terdakwa pelaku.

Maka pertanyaan mengapa pemberitaan dengan gaya penulisan feature kurang ditampilkan patut dikaji lebih jauh mengingat dalam kasus-kasus tertentu penggambaran dengan sentuhan *human interest* punya dampak yang lebih dramatis mengenai deskripsi peristiwa, sebab dalam feature penggambaran dan penayangan opini tidak begitu kentara, hal itu bisa disamarkan dengan menggunakan contoh-contoh, melukiskan suasana, meminjam pernyataan-pernyataan pihak yang bertanggungjawab. Sifatnya bisa menghibur, mendidik, memberi informasi mengenai aspek kehidupan dengan gaya bervariasi. Feature sendiri selama ini didefinisikan sebagai artikel yang kreatif, kadangkala subyektif, yang terutama dimaksudkan untuk membuat senang dan member informasi kepada pembaca tentang suatu kejadian, keadaan atau aspek kehidupan. Feature disebut kreatif karena wartawannya boleh “menciptakan” sebuah cerita (namun tidak fiktif) berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkannya. Feature juga bisa subyektif karena wartawan juga dapat memasukkan emosinya sendiri. Feature juga bisa informatif, karena dengan gayanya dapatlah ditampilkan aspek-aspek unik dan menarik yang mungkin tidak akan muncul dalam berita. Informasi yang dianggap enteng bisa menjadi suatu alat dan pesan komunikasi yang ampuh di tangan penulis yang hebat karena mampu menggelitik hati sanubari manusia untuk membuat perubahan yang konstruktif. Dan feature bersifat menghibur, karena sebenarnya dia harus menjadi andalan media cetak untuk bersaing dengan media elektronik (Daniel R. Williamson, 1975, halaman 10-16).

Dengan demikian, gaya penulisan feature dapat menjadi penyalur pendapat masyarakat yang baik, karena bila sebuah persoalan ditulis dengan gaya hardnews dapat menimbulkan kemarahan, namun efeknya bisa jauh berbeda bila ditulis dengan gaya feature, atau sebaliknya. Efek itu timbul karena kisah dalam feature ditulis dengan matang dan penuh kehati-hatian, diterima orang dengan argumentatif, pihak yang dikritik/diserang tidak harus menjadi marah tetapi juga tidak dapat mengelak karena ada data di dalamnya. (Umar Nurzain, 1992, hal 19-24).

Bahkan gaya penulisan feature dapat dikembangkan lebih jauh menjadi *interpretative news* yang sifatnya lebih analisis lagi. Karena dalam dunia yang

dikuasai oleh berbagai informasi di internet dengan berbagai *breaking news*, maka kekuatan surat kabar terletak pada analisis dan interpretasinya terhadap berbagai persoalan. Sehingga gaya penulisan berita, apalagi dengan pembuka berupa lead 5W+H mungkin sudah harus mulai ditinggalkan. Artinya, penulisan dengan gaya bertutur dan lebih bermuatan “analisis” kini lebih dibutuhkan dalam dunia informasi yang sangat dikuasai oleh media digital dan media sosial yang sangat mengandalkan kecepatan dan cenderung mengabaikan keakuratan maupun kedalaman. Dalam survey singkat terhadap harian *The New York Times*, Mitchell Stephens, mendapati bahwa laporan mengenai pidato presiden pada pembukaan *joint session* di Kongres (yang merupakan rapat gabungan Senat dan DPR) pada periode President Harry Truman hingga Jimmy Carter didapati bahwa 18 – 37 persen isi laporan terdiri dari kutipan langsung dari pidato-pidato tersebut. Sementara laporan pada peristiwa yang sama di periode Presiden Ronald Reagan hingga Barrack Obama didapati hanya 17 hingga 8 persen kata-kata dikutip dari pidato presiden. (Mitchell Stephens, 2009, hal 15). Dalam penelitian itu tersirat bahwa dalam terminologi berita interpretatif (*interpretative news*) atau berita analisis (*news analysis*) terkandung muatan konteks, informasi latar (*background*) atau memuat apa yang terjadi di belakang layar, berbagai prediksi, bahkan juga menyimpulkan. Jika saja kedua harian itu sengaja membuat framing pemberitaan terkait berbagai kekerasan serta kerusuhan bernuansa agama, menurut hemat peneliti gaya penulisan feature, analisis dan interpretatif sepatutnya diperbanyak guna mendapatkan dampak yang lebih signifikan.

Dalam Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa kecenderungan membuat framing dalam peliputan kasus kerusuhan di Temanggung sangat terasa dari tema-tema yang disajikan *Kompas* dan *Media Indonesia* khususnya selama dua minggu setelah kejadian. Dari data Dalam Tabel 3 tampak jelas bahwa *Kompas* dan *Media Indonesia* sama-sama menilai kerusuhan di Temanggung terjadi karena negara tidak hadir atau enggan bertindak tegas dan represif terhadap massa yang bertindak rusuh, bahkan terkesan tidak berdaya dan enggan menindak.

**TABEL 4.3 Tema Pemberitaan Kasus Rusuh Temanggung
8 Februari 2011 di Kompas dan Media Indonesia**

Ekspresi	Kompas		Media Ind		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Mendesak Pembubaran Ormas	1	3,7	6	15,4	7	10,6
Menentang Pembubaran Ormas	1	3,7	4	10,2	5	7,6
Negara Gagal Lindungi Warga	13	48,2	11	28,2	31	47
Solidaritas	4	14,8	7	18	11	16,7
Netral	8	29,6	11	28,2	19	28,8
TOTAL	27	100 %	39	100 %	66	100 %

Namun, fakta mengenai hal ini tidak banyak digali oleh para wartawan di lapangan, kecenderungannya hanyalah melaporkan bahwa polisi dan tentara membiarkan massa bertindak anarkis. Misalnya saja, dalam persidangan terhadap para terdakwa pelaku kerusuhan Temanggung, sejumlah polisi yang dihadirkan sebagai saksi menuturkan jumlah mereka sangat tidak sebanding dengan ratusan massa yang mengamuk baik di PN Temanggung maupun yang merusak tiga gereja. Misalnya, Marimin Bin Kromo Pawiro, anggota Polri, dalam persidangan bersaksi dia mengamankan Gereja dan Sekolah Kristen Shekinah bersama 10 orang anggota Polri dibantu tiga anggota TNI dan 2 keamanan sekolah. Dalam berkas putusan itu saksi Marimin tercatat mengatakan: “Bahwa pada sekitar pukul 11.00 WIB saat saksi sedang bertugas melakukan pengamanan, tiba-tiba massa datang dari arah barat dan langsung menuju sekolah Shekinah dan mendobrak pintu dan sebagian melempari dengan batu, kayu, paving block, dan saksi serta petugas lainnya berusaha mempertahankan pintu gerbang agar massa tidak masuk ke dalam halaman Sekolah Shekinah, namun karena personil keamanan yang terbatas, akhirnya mundur, kemudian massa berhasil masuk ke dalam dan merusak fasilitas

sekolah dan membakar 6 (enam) unit sepeda motor.”¹² Sebenarnya, Polres Temanggung sudah mengantisipasi akan ada keributan, namun mungkin tidak menduga bahwa massa yang dikerahkan demikian besar, atau tidak ada perintah untuk bertindak represif terhadap massa yang sebenarnya juga mengancam keselamatan nyawa maupun properti milik orang lain. Liputan dalam bentuk feature mengenai peran para anggota Polri ini, juga akan sangat menarik karena dari situ dapat digali apakah mereka memang dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi sebuah era baru yang cenderung anarkis ini, atau perlengkapan apa yang disediakan Polri untuk menghadapi masyarakat yang belakangan ini sangat mudah dihasut untuk mengamuk, atau apakah mereka paham mengenai prinsip-prinsip kebebasan berekspresi versus perlunya negara melindungi warga negara lainnya dst.

Peneliti juga ingin melihat berapa lama dan konsistensi *Kompas* dan *Media Indonesia* dalam meliput kejadian kekerasan di Temanggung tersebut, yakni apakah hanya gencar di pada seminggu pertama, mulai mengendur pada minggu kedua, dan terus mengendur pada minggu ketiga dan akhirnya hilang begitu saja tanpa secara tuntas meliput kejadian yang merupakan konflik bernuansa agama tersebut. Dari data di Tabel 4 nampak bahwa kedua surat kabar gencar memberitakan kerusuhan di Temanggung selama 12 hari pertama sejak kerusuhan meledak pada 8 Februari 2011, yakni antara tanggal 9 Februari 2011 hingga 20 Februari 2011. Gempuran pemberitaan oleh *Kompas*, dengan tema yang diusung pemerintah gagal melindungi warga negaranya atau pemerintah lemah mendapat porsi pemberitaan yang cukup besar pada periode lima hari pertama (9 – 13 Februari 2011) yang mencapai 44,5%, dan pada minggu kedua (14 – 20 Februari) porsi pemberitaan masih cukup tinggi yakni mencapai 40,7%. Hal yang sama juga dilakukan oleh *Media Indonesia*, yakni pada minggu pertama (9 – 13 Februari 2011) porsi pemberitaan kasus Temanggung mencapai 38,4%, sementara pada minggu kedua (14 – 20 September 2011) porsi pemberitaan kasus tersebut mencapai 28%.

¹² Putusan Nomor: 197/Pid.B/2011/PN Smg untuk terdakwa Ahmad Faro'i Bin Arwandi dkk

**TABEL 4.4 Jumlah Pemberitaan Kasus Rusuh Temanggung
8 Februari 2011 di *Kompas* dan *Media Indonesia*
Berdasarkan Periode**

Tanggal	Kompas		Media Indonesia		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
9 – 13 Februari 2011	12	44,5	15	38,4	27	41
14 - 20 Februari 2011	11	40,7	11	28	22	33,3
21 - 28 Februari 2011	2	7,4	7	18	9	13,5
Maret 2011	1	3,7	1	2,6	2	3
April 2011	-	-	1	2,6	1	1,5
Mei 2011	-	-	1	2,6	1	1,5
Juni 2011	1	3,7	2	5,2	3	4,5
Juli 2011	-	-	1	2,6	1	1,5
TOTAL	27	100 %	39	100 %	66	100 %

Artinya, dilihat dari persentasenya, *Kompas* lebih gencar memberitakan kasus tersebut selama hampir dua minggu pertama, dibandingkan dengan *Media Indonesia*, meski tetap harus dikatakan kedua surat kabar tetap sama-sama memandang kasus tersebut penting untuk terus diangkat dengan tema utama pemerintah gagal melindungi warga negaranya. Bahwa pemberitaan kedua surat kabar gencar pada dua minggu pertama sejak kasus itu pecah merupakan hal yang wajar karena mereka juga harus peduli dengan selera pembaca yang mungkin bosan bila kasus itu melulu yang menjadi porsi pemberitaan. Namun sesungguhnya hal itu bisa diatasi bila ada kesadaran bahwa mereka tengah menjalankan sebuah framing dengan tujuan tertentu, sehingga ada perencanaan yang khusus dan baik mengenai format pemberitaannya agar masyarakat pembaca tidak menjadi bosan.

Pada saat-saat pemberitaan terhadap akhir kasus ini, yakni dengan proses pengadilan dan vonis terhadap para terdakwa pelaku kerusuhan, *Media Indonesia* masih merasa perlu memberitakan kasus tersebut dengan dua kali pemberitaan terkait proses persidangan (5,2%) sementara *Kompas* hanya sekali saja (3,7%).

Dan kalau diteliti kembali, *Media Indonesia* menempatkan kedua pemberitaan menyangkut proses persidangan tersebut di rubrik Nusantara (padahal sebelumnya selalu ditempatkan di Rubrik Umum atau Hukum, atau Amuk Massa), sementara *Kompas* menempatkannya dalam kolom Berita Singkat (Kilas Politik dan Hukum), padahal sebelumnya selalu di halaman utama (halaman 1), atau kalau pun di rubrik Politik dan Hukum dia bukanlah sekadar berita singkat atau kilas yang hanya satu atau paling panjang dua paragraf. Artinya dari pola penempatan dan frekuensi pemuatan proses persidangan kasus rusuh Temanggung terlihat inkonsistensi kedua surat kabar dalam membuat framing terhadap kasus kerusuhan Temanggung.

Mengenai pola inkonsistensi dalam penggunaan kategori dalam bentuk rubrik ini, peneliti ingin menggunakan pandangan Murray Edelman yang menyebutkan bahwa kategorisasi merupakan kekuatan yang besar dalam mempengaruhi pikiran dan kesadaran publik, kategorisasi lebih halus dibandingkan dengan propaganda karena ia lebih menyentuh, lebih subtil, dan lebih mengena alam bawah sadar. Pada umumnya khalayak tidak sadar bahwa alam pikirannya dan kesadarannya telah didikte dalam sudut pandang, atau perspektif tertentu, pola pikir tertentu sehingga tidak berpikir pada dimensi lain. (Eriyanto, 2002, halaman 157). Kategorisasi itu kemudian menjadi penting karena ia kemudian mengarahkan akan dibawa kemana sebuah peristiwa dijelaskan kepada khalayak. Mengenai hal ini George Junus Aditjondro pernah mengulas bagaimana semasa rezim Orde Baru berkuasa berbagai media massa (cetak) di Indonesia menempatkan persoalan atau konflik-konflik sosial yang terkait dengan lingkungan hidup dalam rubrik non-lingkungan (misalnya ekonomi, hukum, bahkan kriminalitas) dan bukannya pada rubrik lingkungan. Sementara kalau dalam rubrik lingkungan sendiri persoalan lebih diulas secara teknis dan sama sekali menjauh dari konteks sosial, politik, dan hukumnya. Atau persoalan-persoalan sosial yang bernuansa bahkan konteksnya ekologis “ditenggelamkan” dalam rubrik-rubrik yang non-lingkungan sehingga aspek lingkungan hidupnya hilang. Tujuannya adalah agar aspek politik kasus-kasus tersebut hilang atau tersamarkan sama sekali. (George Junus Aditjondro, 1992, halaman 8-9).

Dengan demikian rubrikasi merupakan aspek dari kategorisasi, khususnya dalam hal pemberitaan rubrikasi menjadi sangat penting karena ia menentukan sebuah kejadian itu akan diklasifikasikan sebagai apa. *Media Indonesia* sebelumnya mengkategorikan kasus kerusuhan Temanggung sebagai rubrik umum dengan klasifikasi amuk massa, maka belakangan ketika sudah sampai pada proses persidangan ia dikategorikan dalam rubrik nusantara. Maka dapatlah diartikan bahwa tingkat kepentingan peristiwa yang pernah diangkat sebagai sebuah masalah nasional, ketika sampai klimaksnya, yakni vonis terhadap para pelaku, dia didegradasi menjadi sebuah peristiwa lokal belaka. Demikian pun *Kompas* ketika semula konsisten memberitakan kasus kerusuhan ini pada halaman muka atau halaman politik/hukum dengan porsi yang cukup, ternyata ketika pada ujungnya hanya menempatkannya pada berita singkat. Peneliti berpandangan persidangan kasus Temanggung, misalnya, akan tetap menarik dan penting untuk disampaikan kepada para pembaca kedua surat kabar itu, apalagi kalau disajikan dalam gaya penulisan feature. Karena terungkap bahwa para terdakwa itu pada umumnya buruh tani, dengan pendidikan rendah, masih satu kampung dengan otak kerusuhan yakni KH Shihabudin. Bahkan mereka juga harus membayar sumbangan untuk dapat pergi bersama-sama dari kampung mereka yang jauhnya beberapa jam dari kota Temanggung dst.

Juga, dalam sudut pandang peneliti, bila pada awal-awal, khususnya dua minggu pertama pasca kerusuhan, tema yang banyak diangkat adalah soal negara yang gagal melindungi warga negaranya, maka pada proses persidangan terungkap bahwa memang aparat kepolisian tidak dibekali atau diperlengkapi secara memadai untuk menghadapi massa yang belakangan ini semakin anarkistis dan tak sungkan mengancam keselamatan nyawa dan harta orang lain, bahkan mengoyak-ngoyak rasa kebersaman dan pluralitas sebagai bangsa. Dan, tentu patut dipertanyakan: mengapa para terdakwa dihukum ringan hanya beberapa bulan dan paling tinggi setahun untuk KH Syihabuddin, apakah hukuman-hukuman ringan tersebut mampu menimbulkan efek jera atau tidak, apakah dalam kasus-kasus kekerasan bernuansa agama seperti ini para hakim mendapat tekanan atau tidak, dst. Dalam kasus pembantaian terhadap tiga anggota jemaah Ahmadiyah di Cikeusik,

Pandeglang, Banten, para pelaku juga hanya dihukum ringan beberapa bulan saja. Pola-pola penghukuman yang ringan seperti ini terhadap para pelaku kekerasan dan tindakan anarkistis atas nama agama patut dipertanyakan oleh media dan bukannya malah dihilangkan atau dikesalkan.

4.2. Kasus Kerusuhan Temanggung: Mengapa Harus Di-frame?

Kasus kerusuhan Temanggung bermula dari tertangkapnya seseorang bernama Antonius Richmond Bawengan, yang mengaku beragama Kristen dengan KTP Jakarta Timur. Dia ditangkap warga pada 23 Oktober 2010 ketika tengah membagikan selebaran yang dinilai menista agama Islam di depan rumah Haji Bambang Suryoko, warga Dusun Kenalan Desa Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah. Oleh warga dan pengurus RT setempat Antonius diserahkan ke Polsek Kranggan dengan tuduhan penistaan agama dan dilengkapi barang bukti berupa sejumlah selebaran. Kasusnya segera dilimpahkan ke Polres Temanggung, dan pada tanggal 21 November 2010 oleh Kejaksaan Negeri Temanggung, berkas pemeriksaan sudah dinyatakan P21 (lengkap). Sidang pertama digelar tanggal 13 Januari 2011 dengan agenda pembacaan dakwaan. Sidang kedua digelar tanggal 20 Januari 2011 dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Sidang ketiga digelar tanggal 27 Januari 2011 dengan agenda pemeriksaan dua orang saksi dan seorang saksi ahli. Sidang keempat digelar tanggal 8 Februari 2011 dengan agenda pembacaan tuntutan.¹³ Sidang sendiri dipercepat menjadi pembacaan vonis, mengingat berbagai laporan media menyebutkan suasana persidangan itu sendiri sudah tidak kondusif sejak awal persidangan dimulai, karena selalu ada massa yang “mengawal” sidang dan mendesak terdakwa dihukum mati. Pada sidang keempat kerusuhan pecah ketika majelis hakim yang diketuai Dwi Dayanto membacakan putusan yang menghukum terdakwa dengan lima tahun penjara. Massa yang telah sejak pagi berada di dalam ruang pengadilan maupun di luar gedung pengadilan marah karena tidak puas mendengar vonis yang hanya lima

¹³ <http://www.sabili.co.id/indonesia-kita/buku-putih-kerusuhan-temanggung>

tahun itu dan berusaha mendekati terdakwa, mereka ingin terdakwa dihukum mati. Terdakwa langsung diamankan, dan kemudian dibawa ke Semarang.¹⁴

Sebagian massa yang marah menyerang dan melempari gedung PN Temanggung, sebagian lagi menyerang dan merusak serta membakar kendaraan perintis Baracuda milik Polres Temanggung karena diyakini terdakwa Antonius Richmond Bawengan berada dalam kendaraan itu. Sebagian massa, sekitar pukul 11.00 kemudian bergerak ke Gereja Bethel Indonesia dan Sekolah Kristen Shekinah di Jalan Soepeno Nomor 11 Demangan, Jampiroso, Kecamatan Temanggung, yang berjarak sekitar 1 km dari pengadilan dan merusak sekolah itu serta membakar properti yang ada di situ. Sebagian massa lainnya, yang berjumlah sekitar 200 orang, pada sekitar pukul 10.30 juga ada yang bergerak ke arah Gereja Pantekosta di Jalan S. Parman Nomor 20A Temanggung dan merusak serta membakar gereja itu, termasuk 3 (tiga) mobil dan 6 (enam) sepeda motor yang ada di situ.¹⁵ Sebagian massa lainnya dari arah PN Temanggung bergerak ke arah Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Temanggung dan melancarkan perusakan di tempat itu.

Terkait dengan massa yang jumlahnya ratusan, bahkan ada yang menyebut sampai seribu itu, sesungguhnya sangat berbeda dengan kenyataan yang terungkap di pengadilan terhadap para terdakwa pelaku kerusuhan, yang umumnya berasal dari Desa Batok dan Desa Sigendong, di Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, yang kalau ditotal dari jumlah kendaraan yang mereka tumpangi tidaklah mencapai angka ratusan. Mengenai hal ini, Uskup Semarang Monsinyur Johannes Pujasumarta mensinyalir amuk massa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, yang antara lain merusak tiga gereja dan satu sekolah Kristen kemungkinan telah disiapkan oleh para pelakunya. Fakta yang dikumpulkannya menyebutkan saat perusuh beraksi sudah ada mobil berisi batu, para pelaku menutup wajah, dan ada orang yang memimpin, serta ada pula pengendara sepeda

¹⁴ *Kompas*, Rabu, 9 Februari 2011, halaman 1.

¹⁵ Putusan No 197/Pid.B/2011/PN.Smg atas terdakwa Ahmad Faro'i Bin Arwandi dkk

motor yang berhenti di jalan depan gereja setempat untuk menunjuk arah kepada massa.¹⁶

Sebagian besar dari terdakwa yang diadili dan divonis oleh PN Semarang mengaku mereka telah tahu akan ada aksi unjuk rasa memprotes vonis yang hanya lima tahun sejak hari-hari sebelumnya, namun sebagian mengaku diajak pada tanggal 7 Februari 2011 malam. Mereka umumnya warga Desa Batok atau pun Desa Sigendong, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung. Mereka umumnya kenal dengan KH Syihabuddin, pengasuh Pondok Pesantren Wonobojo, bahkan sebelum berangkat pada 8 Februari 2011 pagi, mereka makan atau mengambil bekal nasi dan air minum di rumahnya. Waktu tempuh antara desa mereka dengan kota Temanggung sekitar 3 (tiga) jam. Mereka juga mengaku bahwa sesampainya di Kota Temanggung, mereka bergabung dengan massa lain yang sudah terlebih dahulu berada di sana.¹⁷

Dalam persidangan dengan terdakwa Muhaya bin Soli, misalnya, terungkap bahwa terdakwa, dan juga massa, tersulut emosi karena Antonius Richmond Bawengan hanya divonis 5 tahun penjara, dan permintaan massa agar Antonius diserahkan kepada mereka untuk dihakimi dihalang-halangi oleh polisi. Bahkan massa sudah ada yang mempersiapkan kayu untuk menghalang-halangi mobil polisi, termasuk mengumpulkan batu untuk melancarkan pelemparan dan perusakan ke gedung PN Temanggung, itu semua atas perintah dari KH Syihabuddin.¹⁸

KH Syihabuddin sendiri dalam persidangan mengakui bahwa dia mendengar adanya sidang kasus penistaan agama Islam pada Januari 2011 dari para santrinya, berikut 10 buku berisikan penghinaan agama tersebut yang diperoleh di Mushola Al Hadist, maka pada 13 Januari 2011 dia mengikuti sidang pertama pada 13 Januari 2011. Dan sejak itu dia menganjurkan kepada para santrinya untuk dapat hadir pada setiap persidangan karena menurut hukum Islam

¹⁶ <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/02/09/163310-uskup-semarang-kerusuhan-temanggung-kemungkinan-disiapkan>

¹⁷ Putusan No. 198/Pid.B/2011/PN.Smg atas terdakwa Muhaya bin Soli dkk.

¹⁸ Ibid.

bahwa tindakan penistaan agama Islam siapa pun dapat dihukum mati dan sudah halal darahnya. Pada tanggal 20 Januari 2011, atau sidang kedua, dia juga datang dengan membawa massa dan berorasi di depan PN membawa massa di 4 (empat) mobil, dan sesampainya di PN Temanggung dia langsung masuk ke ruang sidang. Di dalam ruang sidang massa sudah berteriak-teriak “Allahu akbar, *pateni wae-pateni wae* (bunuh saja, bunuh saja), bakar Antonius.” Sehingga sidang pun ditunda. Dia juga berorasi “Satu komando, tutup semua pintu.” Setelah majelis hakim memutus Antonius dengan hukuman lima tahun penjara, dia memerintahkan kepada para pengikutnya untuk menutup semua pintu, lalu ada yang keluar gedung untuk menghalangi mobil polisi. Maka mulailah kerusuhan itu menjalar dari PN Temanggung ke ketiga gereja.¹⁹

Padahal, menurut Kapolda Jawa Tengah (ketika itu) Irjen Edward Aritonang, selebaran yang dibagi-bagikan oleh Antonius Richmond Bawengan itu bukan hanya menghina agama Islam, tetapi juga agama Kristen. Hal itu dikuatkan oleh Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang, Romo Aloysius Budi Purnomo, selebaran yang dibagi-bagikan oleh Antonius Richmond Bawengan juga menghina agama Katolik, namun umat katolik tidak ikut mengadakan pelaku ke polisi. Dalam penelusuran peneliti, tidak banyak media yang berusaha mengungkap dengan tuntas siapa Antonius Richmond Bawengan itu, padahal dia telah menimbulkan kehebohan karena memicu kerusuhan di kota Temanggung yang selama ini hubungan antar umat beragamanya baik dan relatif tenang. Namun, bila kasus ini menjadi menonjol tak lain karena ada tiga gereja yang dibakar oleh massa (padahal jemaat ketiga gereja itu sama sekali tidak ada hubungan dengan terdakwa kasus penistaan agama tersebut) dan pengamanan polisi pun sebenarnya sudah ada, namun tampaknya kalah dalam jumlah dibandingkan dengan massa yang terprovokasi. Harian *Republika*,²⁰ adalah salah satu media nasional bernafaskan Islam yang mencoba

¹⁹ Putusan No. 199/Pld.B/2011/PN.Smg putusan sela terhadap terdakwa Syihabuddin bin Sukaeni.

²⁰ <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/02/10/163503-menyingskap-sosok-antonius-richmond-bawengan>

menggali dan mencari tahu siapa itu Antonius Richmond Bawengan, hal yang tidak dilakukan oleh *Kompas* atau pun *Media Indonesia*.

Pembakaran terhadap ketiga gereja itulah yang akhirnya menjadi kasus yang menonjol karena sejumlah hal:

Pertama, belakangan ini Indonesia dihinggapi persoalan besar yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, yakni meningkatnya konservatisme dan pemahaman keagamaan oleh sekelompok tertentu di kalangan umat Islam di Indonesia yang selama ini dikenal toleran dan moderat. Tindakan dan langkah kelompok yang radikal ini kerap mengabaikan pluralitas masyarakat di Indonesia (khususnya dalam kerangka toleransi antar umat beragama) dan kerap mengedepankan kekerasan. Sayangnya kekerasan demi kekerasan itu kerap pula dibiarkan oleh Pemerintah atau aparat keamanan. Maka tak heran tema negara gagal melindungi warga negaranya kerap diangkat oleh para pendukung toleransi antar umat beragama.

Kedua, kerusuhan di Temanggung terjadi hanya sehari setelah penyerangan terhadap rumah jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, yang menewaskan tiga orang. Sehingga sejumlah media massa melancarkan isu bubarkan ormas anarkistis, karena hal itu pula yang diangkat oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ketika menyampaikan pidato pada pembukaan puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Kupang, 9 Februari 2011. Dengan demikian kedua isu itu banyak mewarnai pemberitaan berbagai surat kabar nasional, terutama *Kompas* dan *Media Indonesia*, dan akan diteliti dalam analisis framing berikut.

4.2.1. Framing *Kompas*: Negara Gagal Lindungi Warga: Massa Merusak Gereja di Temanggung

Kerusuhan di Temanggung sudah diketahui oleh sebagian masyarakat melalui tayangan berita di berbagai media online, televisi, maupun radio tak lama setelah kejadian, lengkap dengan berbagai foto atau pun tayangan rekaman peristiwa kerusuhan, yakni pada Selasa (8 Februari, 2011) siang sampai petang. Sehingga, berbagai surat kabar sebenarnya sudah terlambat (basi) kalau memilih kejadian tersebut sebagai berita utamanya tanpa ada unsur analisis atau sudut

pandang tertentu untuk menyikapi kejadian itu. *Kompas* pada Rabu, 9 Februari 2011 muncul dengan berita utama (*headline*) berjudul: “Negara Gagal Lindungi Warga – Massa Merusak Gereja di Temanggung” maka itulah pandangan *Kompas* terhadap peristiwa tersebut. Dan hal itu ditampilkan dalam tiga skema di berita ini, yakni: 1) negara gagal melindungi warganya yang dituturkan dalam bentuk kronologi kerusuhan; 2) negara gagal menindak tegas para perusuh meski aparat Polri dan TNI sudah memprediksi akan ada kerusuhan karena ada undangan untuk berbuat rusuh melalui layanan pesan singkat (SMS) dan bukan sekali ini saja massa bertindak anarkistis dalam proses persidangan Antonius Richmond Bawengan; 3) negara gagal bertindak melindungi warga berdasarkan pandangan dari sejumlah kalangan yang memang dipilih oleh *Kompas*.

Mengenai keputusan bagaimana menyikapi sebuah peristiwa, menurut Wakil Pemimpin Redaksi *Kompas*, Trias Kuntjahjono, diambil pada rapat kedua yang diadakan redaksi, yakni pada rapat sore pukul 16.00, yang dihadiri oleh pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, redaktur pelaksana dan para redaktur. Dalam rapat itu hal-hal yang sudah diputuskan pada rapat pagi ditagih kepada para redaktur apakah sudah terpenuhi atau belum. “Kalau kami menetapkan headline mengenai kelangkaan minyak, misalnya, maka di situ sudah ditetapkan isinya apa, arahnya kemana dan seterusnya. Maka sebenarnya di situ sudah terjadi kesengajaan memilih sebuah obyek secara subyektif, dan itulah framing yang kami buat,” katanya.²¹

Dalam kasus kerusuhan di Temanggung redaksi *Kompas* juga mempelajari apa masalahnya. Misalnya, demikian Trias, di Jawa Tengah pada umumnya soal agama tidak menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat. “Di desa saya di Yogyakarta, kalau ada kenduri oleh seorang warga yang beragama Katolik, maka para tetangga yang bukan Katolik juga hadir dan ikut mengaminkan kenduri tersebut, itu tidak ada masalah. Namun suasana guyub di pedesaan itu makin terkikis ketika muncul kompleks perumahan dan banyak orang luar atau pendatang

²¹ Wawancara Trias Kuntjahjono – Wakil Pemimpin Redaksi Kompas, Bertempat di: Lantai 3 Kantor Redaksi Kompas, Pal Merah Selatan, Jakarta Barat, Kamis, 31 Mei 2012, pukul 14.00 – 15.00

tinggal. Di Temanggung saya rasa situasinya juga demikian, masyarakat di kota itu damai-damai saja dan kerusuhan itu semua dipicu oleh orang luar,” katanya. Dalam menyikapi peristiwa tersebut, lanjutnya, *Kompas* berusaha konsisten yakni dengan bersikap mengutamakan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), kelompok-kelompok anarkistis itu harus ditindak, kalau negara tidak berani menindak mereka, maka boleh dikata kita menuju sebuah negara gagal.²²

Secara keseluruhan dalam berita ini, *Kompas* mengetengahkan sejumlah narasumber, yakni: Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Kapolda Jawa Tengah Irjen Edward Aritonang, Menko Polhukham Djoko Suyanto atas nama presiden, Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang, Romo Aloysius Budi Purnomo, Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Jeirry Sumampouw, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid, Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso, dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Selain kedua pejabat kepolisian itu, pandangan pihak-pihak yang dihubungi *Kompas* semua menilai negara gagal melindungi warga negaranya. Terkait dengan pemilihan narasumber, Trias menjelaskan: “Kalau kami memilih narasumber pada umumnya lebih berorientasi pada kepakaran atau kompetensinya, atau pun orang-orang yang paham persoalan, sehingga mereka yang paham persoalan pasti akan sepaham dengan kami, dan tentu saja orang-orang sengaja dipilih. Dalam kasus-kasus kekerasan atas nama agama, pada umumnya kami mencari narasumber tokoh yang matang dan *mendep* (mengendap), misalnya, Buya Prof. Dr Ahmad Syafii Maarif, yang dulu pernah punya pandangan radikal, namun kini berubah drastis setelah dia paham persoalannya. Atau Prof. Dr Komarudin Hidayat dll. Sedangkan sumber-sumber dari kelompok radikal kami tidak menutup pintu terhadap mereka, namun kalau pun ada porsi buat mereka kecil saja.”

Lead yang dibuat *Kompas* berbunyi:

Setelah terjadi di Cikeusik, Pandeglang, Banten, Minggu (6/2), amuk massa kembali terjadi pada Selasa lalu di Temanggung,

²² Ibid

Jawa Tengah. Ratusan orang mengamuk, membakar, dan merusak tiga gereja serta beberapa kendaraan roda empat dan roda dua. Pada dua peristiwa yang terjadi hanya berselang sehari itu, aparat seperti tidak berdaya menghentikan kekerasan dan kemarahan massa.

Dari paragraph itu jelas dinyatakan bahwa rentetan peristiwa kekerasan bernuansa agama kembali terulang hanya sehari setelah penyerangan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang. Ratusan massa, yang tidak dijelaskan dari kelompok apa, mengamuk dan merusak tiga gereja, dan sejumlah kendaraan mobil dan sepeda motor. Ditegaskan bahwa kesamaan penyerangan di Cikeusik dan amuk massa di Temanggung adalah: aparat seperti tidak berdaya menghentikan amuk massa itu. Maka kalimat yang terakhir itu sebenarnya merupakan kunci dalam paragraph tersebut dan menjadi tema seluruh berita, yakni aparat keamanan tak berdaya, alias negara telah gagal.

Dalam paragraph kedua, berita itu dimulai dengan kalimat: “Sejumlah kalangan pun menilai, negara gagal melindungi warganya.” Namun di situ tidak segera dijelaskan siapa kalangan yang dimaksud tersebut, dan paragraph tersebut maupun paragraph selanjutnya kemudian lebih banyak bertutur mengenai kronologis kerusuhan yang dimulai dari PN Temanggung sampai perusakan ketiga gereja. Dalam penggambaran kerusuhan itu massa seperti tidak ada yang menghadang dan menghalangi ketika mereka membakar mobil polisi maupun merusak ketiga gereja. Meski ada kalimat yang menyebutkan polisi yang jumlahnya ribuan juga tetap berjaga di sejumlah titik seperti PN Temanggung, markas Polres Temanggung dan beberapa gereja lainnya.

Paragraph yang menuturkan penjelasan Kepala Polda Jawa Tengah Irjen Edward Aritonang yang menyatakan telah memeriksa lima saksi, tetapi belum menetapkan sebagai tersangka sebenarnya menegaskan aparat keamanan bertindak reaktif saja. Sementara pernyataan mengenai jawaban atas pertanyaan bahwa massa perusuh sebenarnya sudah tiga kali melancarkan aksi yakni polisi berkonsentrasi mengamankan kota, secara tidak tegas mengatakan ada keterbatasan jumlah polisi.

Di bawah sub judul “Harus tegas” *Kompas* mulai mengutarakan sejumlah kalangan yang dimaksudkan dalam paragraph kedua itu, yakni pihak yang menilai negara gagal melindungi warga negaranya.

Tokoh pertama yang dikutip *Kompas* secara tidak langsung (paraphrase) adalah Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang Romo Aloysius Budi Purnomo yang meminta: pemerintah tegas menindak setiap kekerasan yang dilakukan sekelompok orang dengan mengatasnamakan agama, dan pemerintah jangan membiarkan terlalu lama peristiwa semacam itu terjadi tanpa ada penyelesaian. Di situ tidak dijelaskan penyelesaian seperti apa yang dimaksud. Namun, pemilihan tokoh ini tampaknya disengaja karena ada gereja katolik yang juga ikut menjadi korban penyerangan, yakni Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus, serta mencerminkan latar belakang *Kompas* yang didirikan oleh para tokoh Partai Katolik.

Sedangkan ketika menampilkan pandangan dari Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia PGI, Jeirry Sumampouw, maka bentuknya adalah kutipan langsung (*direct quote*) yang menegaskan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan sering terjadi, berikut kutipannya:

“Masalahnya, kegagalan negara dalam memberikan perlindungan ini sering terjadi,” kata Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia PGI Jeirry Smampouw.

Pemilihan salah seorang pengurus PGI, yang adalah organisasi yang mewadahi gereja-gereja Kristen Protestan tentu didasari pertimbangan bahwa gereja non-katolik yang lebih sering mengalami kejadian persekusi seperti ini, dan kutipan langsung dalam praktek jurnalistik terdapat sejumlah fungsi sebuah kutipan langsung: pertama dia memberi warna dan kredibilitas terhadap laporan yang sedang ditulis, karena kutipan langsung akan langsung menempatkan seolah-olah pembaca berhadapan langsung dengan narasumber itu. Kedua, kutipan langsung menunjukkan bahwa hal-hal yang dikutip tersebut merupakan sesuatu yang penting. Ketiga, kutipan langsung memberikan jeda. Keempat, kutipan langsung mengenai hal yang penting akan sangat bermakna kalau itu disampaikan oleh orang yang penting. (Brian S. Brook, 1980, hal. 107-112). Sehingga harus dicatat

juga, Jeirry Sumampouw bukanlah pucuk pimpinan atau pun pejabat teras di PGI, dia bukan seorang pendeta (tokoh agama/umat) yang cukup dihormati dan disegani, bahkan lebih dikenal sebagai seorang pengamat politik khususnya mengenai isu-isu yang terkait dengan pemilu. Dalam hal ini *Kompas* memilih seorang tokoh lain di PGI yang kurang bukan pimpinan puncak yang *authoritative* untuk berbicara mewakili lembaga PGI yang menaungi lebih dari 200 denominasi (aliran atau sinode) gereja di Indonesia, termasuk GPdI dan GBI. Ada sejumlah tokoh PGI lain yang sangat berkompeten untuk menyatakan pendapat seperti Ketua Umum PGI Pendeta Prof. Dr Andreas Yewangoe atau Sekretaris Umum PGI Pendeta Gomar Gultom, MTh, misalnya.

Ketua Umum GP Ansor, Nusron Wahid, dikutip secara tidak langsung (indirect quotes) mengatakan tindakan membakar rumah ibadah adalah biadab dan jauh dari nilai dan ajaran agama, dan dia meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengevaluasi kinerja Kapolri. Ucapannya bahwa GP Ansor sudah mengerahkan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) juga untuk menggarisbawahi bahwa polisi tidak dapat sendirian mengendalikan situasi. Ada baiknya kalau memang bermaksud mengembangkan pembingkaiannya sebaiknya juga mengontak bukan saja Ketua Umum GP Ansor, Nusron Wahid, melainkan juga Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama, KH Said Aqil Siroj, yang selama ini juga dikenal punya pandangan moderat dan mendukung toleransi antar umat beragama.

Para politisi tidak dikutip secara langsung atau tidak langsung mengatakan sesuatu, mereka hanya “membenarkan” negara gagal mengamankan warganya, dan paragraph itu ditutup dengan kalimat yang sangat tidak menguntungkan Pemerintah:

Pertanyaan tentang kegagalan negara mengamankan warganya juga datang dari Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo dan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Namun, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo menepis tuduhan itu.

Maka framing di sini sangat kuat, karena pandangan dari pihak-pihak yang menuding negara gagal melindungi warga negaranya diberi porsi yang lebih besar dan menonjol yakni mencapai delapan paragraph, sementara Polri yang dinilai

gagal itu hanya diberi porsi dengan sepotong kalimat tersebut, itu pun tidak dijelaskan seperti apa Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo menepis tuduhan bahwa pihaknya telah gagal dalam menjalankan tugas.

Dua paragraph terakhir yang berisi pernyataan Menko Polhukham Djoko Suyanto yang menyampaikan kecaman presiden atas kerusuhan itu dan instruksi agar Polda Jateng segera mencari pelaku tindakan anarkistis tersebut pada akhirnya hanyalah hal yang normatif, karena memperlihatkan posisi Pemerintah yang hanya reaktif dan defensif. Demikian pun pandangan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum agar Polri menyelidiki kemungkinan adanya pihak-pihak yang mendorong adanya kekerasan dan merusak keamanan dan ketertiban publik tak lain adalah mencerminkan pikiran yang konspiratif dari partai pendukung pemerintah, bahwa pihak lain sengaja ingin merusak citra Pemerintah yang dianggap gagal melindungi warga negaranya.

Jelas berita yang dibuat *Kompas* ini memang disengaja mengandung framing “negara gagal melindungi warga negaranya”. Namun kalau untuk membuat pemberitaan lebih berimbang, dan kurang digali dalam pemberitaan itu adalah fakta mengenai berapa jumlah aparat Polri dan TNI (yang diperbantukan) dalam pengamanan proses pembacaan vonis di PN Temanggung tersebut. Di salah satu paragraph ada disebut “ribuan anggota Polri” namun bila mencermati dari fakta yang muncul di persidangan jumlah aparat keamanan hanya dalam ukuran satu atau dua kompi (sekitar 200 – 300 personil), dan tidak disebutkan apa perlengkapan dan persenjataan yang mereka bawa, apakah mereka diperintahkan untuk menindak tegas (menembak dengan peluru karet bahkan peluru tajam, misalnya) para perusuh.

Untuk melengkapi berita tersebut, *Kompas* memasang foto yang menggambarkan para petugas Gereja Pantekosta di Indonesia Temanggung tengah memadamkan api yang menghanguskan beberapa mobil yang diparkir di halaman gereja, juga peta ilustrasi kerusuhan di Temanggung. Caption foto maupun peta ilustrasi itu memudahkan pembaca memahami peristiwa, namun tidak mengandung nuansa framing di situ.

4.2.2. Framing *Kompas*: Kerusuhan – Dalam Kepanikan, Ada Titik Solidaritas

Selain berita utama yang berbentuk hardnews yang telah dianalisis di atas, pada tanggal 9 Februari 2011, juga di halaman 1, *Kompas* membuat sebuah feature berjudul “Kerusuhan – Dalam Kepanikan, Ada Titik Solidaritas”. Dalam pandangan peneliti penempatan sebuah feature dalam satu bingkai dengan berita utama adalah sebuah teknis penyampaian pendapat yang baik karena tidak mungkin menjejalkan begitu banyak fakta dalam satu laporan saja. Selain itu, telah disebutkan sebelumnya bahwa newsfeature memiliki sejumlah hal yang menjadi kekuatannya: sentuhan yang manusiawi (*human interest*) yang kerap kali tidak kalah kuatnya dibandingkan dengan berita keras yang didampinginya; kemudian ada unsur drama yang dapat memukau pembaca karena itu menyangkut perjuangan manusia untuk bertahan hidup; kerap pula ada keganjilan, keanehan atau keluarbiasaan (*oddity*) yang juga menarik perhatian; dan selalu ada efek (*effect*) bagi pembaca. Dalam naskah sepanjang 850 kata ini tema yang diusung adalah solidaritas dari warga dari lingkungan di seputar ketiga gereja yang menjadi sasaran amuk massa (diperkirakan mereka kebanyakan berasal dari luar kota Temanggung).

Menurut Trias Kuntjahjono, *Kompas* memang memiliki kebijakan khusus terkait feature: “Kami melihat feature adalah hal yang penting dan kalau dalam sebuah proses pemberitaan kami menyertakan feature selain hardnews maka itu semua sudah dirancang. Misalnya, bila menjelang hari raya Natal atau Lebaran selalu dirancang tulisan-tulisan yang mencerminkan semangat gotong royong, dimana masyarakat tanpa memandang latarbelakang agama bahu membahu dan bekerjasama atau bersilaturahmi, kisah-kisah itu sebenarnya klise tetapi harus muncul. Sehingga dalam kasus kerusuhan di Temanggung pun para wartawan kami yang ada di lapangan memahami hal itu, sehingga mereka juga menulis laporan feature dari lapangan.” Sehingga, menurut dia, paham atau tidak wartawan

Kompas mengenai konsep jurnalisme damai, para wartawannya semua paham mengenai filosofi *Kompas* sehingga mereka akan membuat feature dengan *angle* sesuai dengan filosofi itu. Dan ketrampilan menulis feature merupakan kemampuan dasar semua wartawan *Kompas*, baik yang ada di Jakarta maupun di daerah-daerah, semua dilatih dengan kemampuan dasar jurnalistik yang sama, dan terutama pemahaman terhadap filosofi dan sudut pandang *Kompas*. Tapi dia mengakui dalam perkembangannya, mungkin yang di Jakarta kompetensinya lebih ketimbang mereka yang ada di daerah.

Judul untuk feature ini “Kerusuhan - Dalam Kepanikan, Ada Titik Solidaritas” cukup kuat dan menarik, karena sebelum membaca tulisan itu, kita sudah dapat menerka bahwa isinya bertutur mengenai solidaritas para warga menghadapi situasi panik yang ditimbulkan oleh amuk massa. Jelas bahwa kerusuhan, perusakan, dan pembakaran itu menimbulkan kepanikan, terutama bagi pihak yang dijadikan sasaran amuk massa. Dalam hal ini para “korban” amuk massa adalah mereka yang ada di PN Temanggung, mereka yang berada di GPDI Temanggung, GBI dan sekolah Shekinah, maupun Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus. Judul feature ini sama sekali tidak mengandung unsur framing dan sebuah judul yang kuat. Ada sejumlah skema yang ingin ditampilkan dalam feature ini. Pertama, ada solidaritas warga meski mereka berbeda agama, sehingga para pelaku adalah orang luar. Kedua, warga kota Temanggung, menyesalkan kerusuhan yang mengoyak-ngoyak ketenangan di kota mereka oleh pihak luar. Ketiga, berada di dekat polisi atau kehadiran aparat keamanan pun tidak menjamin akan aman dan bebas dari serangan kaum perusuh. Keempat, ada ormas Islam mendukung toleransi antar umat beragama.

Feature ini menghadirkan sejumlah sumber yang pada umumnya adalah para korban dan warga yang menyesalkan aksi rusuh itu. Mereka adalah: Andrea M. Asa (pengurus GPDI), Penjol (Ketua RT 03/RW 04, Kampung Butuh), Muhamad Yatno (Ketua RW 04, Kampung Butuh), Sony Zebulon (petugas di Gereja Bethel Indonesia Shekinah), Sulaiman (Sekretaris Kantor Paroki Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus), Hari (tukang ojek sepeda motor yang biasa

mangkal di Kaloran), Daryono (warga Temanggung), Ahmad Majidun (Wakil Ketua Gerakan Pemuda Ansor Wilayah Jawa Tengah), dan Bupati Temanggung Hasyim Afandi. Para narasumber itu tidak ada yang mengecam aparat keamanan yang gagal melindungi warga, namun mereka lebih menunjukkan solidaritas dan rasa persaudaraan sesama umat manusia dan warga negara.

Sebagai lead dalam feature ini adalah deskripsi mengenai bangkai tiga mobil yang teronggok di garasi halaman Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan S. Parman, Temanggung. Mobil-mobil itu dibakar oleh massa yang marah karena hakim hanya memvonis Antonius Richmond Bawengan dengan lima tahun penjara. Pemilihan lead dengan deskripsi tentang tiga bangkai mobil itu bukan tanpa alasan, karena GPdI adalah gereja yang paling besar kerugiannya, dan di situ nyaris jatuh korban jiwa yakni mereka yang menjadi penghuni di rumah yang berada di bagian belakang kompleks gereja.

Pada paragraph kedua dituliskan bahwa kompleks GPdI sebenarnya juga dijaga oleh sejumlah anggota Polri dan TNI (dari Koramil setempat) namun meski tidak digambarkan, mereka tampaknya tidak berdaya atau tidak berbuat sesuatu untuk menghalau massa yang memang jumlahnya jauh lebih banyak. Juga digambarkan bahwa ketika api membakar tiga mobil dan kompleks gereja (yang tidak punya pintu keluar di belakang gereja karena langsung berbatasan dengan sungai kecil) dan para pekerja mau pun penghuni rumah sudah putus asa, datang bantuan dari warga di belakang gereja yang dengan memasang tangga dari tembok belakang mengevakuasi orang-orang yang terjebak api itu. Walhasil mereka selamat.

Paragraph selanjutnya merupakan bagian terkuat dari feature ini yang mengutip Penjol, Ketua RT 03/RW IV, Kampung Butuh, yang satu lingkungan dengan GPdI Temanggung:

Ketua RT 03 RW IV Kampung Butuh, Penjol, mengatakan, saat mengetahui gereja tersebut dibakar, warga spontan membantu evakuasi orang-orang dari kompleks gereja itu. “Kami hanya ingin menyelamatkan supaya mereka tidak menjadi korban jiwa. Mereka selama ini hidup rukun dengan warga di sini,” ujar Penjol.

Ketua RW IV Kampung Butuh Muh Yatno menambahkan, pengelola gereja aktif dalam pertemuan dengan warga pada tanggal 18 setiap bulan. Kalau ada arisan kampung, warga pengelola gereja juga hadir. Sebaliknya, warga kampung juga hadir apabila pertemuan giliran berupa arisan warga RT 03, bertempat di rumah Andrea M Asa.

Kedua paragraph itu secara tidak langsung menjelaskan dengan sangat kuat bahwa tidak ada persoalan antara penghuni gereja dengan warga kampung yang bisa dipastikan sebagian besar memeluk agama Islam, mereka hidup dengan rukun sebagai sesama warga. Dan paragraph-paragraph selanjutnya juga menggambarkan kerukunan antar warga yang tidak memandang perbedaan agama.

Deskripsi mengenai kerukunan antar warga dengan pengurus GBI dan sekolah Shekinah dan Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus juga dimunculkan, khususnya ketika warga bersama-sama ikut memadamkan api yang membakar kedua gereja tersebut. Ada kutipan yang berasal dari salah seorang warga yang berkumpul di depan Sekolah Kristen Shekinah dan ikut membantu memadamkan api:

Sejumlah warga yang berkumpul di depan Sekolah Kristen Shekinah menyesalkan perusakan rumah ibadah dan sekolah itu. Kejadian itu juga menyebabkan warga tidak nyaman. “Masyarakat Temanggung cinta damai. Kalau ada aksi-aksi massa yang merusak, pasti dilakukan pihak dari luar,” ujar Daryono, warga Temanggung.

Kutipan itu menegaskan bahwa pelaku memang bukan warga dari sekitar lingkungan gereja, karena mereka tidak merasa ada persoalan atau gangguan dengan kehadiran gereja, dan perusuh diyakini berasal dari luar kota Temanggung.

Ada paragraph lain yang menyatakan bahwa berada di dekat markas polisi pun tidak berarti akan aman dan luput dari amuk massa, sebab itulah yang terjadi dan dialami oleh Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus:

Pengurus Gereja Santo Petrus dan Paulus juga khawatir ada amuk massa. Oleh karena itu, meski gereja bersebelahan dengan

Markas Polres Temanggung, pada Senin lalu pengurus gereja tetap meminta bantuan pengamanan kepada polisi.

Oleh karena itu, Sulaiman, Sekretaris Kantor Paroki, mengatakan, ia tidak menyangka jika gerejanya juga ikut diserang. Waktu massa masuk ke gereja, ia dan dua temannya berlindung di kamar mandi.

Sedangkan Romo Sadana yang berada di gereja berhadapan dengan massa yang merusak gereja. "Kacamata Romo pecah," ujarnya.

Jadi, kalau *Kompas* sengaja ingin menampilkan pembingkai bahwa negara gagal melindungi warga negaranya, bagian ini akan sangat baik bila mendapatkan penonjolan misalnya ditempatkan di bawah satu subjudul yang menggelitik dan bukan dibiarkan begitu saja sama seperti paragraph-paragraph lainnya tanpa upaya penonjolan. Penempatan kedua paragraph seperti itu terkesan melemahkan upaya mendukung upaya framing dan penyampaian pesan tersebut.

Penggambaran bahwa tidak semua umat Islam bersikap antitoleransi dibingkai dalam pernyataan Wakil Ketua Gerakan Pemuda Anzor Wilayah Jateng, Ahmad Majidun yang menyesalkan kejadian itu, lalu meminta jajaran GP Anzor, yang berada di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama tersebut, untuk membantu gereja-gereja di Temanggung yang menjadi korban kerusuhan:

Wakil Ketua Gerakan Pemuda Anzor Wilayah Jateng Ahmad Majidun juga menyesalkan terjadinya aksi rusuh oleh sekelompok orang tersebut. Untuk itu, pihaknya meminta agar jajaran GP Anzor turut mencegah terulangnya peristiwa perusakan rumah ibadah dan fasilitas publik, dengan alasan apa pun.

Oleh karena itu, sebagai solidaritas sesama umat beragama, Rabu ini puluhan anggota Barisan Anzor Serbaguna (Banser) siap membantu membersihkan puing-puing akibat kerusakan di sejumlah gereja di Temanggung. Aksi ini adalah hasil koordinasi pengurus GP Anzor Jateng dengan jajaran pengurus GP Anzor se-wilayah Kedu.

Sudah menjadi pola bahwa dalam berbagai kerusuhan bernuansa agama (khususnya bila itu menyangkut unsur-unsur Islam dan Kristen dan pada umumnya umat Kristiani yang menjadi korban) maka GP Ansor muncul sebagai pihak dari kalangan Islam yang membela umat Kristiani atau kelompok yang menjadi korban tersebut. Dalam analisis peneliti memunculkan peran GP Ansor dalam berbagai kasus kekerasan bernuansa agama mempunyai sejumlah alasan:

1. Untuk menunjukkan bahwa meski ada umat Islam yang antitoleransi dan radikal, namun pada kutub lain ada kelompok umat Islam yang toleran dan siap melindungi kaum minoritas yang lemah dan selalu luput dari perlindungan negara.
2. Meski GP Ansor dengan Banser-nya juga merupakan kelompok ormas Islam yang masuk kategori “paramiliter” namun wajahnya adalah penuh kemanusiaan, tidak beringas, dan bermanfaat bagi orang banyak.

Menurut peneliti, ada baiknya kelompok-kelompok ormas Islam lainnya yang punya karakter seperti GP Ansor dengan Banser-nya namun selama ini kurang didekati dan diekspos oleh media juga dimunculkan. Sehingga, kalau ingin membuat framing bahwa ada banyak ormas Islam lain yang toleran dan tidak radikal, *Kompas* dapat berusaha menghubungi dan menggali mereka dan ditampilkan dalam berbagai bentuk pemberitaan sehingga tidak terkesan hanya GP Ansor saja yang berkarakter seperti itu. Kedua paragraph yang menyebutkan peran GP Ansor itu sebenarnya juga merupakan paragraph-paragraph yang kuat dan sangat sayang kalau dibiarkan berbaur dengan paragraph lainnya tanpa diberi penekanan berupa sub judul tertentu yang atraktif.

Feature yang cukup mengandung nilai-nilai kemanusiaan, dramatis, unik dan berusaha menimbulkan efek kepada para pembaca itu ada baiknya diakhiri dengan penutup (*ending*) yang kuat. Dalam dunia jurnalistik, penutup sebuah feature kerap disebut sebagai *punchline* (paragraph yang memberi “pukulan atau hantaman”) yang dimaksudkan adalah agar feature tidak diakhiri dengan sesuatu yang datar-datar saja melainkan berkesan dan diingat lama oleh pembaca. Di dalam analisis framing pun bagian ending sebuah teks merupakan bagian yang

penting karena sebenarnya di situlah pula elemen framing biasa ditempatkan (Tankard, 2001, hal. 101). Berikut paragraph penutup dalam feature ini:

Bupati Temanggung Hasyim Afandi mengimbau warga agar tenang serta tidak terpancing isu-isu yang memprovokasi dan merusak ketenangan kehidupan warga Temanggung. Ya, semoga kota Temanggung yang nyaman ini segera kembali sejuk dan kondusif.

Peneliti berpendapat ending dalam feature ini cenderung normative dan oleh wartawan yang menuliskan kurang dimanfaatkan sebagai bagian terpilih untuk menekankan gagasan utama, sehingga ending ini tidak mendukung upaya framing yang dibuat dalam berita utama “Negara Gagal Lindungi Warga – Massa Merusak Gereja di Temanggung”. Untuk memperkuat feature ini pada bagian sambungan yang berada di halaman 15 disertakan pula foto yang menggambarkan anggota Polri berjaga di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, Temanggung, dengan keterangan situasi keamanan berangsur membaik.

Jadi, sebagai sebuah laporan untuk melengkapi berita utama, feature berjudul “Kerusuhan – Dalam Kepanikan, Ada Titik Solidaritas” sudah cukup membantu menyampaikan aspek yang lain dalam kerusuhan yang terjadi di Temanggung itu, yakni rasa persaudaraan sesama umat manusia dan warga negara Indonesia. Namun sebagai sebuah teks yang mendukung upaya framing yang ingin ditampilkan oleh *Kompas*, feature ini sepertinya tidak dirancang untuk menampilkan pembedaan-pembedaan tersebut dalam detail penulisannya, dan menurut hemat peneliti hal itu sangat disayangkan karena ada elemen-elemen yang sangat kuat untuk maksud tersebut dan hal itu tidaklah diperhatikan.

4.2.3 Framing *Kompas*: Tajuk Rencana – Kegagalan Dalam Hidup Bernegara

Pada tanggal 9 Februari 2011, sehari pasca kerusuhan di Temanggung, *Kompas* menurunkan tiga naskah, yakni satu berita utama di halaman 1 berupa headline disertai foto dan grafik, satu newsfeature juga di halaman satu disertai foto pada sambungan di halaman 15, dan yang terakhir adalah tajuk rencana di halaman 6. Bahasan analisis framing mengenai berita dan feature sudah diulas,

maka pada bagian ini akan dianalisis mengenai bagaimana tajuk rencana itu ditulis, karena selama periode peliputan kejadian terkait dengan peristiwa rusuh di Temanggung hanya ada satu tajuk rencana yang dibuat.

Pada hakekatnya, editorial atau tajuk rencana merupakan bagian yang penting di surat kabar atau majalah karena di situlah dapat dibaca sikap dan pandangan pengelola media tersebut terhadap sebuah isu atau kejadian. Penulis editorial di sebuah surat kabar bukan orang sembarangan, dan pada umumnya adalah para wartawan senior yang ada di media itu bisa pemimpin umum, pemimpin redaksi, redaktur pelaksana atau wartawan senior yang memang paham ideologi media tersebut. Salah satu tujuan editorial adalah mengajak para pembaca untuk berpikir seperti yang tertulis dalam editorial itu, atau merupakan bagian untuk mempengaruhi pendapat umum, menyampaikan pandangan yang kritis. Atau mengajak pembaca untuk melancarkan sebuah aksi. Pada umumnya tajuk rencana ditempatkan di halaman opini, dimana di situ juga dimuat berbagai artikel dari para penulis luar atau pun wartawan sendiri, juga surat pembaca. Tajuk rencana sendiri dapat dikategorikan dalam empat jenis: *pertama*, menjelaskan atau menginterpretasikan sebuah persoalan yang peka atau kontroversial; *kedua*, mengkritik kebijakan, tindakan, keputusan, suatu situasi atau keadaan, dan sepatutnya kritik itu bersifat membangun dengan tujuan mengajak para pembaca memahami persoalan tanpa harus mencoba mencarinya; *ketiga*, membujuk para pembaca agar setuju dengan solusi yang ditawarkan; *keempat*, menyampaikan pujian untuk sesuatu yang sepatutnya dipuji.

Terkait dengan kerusuhan di Temanggung, *Kompas* memuat tajuk rencana berjudul “Kegalauan Hidup Bernegara”. Kata galau adalah sebuah kata sifat yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pikiran yang kacau atau kekacauan berpikir sehingga kegalauan menunjukkan perasaan dan pikiran yang kacau atau bingung yang mengarah pada kecemasan. Sehingga judul di atas dapat dimaknai bahwa kehidupan bernegara di Indonesia pada saat ini diwarnai atau dipenuhi dengan suasana cemas atau kacau atau tidak pasti. Meski dalam judul itu tidak disebutkan apa persoalannya, namun siapa pun yang merupakan pembaca *Kompas* dapat segera menangkap bahwa yang dimaksud adalah kasus kerusuhan di

Temanggung dimana ada tiga gereja yang dibakar dan dirusak massa yang mengamuk.

Untuk mengawali tajuk rencana ini, leadnya adalah pernyataan mengenai kesesakan hati para pengelola di *Kompas* bahwa belum selesai kasus Cikeusik pada keesokan harinya pecah kerusuhan di Temanggung.

Ibaratnya, belum usai sesak di dada merasakan insiden bentrok Cikeusik, Selasa (8/2) lalu kita mendengar aksi kerusuhan di Temanggung.

Maka pernyataan itu dapat dibaca bahwa kasus demi kasus kekerasan bernuansa agama, yang diperkirakan pelakunya juga orang-orang dari kelompok yang sealiran sudah membuat dada sesak, dan dada yang sesak itu artinya suatu waktu juga bisa meledak. Jadi dia ingin menyatakan sudah terlalu banyak kekerasan itu, seperti tidak ada habisnya. Dan lead tersebut disusul dengan paragraph kedua yang menguatkan “sesak dada” tersebut:

Tanpa bermaksud mendahului, tebersit juga pertanyaan, "Mana lagi besok?" Kalau itu tendensinya, sulit juga bagi kita untuk menampik tesis "negara gagal" untuk Indonesia. Seperti kita baca dalam analisis Yudi Latif di harian ini Selasa lalu, salah satu ciri negara gagal-selain problem akut tak tertanggulangi di bidang ekonomi-adalah kemerosotan sosial dan politik.

Jelas paragraph kedua menguatkan pernyataan pertama bahwa rentetan kekerasan demi kekerasan atas nama agama tersebut menegaskan tesis “Indonesia negara gagal” yang salah satu cirinya adalah kemerosotan sosial dan politik. Sesungguhnya, apakah yang dimaksud dengan negara gagal (*failed states*) itu?

Menurut Robert Rotberg dalam papernya, *Nation State Failure: A Recuring Phenomenon*, ada empat kategori negara-negara, yaitu negara kuat (*strong states*), negara lemah (*weak states*), negara gagal (*failed states*), dan negara runtuh (*collaped states*). Negara kuat adalah negara yang dapat mengontrol teritorial dan penduduk mereka, yang dicirikan GDP tinggi. Negara lemah dicirikan bercirikan

perbedaan etnis, religi, atau bahasa yang menjadi hambatan untuk menjadi negara kuat. Konflik biasanya terjadi secara terbuka, dan korupsi menjadi hal umum. Hukum tidak ditegakkan dan privatisasi institusi kesehatan dan pendidikan menjadi bukti nyata kegagalan negara tersebut. Contohnya Belarus, Korea Utara dll. Sedangkan negara gagal (*failed states*) adalah negara yang sangat sukar mencapai target memenuhi kebutuhan penduduk. Umumnya terdapat *non-state actors* yang berpengaruh dan membantu memenuhi kebutuhan hidup penduduk. Keamanan nyaris tidak ada selain di kota-kota besar. Ekonomi tak berjalan, kualitas kesehatan buruk dan system pendidikan terabaikan. Korupsi marak, dan diperparah oleh inflasi. Negara dalam situasi paling fatal, adalah negara runtuh (*collapsed state*), yakni negara dengan situasi tak ada pemerintahan sama sekali. (Effendi Siradjuddin, 2009: halaman 5-7)

Menurut Noam Chomsky (2006) tiga ciri pokok negara gagal adalah: (1) ketidakmampuan negara melindungi penduduk dari kekerasan, penyerangan atau pengrusakan; (2) kecenderungan mengabaikan diri terhadap jangkauan hukum, baik domestik maupun hukum internasional; (3) jika mempunyai bentuk demokrasi, mereka menderita semacam defisit yang parah dalam berdemokrasi. Sedangkan menurut Stoddart sebuah negara bangsa dianggap gagal jika tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan baik. Negara gagal terjadi karena kepemimpinan dan institusi negara sangat lemah sehingga tak mampu atau tak lagi mempunyai kekuatan mengatur dan mengontrol negara (Siradjuddin, 2009). Jadi, bila mengacu pada kategori dan ciri-ciri yang dikemukakan para ahli, memang sulit untuk menampik Indonesia menuju negara gagal, ketika pembiaran demi pembiaran aksi kekerasan atas nama agama terus terjadi, di saat aparat keamanan enggan bertindak kalau itu menyangkut sesuatu kekerasan yang terkait agama Islam atau ormas Islam tertentu. *Kompas* dengan jeli memakai konsep tersebut guna menjelaskan apa yang terjadi di Indonesia.

Pada paragraph ketiga, *Kompas* mencoba membandingkan apa beda negara gagal dengan negara sukses:

Di negara yang sukses bukannya tidak ada aksi kekerasan atau bentrok sosial dan kesulitan ekonomi. Namun, manakala terjadi krisis,

sosok negara serta-merta hadir, sigap menyelesaikan persoalan. Terlebih lagi, insiden-insiden yang menyimbolkan pembangkangan terhadap konstitusi atau kewibawaan negara umumnya jarang terjadi. Penjelasan nya adalah karena negara, pemerintahan, bersosok. Ada karisma, ada kewibawaan yang membuat para calon pembangkang gentar sebelum menjalankan aksi.

Di negara sukses kekerasan dan konflik sosial mungkin saja terjadi, namun yang membedakannya adalah sosok negara segera hadir dan bertindak, apalagi kepada mereka yang menentang konstitusi. Sehingga *Kompas* mempertanyakan dimana wibawa pemerintah sehingga kelompok-kelompok anarkistis itu tidak gentar, bahkan jumawa dan berani terang-terangan menantang pemerintah. Dan memang dalam kasus penyerangan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, polisi juga hadir namun jumlahnya terbatas dan tampaknya mereka tidak siap menghadapi massa yang jumlahnya ratusan. Sementara di Temanggung, jumlah polisi dan tentara mungkin juga ratusan, karena mereka sudah mengantisipasi bakal terjadi kerusuhan, namun sepertinya tidak ada perintah untuk bertindak tegas seperti melepaskan peluru karet atau tindak represif lainnya. Dalam situasi seperti ini, bila aparat keamanan tidak berani bertindak, atau tidak ada pemimpin di lapangan yang berani bertanggungjawab, atau kalau ada korban di kalangan perusuh yang dipersalahkan hanya petugas di lapangan dan bukan penanggungjawab operasi maka keamanan dan perlindungan warga negara tidak akan pernah ditegakkan.

Pernyataan kuat terdapat di paragraph empat, dan kalimat pertama pada paragraph lima:

Kita mendorong dijunjung dan dihormatinya ajaran agama, tetapi kita juga berkepentingan menegakkan konstitusi guna memelihara keselarasan hidup bersama dan melindungi hak-hak setiap warga negara.

Tampak pada elemen kedua di atas kita masih kedodoran. . . .

Bila pemerintah dianggap sudah tidak mampu menegakkan konstitusi maka sebenarnya negara sudah berada di ambang keruntuhan, karena dalam konstitusi itulah diatur tujuan-tujuan bersama bangsa Indonesia membentuk sebuah negara, dan dalam konstitusi itulah negar diberi hak untuk bertindak represif berdasarkan hukum demi mencapai tujuan-tujuan negara. Jadi, meski kalimat pada paragraph

tersebut terkesan halus, namun sesungguhnya maknanya sangat dalam yakni pemerintah sekarang gagal menegakkan konstitusi.

Pada paragraph tujuh, *Kompas* juga kembali mempertanyakan komitmen Pemerintah pada Pancasila:

Patut kita camkan kembali bahwa Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, di mana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi satu ciri utama, dan konstitusinya menjamin hak keselamatan warga negara dan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tragis dan ironis apabila praktik yang bertentangan dengan dasar negara dan konstitusi dibiarkan marak tak terkendali.

Penggunaan kata “tragis” dan “ironis” mencerminkan sesuatu yang dikotomis, yakni sesuatu yang seharusnya sangat mungkin tapi dibuat tidak mungkin, sesuatu yang harusnya bisa baik-baik saja ternyata dibiarkan berujung bencana dst. Artinya, seharusnya Pemerintah mampu menjaga dan melindungi warga negaranya dalam menjalankan ibadah agama masing-masing, namun pada prakteknya malah dibiarkan ditindas dan dianiaya oleh kelompok-kelompok yang anarkistis. Sehingga prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sama sekali diabaikan oleh Pemerintah.

Tajuk rencana ini ditutup dengan sebuah pernyataan langkah yang harus diambil Pemerintah untuk membuktikan bahwa mereka tidak gagal mengelola negara ini:

Salah satu jawaban untuk menangkal persepsi "negara tidak hadir", atau bahkan "negara gagal", adalah membuktikan sebaliknya dan sekarang juga saatnya.

Kompas meminta Pemerintah membuktikan bahwa ia memang hadir dan melindungi warga negaranya dari aksi-aksi anarkistis tersebut supaya tidak disebut sebagai negara gagal. Jadi, *ending* yang dibuat *Kompas* dalam tajuk rencana ini adalah sebuah *punchline* atau sebuah *ending* yang tidak biasa-biasa saja, berisikan sebuah pesan yang kuat dan pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak yang akhirnya membuktikan bahwa Pemerintah gagal mengelola negara ini.

Dengan demikian dari tajuk rencana yang dibuat *Kompas* pada 9 Februari 2011 dapatlah disimpulkan:

- 1) *Kompas* meski dengan cara yang tidak kasar namun dengan sangat kuat menegaskan sikap kesalnya kepada Pemerintah, dan itu dibuat dalam sebuah framing yang mengetengahkan apa itu konsep mengenai negara gagal, dan memperlihatkan bahwa Pemerintah memang sedang memenuhi ramalan (*prophecy*) bahwa ia tidak berdaya dan tidak berani bertindak. Dan pandangan itu tercermin seluruhnya dalam teks di tajuk rencana tersebut. Di situ sama sekali tidak ada apresiasi mengenai upaya preventif yang telah dicoba oleh Polda Jateng yang menggelar beberapa kompi pasukan, karena memang terbukti meski ada pengamanan mereka membiarkan massa membakar dan merusak tiga gereja dan satu sekolah Kristen.
- 2) Tajuk rencana berjudul “Kegalauan Hidup Bernegara” berada satu nada dan satu nafas dengan berita utama di halaman 1 pada tanggal 9 Februari 2011 tersebut yang berjudul “Negara Gagal Lindungi Warga – Massa Merusak Gereja di Temanggung”, jadi jelas telah terjadi framing oleh *Kompas* bahwa negara memang telah gagal melaksanakan tugas dan fungsinya mengawal konstitusi.

4.2.4. Framing *Media Indonesia*: Giliran Temanggung Rusuh

Seperti juga *Kompas*, maka *Media Indonesia* juga menjadikan kasus kerusuhan di Temanggung sebagai laporan utama dalam pemberitaannya pada 9 Februari 2011, sehari sesudah kejadian itu diketahui hampir pada saat yang bersamaan oleh sebagian masyarakat melalui tayangan berita di berbagai media online, televisi, maupun radio. Sehingga, pilihan berita ini pun dapat dikategorikan sebagai informasi basi, kalau tidak ada hal yang istimewa, atau kemajuan perkembangan dari situasi di lapangan. Dengan judul yang dibuat oleh *Media Indonesia* tersebut maka dapat dianalisis bahwa surat kabar ini masih tetap menganggap sebagian besar pembacanya belum tahu bahwa ada kejadian rusuh di Temanggung, sehingga meski peristiwa itu sudah terjadi hampir 24 jam, tetap saja dijadikan headline.

Maka sepatutnya bila *Media Indonesia* pada Rabu, 9 Februari 2011 muncul dengan berita utama (*headline*) berjudul “Giliran Temanggung Rusuh” maka surat kabar ini diharapkan akan menampilkan fakta baru atau perkembangan yang lebih maju, namun kenyataannya tidak demikian. Dalam berita itu *Media Indonesia* memandang kekerasan atas nama agama merupakan rentetan kejadian yang saling berkaitan, dan kekerasan demi kekerasan yang dilancarkan oleh jaringan kelompok-kelompok antitoleransi akan terus terjadi dan bergulir di berbagai tempat di Indonesia sebagai sesuatu yang sudah direncanakan, maka disebut sebagai giliran. Dengan pemilihan judul ini *Media Indonesia* berusaha membuat skema bahwa: pertama, kekerasan atas nama di Indonesia sudah seperti sebuah efek domino di mana kalau itu sudah terjadi di satu kota maka efek dan rentetannya pasti akan segera terjadi di kota-kota lain di Indonesia; kedua, sudah dapat diperkirakan aksi-aksi seperti itu akan dibiarkan oleh aparat keamanan yang menyaksikan kekerasan tersebut.

Mengenai pemilihan judul tersebut, Pemimpin Redaksi *Media Indonesia*, Usman Kansong, mengatakan dalam wawancara bahwa dia memang sengaja memilih judul dan tema seperti itu. “Terkait dengan berbagai kekerasan atas nama agama belakangan ini kami memahami bahwa ada kelompok tertentu yang menggerakkan berbagai aksi kekerasan tersebut, termasuk dalam kasus kerusuhan

di Temanggung yang bermuara pada perusakan dan pembakaran tiga buah gereja. Kami meyakini mereka semua berasal dari jaringan dengan ideologi yang sama, termasuk dengan yang melancarkan aksi penyerangan terhadap anggota jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Provinsi Banten, dua hari sebelumnya,” katanya.²³ Lebih lanjut dia menjelaskan pandangan demikian berkembang karena dalam kasus kerusuhan di Temanggung, dan juga pada berbagai kerusuhan lainnya, sebelumnya sudah ada pemanasan untuk berbuat rusuh, yakni pada dua persidangan sebelumnya terhadap terdakwa kasus penistaan agama atas nama Antonius Richmond Bawengan.

“Jadi berbagai kekerasan itu adalah serangan terhadap pemikiran dan kelompok minoritas, apakah itu kasus penyerangan di Cikeusik terhadap jemaah Ahmadiyah, atau pun perusakan tiga gereja di Temanggung. Dalam kasus Temanggung, langkah kelompok (perusuh) itu tidak betul, seharusnya mereka menyerahkan kepada pengadilan untuk menghukum Antonius Richmond Bawengan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku kalau memang dirasa terdakwa bersalah, bukan memaksakan pemahaman mereka sendiri. Sedangkan dalam kasus jemaah Ahmadiyah, atau kasus Lia Eden, misalnya, Media Indonesia tidak melihat isi ajaran mereka, karena itu adalah buah pikiran atau sebuah *ijtihad*, kalau ajaran mereka itu salah bukan berarti mereka yang merasa benar lalu bebas berbuat kekerasan,” kata Usman.²⁴

Selanjutnya, lead untuk berita ini, yang diletakkan pada paragraph satu dan dua menggambarkan bagaimana redaksi *Media Indonesia* melaporkan rentetan kekerasan bernuansa agama yang kerap terjadi belakangan ini:

BARA konflik bernuansa SARA terus menyala. Setelah penyerbuan terhadap keluarga Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang,

²³ Wawancara Usman Kansong - - Pemimpin Redaksi Media Indonesia Bertempat di: Lantai 2 Kantor Redaksi Media Indonesia, Kedoya, Jakarta Barat Hari/Tanggal: Selasa, 29 Mei 2012 Waktu: 09.30 – 10.30`

²⁴ Ibid

Banten, kerusuhan dengan membawa panji agama memanaskan kota berhawa sejuk, Temanggung, Jawa Tengah, kemarin.

Kerusuhan meletus saat majelis hakim Pengadilan Negeri Temanggung membacakan vonis lima tahun penjara untuk terdakwa kasus penistaan agama, Antonius Richmond Bawengan, 50, pria ber-KTP Jakarta.

Lead dimulai dengan kalimat “Bara konflik bernuansa SARA terus menyala.” Menurut hemat peneliti, kalimat tersebut ingin menimbulkan efek dramatis karena kata “bara” bisa diartikan sebagai api yang merah menyala panas, dan biasanya jauh lebih panas daripada kobaran lidah api. Dengan demikian menurut *Media Indonesia*, konflik bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan, sebuah akronim yang dipakai oleh penguasa keamanan semasa Orde Baru) seperti bara yang panas dan bisa jadi tidak kelihatan namun tiba-tiba muncul sebagai api yang berkobar-kobar. Penggunaan kata SARA, yang seharusnya cukup agama, terkesan seperti ingin memperluas persoalan bahwa yang dapat menjadi kobaran api bukan hanya agama tetapi juga suku, ras dan antargolongan. Padahal, dalam kerusuhan di Temanggung tidak ada manfaatnya melebarkan persoalan ke faktor lain di luar agama, ras, dan antargolongan, yang dalam kerusuhan di Temanggung sebenarnya tidak terjadi.

Hal itulah yang kemudian ditampilkan dalam kalimat berikutnya bahwa kekerasan itu merupakan rentetan kejadian setelah kerusuhan di Cikeusik, Pandeglang, dan itu semua membawa “panji agama” dengan demikian jelaslah ada dramatisasi berupa upaya penguatan makna yang seharusnya hanya satu peristiwa kekerasan bernuansa agama diperluas menjadi kerusuhan SARA, dimana agama hanya salah satu unsur saja, maka dapat disimpulkan dalam lead ini telah terjadi proses framing. Pada paragraph kedua, yang juga masih satu rangkaian dengan paragraph satu, makin jelas bahwa kerusuhan itu dipicu oleh kasus penistaan agama yang melibatkan seorang oknum asal Jakarta bernama Antonius Richmond Bawengan karena dia divonis lima tahun oleh mejelis hakim di PN Temanggung. Penyebutan “pria ber-KTP Jakarta” pada akhir paragraph itu seperti menegaskan bahwa terdakwa bukan orang Temanggung, dia orang luar yang datang ke kota di

kaki gunung Sindoro yang berhawa dingin tersebut dan menimbulkan kekacauan di sana.

Paragraph ketiga merupakan penjelasan dari paragraph sebelumnya, dan terkesan tidak terjadi proses framing di situ:

Persidangan itu sendiri dipercepat, dari tuntutan jaksa lima tahun, dilanjutkan pembacaan vonis oleh hakim, tanpa pleidoi terdakwa.

Ini terjadi karena situasi persidangan tidak kondusif.

Memang di sini fakta disusun seperti apa adanya bahwa sidang ini tidak normal karena massa sudah berunjuk rasa dan “mengawal” sidang kedua, ketiga, dan keempat dalam upaya menekan hakim agar memvonis terdakwa dengan hukuman mati seperti tuntutan mereka. Dalam hal ini jaksa penuntut sudah bertindak benar dengan menuntut terdakwa secara maksimal sesuai KUHP untuk kasus penistaan agama yakni lima tahun penjara. Demikian pun hakim dalam hal ini sudah memvonis terdakwa secara maksimal, yakni lima tahun penjara, tanpa sempat memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaannya (pleidoi). Jadi, penutup paragraph yang berbunyi “Ini karena situasi persidangan tidak kondusif.” bukanlah framing meski subyektif, sebab pengertian “tidak kondusif” tergantung menurut siapa yang menilai, kalau buat massa yang berunjukrasa situasi sudah kondusif guna menekan para hakim, sehingga akan lebih baik dan kuat kalau disebutkan di situ bahwa sejak awal persidangan selalu di bawah tekanan ratusan massa yang hadir dan selalu berunjukrasa menyerukan hukuman mati.

Paragraph keempat merupakan kelanjutan alinea sebelumnya dan berisikan deskripsi situasi, jadi ia merupakan laporan atas sebuah fakta:

Belum sempat hakim mengetukkan palu, massa yang memadati ruang sidang langsung berteriak dan merangsek ke depan untuk menyerang terdakwa dan hakim. "Hakimnya kita bunuh sekalian!" teriak massa.

Pemakaian kutipan langsung: “Hakimnya kita bunuh sekalian!” merupakan penempatan yang cerdas dan tepat untuk menggambarkan massa perusuh bukan saja marah kepada terdakwa tetapi juga kepada majelis hakim yang tidak mau

tunduk kepada tekanan mereka, atau untuk menggambarkan anggapan para perusuh itu bahwa hakim telah bertindak tidak adil pula, sehingga patut dibunuh. Paragraph selanjutnya sampai paragraph delapan merupakan laporan fakta mengenai kemarahan massa yang merusak gedung PN Temanggung, dan kemudian merusak dan membakar tiga buah gereja dan satu sekolah Kristen.

Maka paragraph Sembilan juga merupakan penggambaran yang baik mengenai siapa itu para perusuh:

Aksi massa yang beringas nyaris tanpa pencegahan yang berarti dari aparat. "Kita tidak terima, itu putusan tagut atau berhala atau putusan orang kafir," kata koordinator pengunjuk rasa Sihabudin.

Paragraph ini merupakan framing yang lemah karena tidak menjelaskan dengan rinci apa yang diperbuat oleh aparat keamanan (para anggota Polri dan TNI) khususnya pada bagian kalimat yang berbunyi "...nyaris tanpa pencegahan yang berarti dari aparat." Karena dalam berkas persidangan terungkap bahwa aparat Polri, memang telah disiagakan bahkan dengan mendatangkan satu kompi Brimob Polda Jateng dari markas mereka di Pekalongan, ada pasukan TNI dari Kodim Temanggung, juga Kapolda Jawa Tengah Irjen Edward Aritonang hadir di lokasi. Polri juga telah mengevakuasi terdakwa kasus penistaan agama Antonius Richmond Bawengan, juga para hakim dan jaksa sehingga tidak ada dari mereka yang berhasil dibunuh oleh massa. Massa juga berhasil dihalau menjauh dari gedung PN Temanggung. Sehingga gambaran itu sebenarnya tidak lengkap, karena tidak disebutkan apakah tembakan peringatan juga dilepaskan ke udara, atau apakah aparat keamanan memang sama sekali tidak berusaha melumpuhkan perusuh, termasuk dengan melepaskan tembakan memakai gas air mata, peluru karet dll.

Kalimat kedua dalam paragraph sembilan menegaskan siapa para perusuh itu, yakni orang-orang yang digerakkan oleh KH Syihabuddin, orang tokoh lokal pemilik pesantren Wonobojo yang berpandangan putusan hakim yang memvonis berdasarkan KUHP adalah "... putusan tagut atau berhala atau putusan orang kafir, ..." jadi meski apa yang diucapkan oleh KH Syihabuddin adalah fakta di

lapangan, penempatan di paragraph sembilan dalam bentuk kutipan langsung merupakan penggambaran yang sangat kuat. Hanya saja, dalam seluruh pemberitaan yang tercatat dalam penelitian ini tidak ada satu pun artikel yang menjelaskan dan mencoba menggali mengapa KH Syihabuddin punya pandangan yang demikian.

Paragraph sepuluh dan sebelas adalah upaya *Media Indonesia* membuat pemberitaan menjadi berimbang dengan mengambil sumber kepolisian untuk memberikan pendapatnya:

Meski demikian, Polri membantah kecolongan. "Polri telah berbuat sebaik mungkin," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Ketut Untung Yoga Ana.

Polres Temanggung dan Polda Jateng menurunkan 140 anggota Brimob pengendalian massa, 640 personel polisi, ditambah aparat Kodim 0706. "Seluruh personel berjumlah 640 orang dan Pak Kapolda ada di lokasi," tuturnya.

Dengan kedua paragraph tersebut pemberitaan menjadi berimbang karena pihak Polri diberi kesempatan untuk menjelaskan langkah-langkah yang diambilnya sebagai antisipasi bahwa di Temanggung akan pecah kerusuhan. Sehingga, sampai titik itu maka kedua paragraph sudah cukup menjelaskan bahwa Polri dan TNI bukannya tidak berbuat, melainkan mereka sudah mengambil langkah-langkah antisipasi, namun tidak cukup kuat untuk mengadang massa. Dalam kedua paragraph tersebut juga tidak tercermin upaya dari wartawan untuk berusaha mengejar penjelasan dari pihak Polri mengapa ketiga gereja dibiarkan dirusak dan dibakar.

Selanjutnya, *Media Indonesia*, di bawah sub judul Presiden Kecam, menyampaikan sikap Pemerintah, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang disampaikan melalui Menko Polhukham, Djoko Suyanto:

Presiden kecam

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengecam tindakan anarkistis di Temanggung. "Presiden menginstruksikan pelaku

segera diproses secara hukum," kata Menko Politik, Hukum, dan HAM Djoko Suyanto.

Paragraph ini jelas memperlihatkan bahwa sikap Pemerintah sebenarnya tidak menolerir kejadian di Temanggung tersebut, yang ditegaskan dari frasa "mengecam tindakan anarkistis di Temanggung" dan kemudian ditindaklanjuti dengan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar pelaku diproses secara hukum. Sayangnya pernyataan sikap Pemerintah melalui Menko Polhukham Djoko Suyanto itu tidak dikejar lebih jauh oleh para wartawan karena sifatnya yang sangat normative. Di situ tidak ada penjelasan mengenai mengapa tidak ada langkah-langkah tegas yang telah diambil mengingat pada kenyataannya tiga gereja dibakar dan dirusak, atau apa langkah ke depan agar kejadian serupa tidak terulang. Apa yang dikemukakan dalam paragraph ini tidak sesuai dengan teks/caption foto yang diletakkan persis di atas berita yang berbunyi: "Konflik berbau SARA terus berkobar. Presiden hanya mengecam, tetapi miskin tindakan."

Dua paragraph penutup berita ini pun tidak memperlihatkan bahwa *Media Indonesia* sedang mengadakan framing bahkan menjelaskan perkembangan peristiwa, melalui pernyataan Kapolri Jenderal Timur Pradopo bahwa sudah ada yang dijadikan tersangka, yakni orang dari luar Temanggung, dan pernyataan dari Kapendam IV Diponegoro Letkol Zaenal Abidin bahwa kondisi Temanggung sudah kondusif, ada penambahan pasukan, serta memuji Kapolda Jateng yang cepat menghubungi Pangdam IV Diponegoro.

Dengan demikian berita utama *Media Indonesia* di halaman 1 pada 9 Februari 2011 tidak mencerminkan bahwa ia sedang mengadakan framing dengan pertimbangan:

1. Dalam berita ini tidak terlihat upaya membuktikan pernyataan bahwa kerusuhan di Temanggung merupakan "giliran" seperti yang dinyatakan dalam judul, dan hanya mengacu pada peristiwa penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang. Bahkan, berita ini lebih kuat menjelaskan posisi dan sikap Pemerintah. Berita juga basi, karena fakta-fakta yang diungkapkan tidak ada yang baru, sebagian besar

sudah dimuat sehari sebelumnya oleh berbagai media online, televisi dan radio.

2. Berita tersebut lebih banyak merupakan laporan dari wartawan di lapangan dengan penambahan fakta dari sejumlah pejabat negara yakni juru bicara Mabes Polri, Kapolri, Menko Polhukham, dan Kapendam Diponegoro. Kemungkinan besar hal ini adalah gaya pemberitaan *Media Indonesia*, bahwa hardnews hanyalah memuat fakta-fakta yang berkembang di lapangan dan tidak mencampurkannya dengan opini dari para tokoh masyarakat atau pun pakar. Terkait dengan hal ini Pemimpin Redaksi *Media Indonesia*, Usman Kansong, dalam wawancara dengan peneliti mengatakan: “Sebenarnya memang dalam pemberitaan kami harus menempatkan sebuah persoalan dalam konteks yang tepat, hanya saja kebijakan kami di *Media Indonesia* adalah konteks ditempatkan dalam halaman Opini, atau kolom para pakar.”²⁵
3. Pemuatan foto berusaha membantu menjelaskan dan memberi ilustrasi terkait kerusuhan di Temanggung, namun juga tidak memperkuat upaya framing, hanya teks/caption-nya yang bernada mendiskreditkan pemerintah/presiden.

Meski di halaman 1 framing tidak dibuat dengan baik dan kuat menegaskan sikapnya terhadap kasus kekerasan atas nama agama di Temanggung namun pada hari yang sama di halaman 2 di bawah rubrik bernama Amuk Massa, *Media Indonesia* menurunkan tiga item artikel atau hampir satu halaman yang sebenarnya sangat jelas menegaskan posisinya. Yang pertama feature berjudul “Ketika Akal Sehat Tidak Berfungsi” yang menggambarkan kepanikan situasi di PN Temanggung yang diamuk massa, analisis mengenai feature ini akan dibahas selanjutnya. Lalu “Galeri Pendapat” yang mengutip wawancara dengan sejumlah tokoh yang semua sependapat dengan posisi Media Indonesia, yakni: KH Salahuddin Wahid, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, yang mengatakan polisi kecolongan, namun menyalahkan presiden yang lemah; Pdt Dr Andreas

²⁵ Ibid

Yewangoe, Ketua Umum PGI, yang mengatakan negara tak berdaya melindungi warga, apa pun agama dan kepercayaannya; Dr Djohan Effendi, Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace, yang menentang campur tangan negara menyatakan mana yang sesat dan tidak, seharusnya agama dilepaskan dari politik agar polisi tegas melindungi golongan minoritas. Dan framing ketiga adalah wawancara dengan dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, yang intinya adalah menyayangkan mengapa negara membiarkan kekerasan demi kekerasan atas nama agama terus terjadi di sejumlah tempat, tanpa tindakan tegas dari polisi.

Dalam proses framing, pemilihan dan penempatan artikel dalam sebuah rubrikasi juga sangat menentukan, selain juga penempatan pada halaman 1. Dengan demikian penamaan rubrik Amuk Massa cukup tepat dan baik, yang mencerminkan mengenai massa di Indonesia yang suka mengamuk itu. Mengenai penamaan rubrik dan penempatan berita di dalamnya dijelaskan oleh Usman Kansong, Pemimpin Redaksi *Media Indonesia*: “Kami pada periode 2009-2011 menerapkan kebijakan kalau ada kasus besar, maka kasus tersebut boleh dijadikan nama rubrik. Misalnya rubrik Amuk Massa kami tempatkan di halaman Politik Keamanan. Peristiwa yang terus berlangsung lebih dari satu atau dua bulan akan kami putuskan untuk menjadi nama rubrik-rubrik khusus, misalnya Demo Buruh, Kenaikan BBM dst secara sengaja, karena secara jurnalistik kami ingin tuntas. Namun sejak 2012 kebijakan itu kami ubah dari generik ke spesifik, misalnya halaman Politik Keamanan tidak ada lagi, yang ada langsung nama rubriknya, misalnya Suriah, atau Lumpur Lapindo dll.”²⁶ Peneliti berpandangan sebenarnya kalau nama rubrik yang dipilih adalah Amuk Massa maka penamaan itu sama sekali tidak mencerminkan konteks sebuah peristiwa dan sekadar mencerminkan situasi dimana ada massa yang mengamuk, mungkin akan lebih baik kalau nama rubrik itu diskriminasi atau persekusi karena sebenarnya demikianlah konteks rentetan kekerasan atas nama agama tersebut. Ketika ditanyakan mengenai perlunya menempatkan sebuah kejadian dalam konteksnya yang tepat, Usman

²⁶ Ibid

Kansong mengakui bahwa pemahaman staf redaksi mengenai esensi dan konteks sebuah peristiwa. “Ya, anda benar, dan harus diakui hal itu memang merupakan kelemahan kami, karena di antara kami sendiri juga kerap tidak ada pemahaman yang sama mengenai esensi dan konteks sebuah peristiwa. Misalnya dalam insiden di Cikeusik semula teman-teman di redaksi sempat menggunakan kata ‘bentrok’ untuk kasus tersebut yang sebenarnya lebih tepat disebut sebagai ‘penyerangan’ terhadap rumah kaum Ahmadiyah. Atau pernah saya sendiri memindahkan foto para pengungsi jemaah Shiah di Madura yang diserang kelompok lain dari halaman dalam ke halaman depan, karena mereka tidak melihat foto yang dramatis itu sebagai hal yang penting dan menarik. Jadi memang pemahaman mengenai pelanggaran HAM atau diskriminasi belumlah merata,” katanya.²⁷

Dengan demikian dapatlah disimpulkan *Media Indonesia* sehari setelah peristiwa Temanggung berusaha memunculkan framing pada halaman satu berupa berita dan foto, namun tidak terlalu kuat bahkan tidak menegaskan sikapnya. Sementara penegasan posisi itu berada di halaman Politik dan Hukum atau halaman dua di bawah rubrik bernama Amuk Massa. Upaya ini cukup baik, namun akan lebih kuat apabila framing terbaik ada di halaman 1, karena pada halaman itulah untuk pertama kalinya pembaca melihat dan membaca berita utama sebuah surat kabar pada hari itu, dan bukan di halaman-halaman selanjutnya.

4.2.5. Framing *Media Indonesia*: Ketika Akal Sehat Tidak Lagi Berfungsi

News feature/soft news yang dibuat oleh *Media Indonesia* sehari setelah rusuh di Temanggung, yakni pada penerbitan 9 Februari 2012 berjudul “Ketika Akal Sehat Tidak Lagi Berfungsi” ditempatkan di halaman 2 Politik dan Hukum di bawah rubrik bernama Amuk Massa, bersama dua artikel lain yakni “Galeri Pendapat” yang berisi wawancara singkat dengan tiga tokoh agama, dan wawancara dengan Dr Azyumardi Azra, dosen Universitas Islam Negeri Jakarta, berjudul “Saatnya Negara Mengambil Kesempatan”. Peneliti meyakini Rubrik

²⁷ Ibid

Amuk Massa adalah framing yang dilakukan oleh surat kabar ini yakni “negara gagal” dan “bubarkan ormas anarkistis” dengan sejumlah pertimbangan.

Pertama, para narasumber yang dipilih oleh redaksi, khususnya dalam Galeri Pendapat dan wawancara khusus Dr Azyumardi Azra sudah menegaskan bagaimana para tokoh itu berpandangan mengenai kasus-kasus kekerasan atas nama agama belakangan ini. Pemimpin Redaksi *Media Indonesia* Usman Kansong pun sudah menegaskan surat kabarnya tidak akan memberi kesempatan atau ruang kepada kaum radikal untuk berbicara di medianya.

Kedua, penempatan tiga artikel yang punya angle hampir sama dalam satu rubrik Amuk Massa juga merupakan pilihan subyektif redaksi dalam menyikapi peristiwa tersebut.

Ketiga, redaksi menyadari feature sangat penting, dan dalam kasus kerusuhan Temanggung hal itu merupakan bagian dari perspektif jurnalisme damai. Namun, Usman Kansong menyadari tidak semua wartawan *Media Indonesia*, khususnya mereka yang berada di daerah kompetensinya terbatas, sehingga tidak semua memiliki kemampuan yang cukup baik untuk menulis feature apalagi dalam perspektif untuk membawa perdamaian.

Judul yang diambil dalam feature/softnews ini adalah “Ketika Akal Sehat tidak lagi Berfungsi” dapat diartikan bahwa massa yang mengamuk di PN Temanggung adalah orang-orang yang sudah mata gelap sehingga akal sehat mereka sudah tidak berfungsi. Mengapa mereka tidak memakai akal sehat lagi, tak lain karena mereka menuntut agar Antonius Richmond Bawengan divonis hukuman mati, padahal hukuman maksimal untuk kasus seperti ini dalam KUHP adalah lima tahun penjara. Maka wujud dari akal sehat yang tidak berfungsi tersebut yang dituangkan dalam feature/softnews sepanjang 475 kata tersebut, dimana penulisnya lebih menggambarkan situasi di PN Temanggung dan di luar gedung, maupun suasana di pasar. Ada disebut nama Kapolres Temanggung AKB Anthony Agustinus Koylal dan Kajari Temanggung, Agus Budi S., yang diperkirakan keduanya non-Muslim, dituduh berkonspirasi menyebarkan agama (Kristen) di Temanggung. Selain laporan pandangan mata yang deskriptif dan dramatis itu, para narasumber yang dipilih adalah Sumi, penjual jamu gendong,

Andre pemilik toko di Jalan Jenderal Sudirman. Sehingga feature ini memang lebih merupakan penggambaran suasana, dan kesan framing tidak terlalu kuat.

Mengawali feature/softnews ini, penulisnya membuat lead deskriptif mengenai suasana di PN Temanggung pasca pembacaan vonis terhadap Antonius Richmond Bawengan:

ISAK tangis beberapa perempuan staf kantor Pengadilan Negeri (PN) Temanggung, Jawa Tengah, pun pecah saat massa dari ruang sidang menyerbu ke ruang-ruang di kantor itu, Selasa (8/2).

Dalam lead ini, sang penulis mengasumsikan pembaca sudah paham bahwa dia sedang menggambarkan situasi di kantor PN Temanggung yang diserbu massa kalap akibat mereka tidak puas atas vonis yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa. Lead itu secara jelas menggambarkan kepanikan karena massa yang mengamuk (tidak disebut berapa kira-kira jumlahnya) dengan leluasa menyerbu masuk ke kantor-kantor yang ada di lingkungan PN Temanggung dari ruangan sidang. Meski tidak disebutkan dalam paragraph ini, namun dapat dibayangkan bahwa massa tersebut sudah tidak mampu ditahan atau pun dihalau oleh aparat dari kepolisian.

Dalam paragraph kedua digambarkan massa yang kalap itu secara membabitua merusak perkantoran tersebut:

Mereka memukul-mukul pintu, memecahkan kaca, dan melempari para staf dengan batu. Akal sehat benar-benar tak lagi berfungsi saat itu. Seorang staf perempuan berpakaian hijau menangis histeris sembari memegangi kepala bagian kanannya yang berdarah terkena lemparan batu. Polisi langsung menembakkan gas air mata ke arah massa yang beringas.

Kalau membaca penggambaran tersebut, tampak jelas massa juga mengarahkan kebencian mereka terhadap pengadilan, yang dalam hal ini adalah lembaga negara atau pun mewakili simbol-simbol negara. Bahkan, terhadap perempuan pun massa tidak peduli, yang digambarkan dengan baik mengenai seorang perempuan yang menjadi staf di pengadilan dilampari batu sampai berdarah-darah karena luka di kepalanya. Barulah dalam situasi yang dramatis itu polisi bertindak dengan

menembakkan gas air mata ke arah massa yang beringas. Beringas dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai liar.

Klimaks feature/softnews ini ada di paragraph ketiga dan keempat yang menggambarkan upaya evakuasi oleh polisi terhadap para staf pengadilan maupun sejumlah pengunjung di pengadilan tersebut:

Saat massa merasakan pedih di mata dan kehilangan konsentrasi, sejumlah anggota polisi melarikan para staf PN perempuan ke bagian belakang gedung, lalu mengevakuasi mereka dengan cara dinaikkan ke tembok keliling di bagian samping setinggi sekitar 3 meter dan diberi kawat berduri. Dengan susah payah, akhirnya mereka keluar melewati sekolah di samping PN.

Polisi juga melakukan hal yang sama terhadap beberapa warga sipil dan dua wartawati untuk dikeluarkan dari lokasi PN melalui pintu belakang, kemudian melewati sawah-sawah tembus ke Jalan Kartini.

dengan penggambaran pada kedua paragraph tersebut di atas tampaklah bahwa polisi hanya menghalau para perusuh yang beringas itu dengan gas air mata, mengevakuasi warga sipil yang tidak terkait langsung dengan kasus yang tengah disidang, dan di situ sama sekali tidak tergambar upaya melumpuhkan mereka apakah dihalau dengan pentungan, dilepaskan tembakan peringatan, atau pun ditembak dengan peluru karet. Artinya, ada anggota Polri dan TNI yang hadir mengamankan persidangan namun dalam berbagai laporan sepertinya tidak ada yang menjelaskan apakah para petugas itu telah diperintahkan untuk bertindak represif melainkan hanya defensif dan bertahan.

Barulah pada paragraph kelima ada penjelasan mengapa massa begitu marah usai hakim membacakan putusan:

Peristiwa itu pecah sesaat setelah hakim membacakan vonis lima tahun penjara terhadap terdakwa kasus penistaan agama Anthonius Richmond Bawengan. Ia terbukti bersalah membagikan buku dan selebaran berisi tulisan yang dianggap menistakan agama Islam,

serta melukai hati penganutnya di Desa Kenalan, Kecamatan Kranggan, Temanggung, pada 3 Oktober 2010.

Di situ disebutkan bahwa kemarahan massa dipicu oleh vonis terhadap terdakwa kasus penistaan agama yang hanya lima tahun. Di situ disebutkan bahwa terdakwa membagikan selebaran yang menista agama Islam dan “menyakiti hati para penganutnya”. Ketika laporan ini ditulis, diperkirakan informasi mengenai siapa kelompok yang sakit hati itu tidak disebutkan. Padahal, bila mengingat bahwa persidangan pada tanggal 8 Februari 2011 itu merupakan persidangan yang keempat dan dalam tiga sidang sebelumnya sudah terlihat bahwa selalu ada massa yang hadir dan berunjukrasa, tentulah sudah dapat dideteksi sejak awal kelompok yang beringas tersebut siapa, berasal dari mana dst. Kelompok massa itu marah karena vonis terhadap terdakwa hanya lima tahun, sementara massa menuntut dia dihukum mati, dimana KUHP tidak mengatur demikian. Sangat disayangkan mengapa wartawan tidak menggali pemahaman apa yang membuat massa, atau pimpinannya beranggapan terdakwa harus dihukum mati, mengingat ada hukum nasional yang telah mengatur kasus-kasus demikian.

Pada paragraph tujuh menjadi jelas di situ bahwa para perusuh bukan saja membenci Antonius Richmond Bawengan yang telah divonis menghina agama Islam, tetapi juga kepada hakim dan jaksa yang diungkapkan dengan kutipan langsung: “Kita bunuh saja sekalian hakimnya,” teriak mereka serempak. Demikian pun pada paragraph delapan disebutkan massa juga marah kepada Kapolres Temanggung, AKBP Anthony Agustinus Koyslal dan Kajari Temanggung Agus Budi S. yang dianggap berkonspirasi untuk penyebaran agama (Kristen) di Temanggung. Menurut perkiraan peneliti, kalau tudingan konspirasi ini tidak dikembangkan lebih jauh mungkin untuk menggambarkan bahwa massa yang mengamuk itu memang sudah tidak punya akal sehat lagi menganggap Kapolres dan Kajati yang sudah menangkap, memproses dan sampai mengadili terdakwa penistaan agama lalu divonis lima tahun penjara sesuai KUHP telah berkonspirasi membela terdakwa sehingga t.

Ketakutan yang dirasakan masyarakat karena amuk massa itu tergambar dalam paragraph delapan, sembilan, dan sepuluh. Dan pada paragraph sepuluh ada sebuah kalimat yang menarik:

... Prosesi penghancuran terus berlanjut dengan sasaran sejumlah sekolah dan juga rumah-rumah ibadah.

Frasa tersebut berhenti begitu saja tanpa ada penjelasan lebih jauh bahwa sesungguhnya kerusuhan di Temanggung sampai menjadi perhatian besar di *Media Indonesia*, *Kompas* mau pun media massa nasional lainnya sampai lebih dari dua minggu tak lain karena ada tiga rumah ibadah gereja yang dibakar oleh massa yang marah tersebut. Persoalan akan berbeda kalau tidak ada rumah ibadah yang dibakar dan dirusak. Karena pembakaran dan perusakan rumah ibadah adalah sesuatu yang sangat peka, dapat memicu sentimen kemarahan mereka yang tidak ada kaitan sama sekali dengan situasi Temanggung, dan sekadar karena punya agama yang sama. Dan di atas itu semua ketika terjadi pembakaran rumah ibadah apa pun maka persoalan berkembang menjadi masalah pelanggaran HAM, persekusi, dan diskriminasi, apalagi jika aparat keamanan membiarkan hal itu terjadi. Apabila tidak ada rumah ibadah yang dibakar, maka persoalan hanya akan berkembang sebagai masalah lokal, yakni amuk massa.

Sebagai penutup feature ini, membuat paragraph yang menjelaskan bahwa situasi mulai terkendali pada sekitar pukul 13.00 karena ada penambahan pasukan:

Sekitar pukul 13.00 WIB polisi berhasil menguasai keadaan karena jumlah personel terus ditambah. Kerusuhan itu bukan kali pertama di Temanggung. Saat dua kali sidang sebelumnya juga sudah tampak terjadi kerusuhan. Kapolda Jateng Irjen Edward Aritonang berjanji akan memperketat penjagaan di semua tempat ibadah dan objek-objek vital yang diperkirakan akan menjadi sasaran kemarahan.

Sebagai sebuah ending, paragraph kurang *punchy* dan datar saja, sehingga tidak memenuhi kaidah sebuah penutup yang baik bagi sebuah feature yang ditujukan untuk membuat frame bahwa “negara gagal melindungi warga” **pada kesempatan pertama**, artinya, pada hari-hari berikutnya surat kabar ini mulai gencar membuat

framing “bubarkan ormas anarkistis” khususnya setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengutarakan hal itu pada Hari Pers Nasional di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 9 Februari 2011.

Maka feature ini membenarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Pemimpin Redaksi *Media Indonesia*, Usman Kansong, bahwa:

1. Konteks ditempatkan di halaman opini, wawancara atau kolom para pakar serta tajuk rencana.
2. Tidak semua wartawan *Media Indonesia*, terutama yang berada di daerah, punya kemampuan dan kompetensi yang cukup untuk membuat feature yang baik atau konsep jurnalisme damai.

Dan pada akhirnya dapat dikatakan bahwa feature yang dibuat oleh *Media Indonesia* ini belum memberi sumbangan yang cukup kuat dalam upaya membuat framing “negara gagal melindungi warga negara” pada hari pertama pasca rusuh massa di Temanggung. Konteks itu baru muncul dalam wawancara-wawancara khusus pada rubrik yang sama, yakni Amuk Massa.

4.2.6. Framing *Media Indonesia*: Ormas Anarkistis

Kesadaran membuat framing dalam tajuk rencana sangat dipahami oleh jajaran redaksi *Media Indonesia*. Framing dalam tajuk rencana itu mempunyai dua tujuan, yakni pertama bersifat internal yaitu perangkat dalam pengorganisasian bahan yang diperoleh dari fakta agar dapat direkonstruksikan sebagai teks yang terstruktur. Kedua, framing merupakan cara untuk menghadirkan makna implicit (tersirat). Pemeo “*read between the lines*” yakni makna (meaning) dari suatu teks bukan hanya ditangkap melalui pengertian dari yang tersurat, tetapi dari sebalik (beyond) suatu teks. Intensi dan tujuan untuk menyampaikan makna di balik teks ini sering berkonteks pada kepentingan publik, atau nilai (value) dan cita-cita sosial yang dipandang luhur yang dirumuskan sebagai visi dan misi media pers. (LP3ES, 2002, xxx)

Sesungguhnya *Media Indonesia* telah membuat sebuah tajuk rencana berjudul “Negara yang Retak” pada 8 Februari 2011, di hari terjadi kerusuhan di Temanggung. Tajuk rencana itu untuk menyikapi aksi penyerangan terhadap

jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang pada hari Minggu, 6 Februari 2011, dengan korban tiga orang tewas. Ada skema yang dikembangkan dalam tajuk rencana tersebut:

1. Pemerintah gagal menjadi pelindung kaum lemah dan malahan hanya menjadi penonton ketika hak-hak kaum minoritas diobrak-abrik.
2. Pemerintah tidak menerapkan konstitusi UUD 1945 Bab XA di bawah judul Hak Asasi Manusia pada Pasal 28E menjamin hak setiap warga untuk beragama dan beribadat menurut agamanya, bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan Pasal 28G yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.
3. Kekerasan yang terus terjadi terhadap jemaah Ahmadiyah menjadi bukti bahwa Negara Kesatuan yang pluralis ini sesungguhnya mulai retak.

Terkait dengan kasus kerusuhan di Temanggung, surat kabar ini menyikapinya dengan sebuah tajuk rencana pada hari Jumat, 11 Februari 2011, dengan judul “Ormas Anarkistis” yang dibuat setelah ada pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: “Jika ada kelompok dan organisasi resmi yang selama ini terus melakukan aksi kekerasan, kepada penegak hukum agar dicarikan jalan yang sah atau legal, jika perlu dilakukan pembubaran atau pelarangan.” Maka dalam analisis data ini, peneliti sengaja memilih tajuk rencana tersebut karena memang dibuat sesuai dengan tema penelitian ini, meski hal-hal yang telah dinyatakan dalam tajuk rencana pada 8 Februari 2011 juga sangat terkait dengan tajuk rencana ini.

Maka judul “Ormas Anarkistis” mewakili dua konsep yakni “ormas” yang merupakan singkatan dari organisasi massa dan kata sifat “anarkistis” untuk mewakili tindakan yang bersifat menentang setiap kekuatan negara, atau sifat-sifat politik yang tidak menyukai adanya pemerintahan, undang-undang atau pun hukum. Judul tersebut sebenarnya tidak berbicara apa-apa karena tidak mengandung kata kerja apa pun, namun tetap asosiatif dengan kerusuhan di Temanggung atau pun di tempat lainnya.

Untuk memulai tajuk rencana ini, lead yang dibuat sudah sangat tegas mempertanyakan dimana peran negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara:

ADA yang aneh dalam kehidupan berbangsa di Republik ini. Kita punya negara, tapi keberadaannya hampir tidak dirasakan warga.

Paragraph pembuka ini sebenarnya agak berlebihan karena tidaklah benar kalau dikatakan keberadaan negara hampir tidak dirasakan warga, sebab dalam banyak aspek keberadaan negara masih dirasakan oleh warga masyarakat, namun ketidakberdayaan negara itu terasa ketika sampai kepada masalah tindakan diskriminatif dan persekusi terhadap jemaah Ahmadiyah, umat Kristiani, maupun kaum minoritas agama lainnya di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Dengan demikian lead dalam tajuk rencana ini jelas merupakan framing, karena dia membesarkan sesuatu yang sebenarnya tidak sepenuhnya demikian.

Maka dalam paragraph kedua apa yang dimaksudkan dalam lead tersebut dijelaskan maksudnya:

Negara absen justru ketika rakyat membutuhkan perlindungan. Negara seolah hanya hadir saat warga mengurus identitas kewargaan seperti KTP dan paspor atau rupa-rupa perizinan. Lebih parah lagi, negara seolah membiarkan tindakan sekelompok orang yang berkomplot melakukan kekerasan. Bahkan, dengan payung organisasi kemasyarakatan (ormas), kelompok itu mendapatkan tiket untuk meneror, merusak, melukai, dan bahkan membunuh warga yang berbeda pandangan.

Kalimat kunci dalam paragraph ini adalah: Negara absen justru ketika rakyat membutuhkan perlindungan. Juga pada kalimat: negara membiarkan komplotan yang melakukan kekerasan. Dan kalimat: kelompok atau ormas itu mendapatkan tiket untuk meneror, merusak, melukai, dan bahkan membunuh warga yang berbeda pandangan. Kalimat-kalimat tersebut sangat jelas dan tendensius menilai pemerintah yang ada sekarang tanpa daya di hadapan kelompok atau ormas tertentu, bahkan seperti merestui yang diumpamakan dengan ungkapan “mendapatkan tiket”. Maka jelas paragraph kedua dalam tajuk rencana ini menegaskan bagaimana redaksi *Media Indonesia* menilai pemerintahnya: tak becus melindungi rakyat, membiarkan ormas perusuh.

Paragraph ketiga mengelaborasi lebih jauh dua alinea di atasnya dengan menjelaskan dua hal, yakni negara diberi mandat oleh rakyat untuk menegakkan hukum, dan pada sisi lain bila sebuah kekerasan dilakukan secara kolektif dan atas nama agama maka hal itu sepertinya diizinkan, simak paragraph ini:

Negara yang memiliki monopoli kekerasan tidak menggunakan haknya itu untuk menegakkan hukum, tetapi malah menjadi penonton kebrutalan. Berkali-kali ormas anarkistis, atau minimal anasir-anasirnya, menjadi hakim jalanan tanpa ada tindakan tegas. Itulah mengapa mereka menerjemahkan pesan itu secara gamblang bahwa apabila kekerasan dilakukan secara kolektif dan membawa atribut agama, negara pasti tidak akan menindak, apalagi menghukum.

Kalimat-kalimat dalam paragraph jelas memperlihatkan kegeraman terhadap ketidakberdayaan aparat hukum ketika dibutuhkan untuk mengusir par “hakim jalanan” yang berlindung di balik atribut agama. Dan paragraph ini pun sangat jelas merupakan framing karena tidak mencantumkan bahwa sebenarnya ada juga upaya dari aparat keamanan untuk mengamankan persidangan dan sejumlah gereja (dalam kasus rusuh Temanggung) namun upaya itu tidak dilaksanakan secara optimal dan tegas, selain itu apakah prosedur tetap pengamanan dijalankan atau tidak.

Paragraph selanjutnya merupakan rincian dari paragraph tiga yang mengutip data mengenai berbagai aksi persekusi atas nama agama yang dikumpulkan oleh Setara Institut dimana elemen-elemen negara termasuk aktor pelaku persekusi selain sejumlah ormas anarkistis:

Karena itu, tidak mengherankan jika tindak kekerasan atas nama agama masih sangat tinggi. Data Setara Institute menunjukkan sepanjang 2009-2010 terjadi 286 tindak kekerasan. Sebanyak 103 kekerasan atas nama agama itu dilakukan elemen negara dan 183 kekerasan oleh nonnegara, termasuk ormas anarkistis.

Data tersebut menunjukkan negara terus kalah oleh ormas penguasa jalanan itu. Kian kelihatan kekalahan telak negara ketika tuntutan pembubaran ormas anarkistis itu selalu dijawab dengan pernyataan membubarkan ormas tidak mudah.

Seharusnya data oleh Setara Institut merupakan angka yang membuat Pemerintah tidak boleh bergeming, dan harus berbuat sesuatu untuk menekannya. Setara Institute adalah lembaga yang secara teratur membuat kajian menyangkut kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dalam lima tahun terakhir, dan kesimpulan mereka selalu sama bahwa tidak ada kemajuan signifikan. Pemerintahan di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mampu untuk mengatasi masalah yang timbul terkait kebebasan tersebut. Menurut peneliti Setara Institute, Ismail Hasani, sepanjang 2011 ada 19 kali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pesan toleransi, namun semua tak ada bekasnya, termasuk ketidakmampuan memerintahkan Walikota Bogor membatalkan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan untuk Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin.²⁸ Demikian pun Menteri Agama Suryadharma Ali adalah pejabat negara yang paling sering tidak menampilkan sikap toleransi untuk mengatasi berbagai diskriminasi atas nama agama, dia tampaknya menggunakan posisinya dan isu agama untuk menggalang dukungan massa bagi Partai Persatuan Pembangunan yang dipimpinnya.

Dalam catatan lembaga itu selama 2011 terjadi 244 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang mengandung 299 bentuk kekerasan. Dengan Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan tingkat pelanggarannya tertinggi. Korban yang paling banyak teraniaya adalah jemaah Ahmadiyah, disusul jemaat Kristiani. Dua kelompok yang paling banyak melanggar HAM itu adalah Front Pembela Islam (FPI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bentuk kekerasan atas nama agama yang dilancarkan oleh negara itu termasuk pelarangan

²⁸ Dalam Refleksi Akhir Tahun Kondisi Kebebasan Beragama dan Hak Asasi Manusia 2011, di Jakarta, Senin (19 Desember 2011), sebagaimana dilaporkan oleh *Suara Pembaruan* pada 20 Desember 2011, <http://www.suarapembaruan.com/home/2011-tak-ada-kemajuan-kebebasan-beragama/15051>.

terhadap jemaah Ahmadiyah, seperti Operasi Sajadah yang dilancarkan oleh Kodam III Siliwangi bersama-sama Pemprov Jawa Barat. Sehingga kalimat: “Karena itu, tidak mengherankan jika tindak kekerasan atas nama agama masih sangat tinggi,” merupakan pernyataan yang faktual dan membenarkan kalau aparat keamanan akan cenderung mendiamkan bila ada kelompok ormas agama (Islam) melancarkan persekusi terhadap kelompok lain yang lebih kecil jumlahnya. Dengan demikian nyatalah bahwa paragraph empat merupakan framing karena dengan tegas menjustifikasi bahwa negara selalu kalah telak oleh ormas penguasa jalanan, juga pernyataan bahwa “membubarkan ormas tidaklah mudah” juga memverifikasi keengganan para pejabat negara bersinggungan dengan ormas anarkistis.

Paragraph lima sampai delapan menjelaskan bagaimana cara membubarkan ormas yang dianggap anarkistis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, meski diberi catatan jalan itu amat panjang dan berliku-liku. Maka pada paragraph ke sembilan pesan yang ingin disampaikan oleh *Media Indonesia* menjadi jelas:

Namun, negara mestinya tidak boleh menyerah. Asal ada kemauan, pasti ada jalan bagi terobosan hukum. Bukankah prinsip umum demokrasi berlaku bahwa *freedom of association* mengandung syarat *peacefull association*.

Suratkabar ini ingin negara “melawan” sebagai lawan kata menyerah, karena masalahnya negara sepertinya tidak mau atau ogah-ogahan membubarkan massa yang bertindak anarkistis tersebut.

Paragraph sembilan dan sepuluh mengakhiri tajuk rencana ini dengan mengutip dan mengomentari pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Hari Pers Nasional di Kupang, NTT:

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan ormas anarkistis dibubarkan. Itu perintah yang mesti dibaca agar penegak hukum mencari terobosan hukum sehingga pembubaran yang sah dan legal segera dapat dilakukan.

Sekali lagi, itu perintah Presiden dan jangan menjadikan Kepala Pemerintahan bahan olok-olok sebagai pemimpin yang banyak melahirkan instruksi tanpa ada yang bisa dieksekusi. Bila Kapolri dan Jaksa Agung tidak sanggup melaksanakannya, mengapa tidak meletakkan jabatan?

Di sini *Media Indonesia* meminta agar para penegak hukum menindaklanjuti perintah Presiden tersebut dalam bentuk mencari terobosan hukum guna membubarkan ormas anarkistis, sekaligus juga mengingatkan agar para pembantu Presiden tidak membuat pemimpin mereka sekadar ahli instruksi tanpa aksi, atau meminta agar Kapolri dan Jaksa Agung mundur saja bila tidak sanggup melaksanakan perintah itu. Paragraph penutup (ending) dalam tajuk rencana ini sangatlah tegas dan kuat (*punchy*) namun tak lama setelah Presiden membuat pernyataan itu di Kupang, baik Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzy dan Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, semua satu nada menanggapi bahwa persoalan membubarkan sebuah ormas bukan pekerjaan gampang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tajuk rencana yang dibuat oleh *Media Indonesia* pada 11 Februari 2011, meski tidak menyebutkan kasus Temanggung secara spesifik telah dengan tegas dan jelas menyebutkan kalau negara gagal, dan meyakini akan gagal lagi dalam melindungi warga negara dalam kasus persekusi agama yang terjadi pada masa mendatang.

BAB V

DISKUSI, KESIMPULAN, DAN REKOMENDASI

5.1. Diskusi

Pada bagian awal penelitian ini telah dikemukakan bahwa ada dua pertanyaan utama yang ingin dijawab yakni: apakah framing (pembingkaiian) yang dibuat oleh dua surat kabar mainstream, yakni *Kompas* dan *Media Indonesia*, pada berita, feature dan tajuk rencana dalam kasus kerusuhan di Temanggung telah cukup dalam dan luas memperhatikan konteks situasi yang berkembang di lapangan dan lingkungan? Dan, apakah framing yang dibuat oleh *Kompas* dan *Media Indonesia*, khususnya dalam kasus konflik agama, akan memberi sumbangan yang cukup signifikan dalam pengembangan toleransi antar umat beragama di Indonesia? Maka, pada bagian ini, berdasarkan pada analisis data penelitian ini, peneliti akan mencoba membahas secara permukaan hal-hal yang terkait dengan kedua pertanyaan besar tersebut dengan meminjam pendekatan *hierarchy of influences on media content* yang dikembangkan oleh Reese dan Shoemaker, yakni lima level pengaruh yakni level individu, level rutinitas, level organisasi, level pengaruh luar dan level ideologi.

Pada Level Individu, dari hasil analisis framing maupun wawancara, dapatlah dikatakan kedua surat kabar tidak mempunyai terlalu banyak persoalan terkait dengan latar belakang kepribadian dan profesional para wartawannya, karena kedua surat kabar itu secara sengaja membuat pembingkaiian (*framing*) dalam meliput kasus kerusuhan di Temanggung yakni “negara gagal” dan bubarkan “ormas anarkistis” dan hal itu dipahami oleh berbagai level wartawan. Bila, konservatisme agama berpengaruh kuat pada kedua surat kabar tersebut, maka tentu tema dan sudut pandang pemberitaan yang dilaporkan para wartawan pada kedua surat kabar tidak memakai kedua frame tersebut dan memilih frame yang lain. Dari aspek ideologi para pimpinan di kedua surat kabar tersebut mengakui tidak ada masalah, entah wartawannya berada di daerah atau di Jakarta, namun dari

aspek kompetensi diakui bahwa para wartawan mereka yang berada di Jakarta tetap dinilai mempunyai pemahaman dan kemampuan teknis (skill) jurnalistik yang lebih baik, meski pada kenyataannya perbedaan kompetensi tidaklah sampai pada kesenjangan kemampuan dalam bekerja. Dan hal itu terlihat pada kemampuan menulis feature atau pun menggali konteks yang belum terlaksana dengan optimal. .

Seperti telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa meski *Kompas* dan *Media Indonesia* sama-sama membuat frame bahwa kerusuhan di Temanggung pecah karena negara tidak hadir atau enggan bertindak tegas dan represif terhadap para perusuh, namun fakta mengenai konteks kurang digali oleh para wartawan yang berada di lapangan (dalam hal ini mereka adalah para koresponden yang bertugas di Temanggung). Para wartawan daerah itu cenderung melaporkan fakta bahwa polisi dan tentara membiarkan massa bertindak anarkistis tanpa bertindak represif. Sehingga yang terasa kurang adalah ketika membuat laporan pandangan mata mengenai kerusuhan pada 8 Februari tersebut adalah upaya untuk menggali keterangan dari polisi (Kapolda, Kapolres, Kapolsek dll) mengapa mereka tidak memerintahkan untuk menembak/melumpuhkan para perusuh yang jelas-jelas mengancam nyawa dan harta benda pihak lain. Dan hal lain yang dilupakan oleh para wartawan di daerah maupun para redaktur di Jakarta adalah pentingnya meliput proses persidangan para terdakwa pelaku kerusuhan. Karena di situ terungkap bahwa jumlah polisi yang mengamankan kota jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah massa yang mengamuk baik di PN Temanggung maupun yang merusak tiga gereja.

Pada Level Rutinitas Media, yakni pola kegiatan yang sudah terpola dan berulang-ulang dikerjakan oleh para profesional di media, jelaslah bahwa kedua surat kabar tersebut mempunyai prosedur perencanaan berita yang cukup ketat, dan itu diwujudkan dalam bentuk rapat minimal sehari dua kali (baik di *Kompas* maupun *Media Indonesia*) yang dihadiri oleh para pejabat di redaksi mulai dari pemimpin redaksi sampai kepada para redaktur, bahkan di *Kompas*, tokoh pendiri harian itu, Jacob Utama, menyempatkan ikut rapat itu paling tidak seminggu dua kali. Rapat redaksi itu umumnya berupa rapat perencanaan pada pagi hari, dimana

berbagai liputan dipersiapkan, dan rapat budgeting berita, pada sore hari ketika kepada para redaktur ditagih hasil liputan yang direncanakan pada pagi hari, dan kemudian ditentukan arah pemberitaannya. Namun dalam analisis peneliti, meski kedua media punya prosedur kerja yang ketat, tetap ada kelemahan, yakni kesenjangan antara apa yang menjadi sikap mereka dengan yang muncul di pemberitaan. Kelemahan produk itu khususnya nampak dalam penulisan feature dan hardnews (*Media Indonesia*), sementara *Kompas* cukup baik dalam membuat berita maupun feature.

Kedua surat kabar sangat baik ketika menuliskan tajuk rencana mengenai peristiwa kerusuhan di Temanggung yang mencerminkan kepakaran para penulisnya, dan itu dapat dimengerti karena para penulis editorial adalah para wartawan senior yang sangat paham konteks dan memiliki wawasan tajam dan jauh terkait sebuah peristiwa. Selain itu, *Media Indonesia* memang sengaja menekankan konteks sebuah kejadian dalam bentuk wawancara-wawancara dengan para tokoh yang sengaja dipilih, sedangkan *Kompas* membuatnya dalam bentuk artikel opini yang ditulis oleh para pakar dengan sikap dan pandangan yang sama. Kelemahan kedua surat kabar itu adalah dalam hal menggali konteks yang lebih tepat pada peliputan, peneliti menduga hal itu kemungkinan juga luput dalam proses perencanaan sehingga arahan kepada wartawan daerah yang berada di lapangan juga kurang. Demikian pun konsistensi dalam hal penempatan berita dalam rubrik relatif lemah dan peliputan tidak tuntas, yang mana hal itu juga diakui oleh para pimpinan kedua media.

Pada Level Organisasi adalah terkait pada bagaimana berbagai struktur dalam organisasi dan orang-orang yang ada di dalamnya berpengaruh pada isi media. Dengan demikian struktur organisasi menentukan siapa yang membuat kebijakan isi, siapa yang harus melaksanakan dst. Termasuk di situ adalah apakah pemilik juga mempengaruhi isi media, apakah bagian niaga juga mempengaruhi isi media dst. Dalam kaitan ini, kedua surat kabar, yakni *Kompas* dan *Media Indonesia*, secara terus menerus selama 2 minggu memberitakan kasus kerusuhan di Temanggung meski tidak selalu berada di halaman depan. Menurut Wakil Pimpinan Redaksi *Kompas*, Trias Kuntjahjono, bila sebuah peristiwa diliput

secara konsisten selama lebih dari seminggu maka peristiwa tersebut dianggap sebagai kejadian yang masuk kategori besar dan terus diperhatikan. Dapat dipahami, sebuah peristiwa sulit bertahan lama di halaman 1 kalau memang tidak penting. Dalam kasus kerusuhan di Temanggung, hal besar yang menjadi perhatian dan diperkirakan mengikat perhatian pembaca adalah: apakah Pemerintah, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para pembantunya, akan berani membuat keputusan untuk membubarkan berbagai ormas keagamaan yang cenderung anarkistis. Peneliti menduga isu terkait kerusuhan di Temanggung (dan juga Cikeusik) dapat bertahan tentu atas putusan para pimpinan di redaksi, termasuk juga di bagian pemasaran (khususnya sirkulasi). Jika tidak hal-hal terkait peristiwa itu akan segera menguap.

Level Pengaruh Eksternal. Isi media juga dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berada di luar media, mereka itu bisa berupa: sumber informasi (nara sumber, Humas perusahaan dll), sumber penerimaan keuangan (pemasang iklan, khalayak), berbagai lembaga lain (bisnis, pemerintah, LSM, agama), situasi ekonomi, juga perkembangan teknologi (misal internet). Dalam pandangan peneliti, bila mengamati liputan kedua surat kabar dalam kasus kerusuhan di Temanggung, tampak kedua media tersebut sangat independen dan bebas menyuarakan hal-hal yang menjadi aspirasi dan sikap redaksi. Menurut Wakil Pemimpin Redaksi *Kompas*, Trias Kuntjahjono, pihaknya berusaha konsisten yakni mengutamakan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), sehingga mendukung tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok anarkistis, sebab kalau negara tidak berani menindak mereka, maka kesimpulannya adalah Indonesia menuju sebuah negara gagal. Sehingga *Kompas* lebih suka memakai framing negara gagal ketimbang bubarkan ormas anarkistis, karena negara gagal adalah akar masalahnya mengapa aparat negara tidak berani menindak ormas-ormas antitoleransi itu.

Demikian pun pandangan dari Pemimpin Redaksi *Media Indonesia*, Usman Kansong, bahwa surat kabarnya memakai istilah negara gagal, karena negara terbukti gagal menciptakan rasa aman terhadap masyarakat, negara gagal melindungi umat yang minoritas jumlahnya, bahkan negara melakukan pembiaran

terhadap berbagai aksi kekerasan tersebut. Namun, dalam membuat framing *Media Indonesia* lebih mengusung tema bubarkan ormas anarkistis, yaitu mengacu kepada kelompok Islam garis keras, yang karena aksi-aksi mereka yang brutal itu seharusnya negara membubarkan mereka. *Media Indonesia* juga mengacu pada ucapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional, 9 Februari 2011, di Kupang, bahwa kalau ada ormas yang anarkistis agar dicarikan cara untuk dibubarkan. Sayangnya, ucapan presiden itu sekadar basa-basi (*lips servive*) atau pun pencitraan, sehingga wacana pembubaran berbagai ormas anarkistis berkedok agama itu tak lebih dari langkah pencitraan, karena nyatanya hal itu tidak pernah terjadi. Dalam hal ini pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi isi pemberitaan, kedua surat kabar tampak tidak merasa khawatir akan ditinggalkan para pembaca yang diyakini sebagian besar umat Islam meski pemberitaan mereka diarahkan pada dorongan kepada Pemerintah untuk berbuat tegas.

Level Ideologi. Ideologi dalam pengertian ini adalah sebuah mekanisme simbolik yang berperan sebagai faktor pengikat dan perekat dalam masyarakat. Ideologi itu dapat berupa seperangkat nilai-nilai dan keyakinan, dan melaluinya masyarakat melihat dan menilai dunia dan dari situ kita bertindak. Ideologi bukanlah sesuatu yang berada pada level individu, melainkan ada di tingkat masyarakat, atau sebuah *total structure*. Dalam praktek, ideologi ini berpengaruh misalnya ketika sebuah media berusaha mendelegitimasi kelompok lain yang tidak seideologi dengannya. Dengan pengertian tersebut, maka baik *Kompas* maupun *Media Indonesia* sama-sama mengusung ideologi mereka yakni menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, demokratisasi, menentang diskriminasi dan persekusi, dan mendorong wartawan bersikap adil serta melindungi terhadap semua warga negara, tanpa peduli apa agama dan keyakinannya. Maka dalam analisis terlihat bahwa baik *Kompas* maupun *Media Indonesia* sama sekali tidak terpengaruh oleh lingkungan di luar yang cenderung menjadi semakin konservatif, mereka tetap konsisten dengan sikap dan keyakinannya.

5.1.2. Skema Dalam Hardnews

Dari hasil analisis data dan membandingkan bagaimana kedua surat kabar, yakni *Kompas* dan *Media Indonesia* membuat pemberitaan sehari setelah kerusuhan di Temanggung (yakni 9 Februari 2012), maka dapatlah dikatakan bahwa kedua surat kabar belum keluar dari pakem bahwa peristiwa yang terjadi sehari sebelumnya itu, dan telah diberitakan secara meluas di berbagai stasiun televisi, media online dan radio, ternyata tetap diperlakukan sebagai *breaking news* sehari kemudian. Dalam pandangan peneliti pendekatan seperti ini tidaklah menguntungkan bagi perkembangan dunia persuratkabaran di Indonesia karena memperlihatkan belum berkembangnya kemampuan menampilkan informasi yang lebih dalam dan interpretatif.

Secara umum *interpretative reporting* atau peliputan interpretatif adalah sebuah bentuk liputan oleh wartawan mengenai suatu bidang tertentu yang khas (ekonomi, politik, hukum, lingkungan, agama dll) dan dalam laporannya disampaikan makna dan konteks kepada sidang pembaca. Tidak ketinggalan dirmasukkan juga berbagai hasil riset, latar belakang sejarah, wawancara dengan pakar dll. Jadi laporan itu dibuat setelah mempertimbangkan dengan masak dan menganalisis sebuah gagasan, lalu mengumpulkan berbagai data yang diperlukan, agar mengena dengan konteks yang dikehendaki demi memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada publik. Sehingga dalam *interpretative reporting* terkandung seperangkat fakta yang ditambahi analisis ketimbang sekadar laporan biasa (4W). Dalam *interpretative news* sidang pembaca diajak untuk melihat sesuatu kejadian secara berbeda (How+Why) ketimbang sekadar membaca fakta yang biasa. Contoh di bawah ini dapat menjelaskan:

Penulisan Berita Biasa	Penulisan Berita Interpretatif
<p><i>Presiden SBY, di Wasior, Papua Barat, Kamis (14/10/2010) menyampaikan pesan bahwa bencana banjir bandang dan longsor yang menewaskan ratusan jiwa itu bukanlah akibat pembalakan liar. (faktual)</i></p>	<p><i>Fakta itu diperkaya makna yang menguraikan apakah presiden selain mau mengunjungi para korban, juga khusus hendak membantah tuduhan ada pembalakan liar di situ (atas perintahnya, pada 2005 kawasan itu masuk dalam Operasi Hutan Lestari II memberantas illegal logging), mengapa dia tidak memerintahkan investigasi?.</i></p>

Dalam laporan kerusuhan sehari setelah peristiwa itu, dapatlah dikatakan baik *Kompas* maupun *Media Indonesia* belum melaporkan kejadian itu secara interpretatif dan masih dikategorikan sebagai berita biasa, padahal keduanya sudah mengembangkan skema masing-masing. Dalam membuat framing, *Kompas* sangat baik menyusunnya dan terasa betul ada kesengajaan untuk menyatakan Pemerintah telah gagal memberikan perlindungan kepada warga negaranya, dan sekali ini terbukti terjadi lagi di Temanggung. Sementara di *Media Indonesia*, framing itu kurang terasa karena cenderung melaporkan rentetan peristiwa secara kronologis dan dramatis. Dalam pandangan peneliti, pemberitaan kedua surat kabar akan menjadi lebih sempurna bila ada sejumlah redaktur yang punya kekhususan menangani masalah-masalah besar yang terkait dengan agama, dan itu menyangkut aspek sosial, politik maupun ekonominya.

5.1.3. Framing dalam Feature

Untuk mendampingi berita keras tentang kerusuhan di Temanggung, *Kompas* dan *Media Indonesia* sama-sama membuat feature, dengan demikian hal itu memperlihatkan para pengelola di kedua surat kabar paham peran feature dalam liputan sebuah kejadian, bedanya, feature di *Kompas* diletakkan di halaman 1,

sementara di *Media Indonesia* ditempatkan di halaman 2, yakni halaman Hukum dan Politik di bawah rubrikasi Amuk Massa. Dari data di Tabel 1 pada Bab V telah nyata bahwa di kedua surat kabar feature tidak diberi porsi yang besar, meski keberadaannya penting. Secara relatif *Kompas* memberi porsi 11% (3 item), dan *Media Indonesia* memberi porsi 5% (2 item) untuk feature/softnews, maka dapatlah dikatakan porsi itu tidak cukup besar dan dominan, dan hal ini sangat disayangkan. Mengingat laporan feature/human interest pada umumnya lebih kuat dan ekspresif untuk menggambarkan sebuah kejadian dengan sentuhan *human interest* dengan harapan akan member dampak yang lebih dramatis. Kekuatan feature antara lain berada pada deskripsi peristiwa, penyampaian opini dapat disamakan, wartawan juga dapat memasukkan emosinya sendiri, dan bisa menghibur. Lebih-lebih, feature sangat mudah untuk dikembangkan menjadi *interpretative news* yang sifatnya lebih analisis lagi.

Dan telah disebutkan sebelumnya, di tengah dunia yang dikuasai oleh berbagai informasi di internet dan berbagai *breaking news*, maka kekuatan surat kabar terletak pada analisis dan interpretasinya terhadap berbagai persoalan. Dunia persuratkabaran di Indonesia membutuhkan lebih banyak karya-karya dengan gaya gaya bertutur dan lebih bermuatan “analisis” dalam upaya bersaing dengan informasi di media digital dan media sosial yang sangat mengandalkan kecepatan namun mengabaikan keakuratan dan kedalaman. Pembaca surat kabar lebih membutuhkan konteks, informasi latar (*background*) atau menjelaskan apa yang terjadi di belakang layar, berbagai prediksi, bahkan juga menyimpulkan. Memang, dalam banyak kasus kebutuhan akan konteks dan latar belakang tersebut dapat dipenuhi dengan menyediakan infografik, diagram, chart dan tabel. Namun tetap feature punya daya tarik dan kekuatannya sendiri.

Disayangkan kedua surat kabar tidak memperlakukan feature mereka dengan optimal. Misalnya di kedua surat kabar ending tidak diperlakukan dengan baik, padahal dalam dunia jurnalistik *ending* sebuah feature tidak kalah pentingnya dengan lead, dan ia diberi sebutan *punchline* (paragraph yang memberi “pukulan atau hantaman”), dengan harapan feature tidak diakhiri dengan sesuatu yang datar-datar saja melainkan berkesan dan diingat lama oleh pembaca. Maka untuk sebuah

framing, ending adalah tempat yang tepat, dan itu tidak dimanfaatkan. (Tankard, 2001, hal. 101).

Bisa jadi feature yang dibuat oleh kedua surat kabar tidak dalam kerangka mendukung framing yang sedang dibuat yakni “negara gagal melindungi warga negara”, namun bila itu kasusnya sangatlah disayangkan. Namun, apabila itu terkait dengan kompetensi wartawan yang ada di lapangan (dalam kasus ini wartawan daerah) maka menjadi kewajiban para editor menulis ulang (*rewrite*) dan membuatnya menjadi bagian dari proses framing. Bila hal itu tidak dilakukan, maka sebenarnya sangat disayangkan dan hal itu dapat dikategorikan sebagai framing yang tidak tuntas.

5.1.4. Framing dalam Tajuk Rencana

Haruslah diakui, tajuk rencana yang dibuat oleh *Kompas* maupun *Media Indonesia* sama-sama kuat dan bagus, dan secara tegas menyatakan posisi kedua surat kabar terhadap kasus kerusuhan di Temanggung, atau tindakan-tindakan lain yang diskriminatif, melanggar HAM dan merendahkan sesama rakyat dan warganegara Indonesia yang beragama. Dengan demikian melalui editorial mereka kedua surat kabar berhasil mengekspresikan sikap dan pandangan pengelola media tersebut terhadap sebuah isu atau kejadian. Dan sudah jelas tajuk rencana/editorial tidak boleh ditulis oleh wartawan biasa, karena pada umumnya para penulisnya adalah para wartawan senior yang ada di media itu bisa pemimpin umum, pemimpin redaksi, redaktur pelaksana atau wartawan senior yang memang paham ideologi media tersebut. Orang-orang berpengalaman itu diharapkan melalui tajuk rencana mereka mampu mengajak para pembaca untuk berpikir seperti pikiran mereka yang tertulis dalam editorial itu, atau merupakan bagian untuk mempengaruhi pendapat umum, menyampaikan pandangan yang kritis. Atau mengajak pembaca untuk melancarkan sebuah aksi.

Pada kedua surat kabar, tajuk rencana yang mereka buat itu, sedikit banyak satu nada dengan berita utama di halaman 1, karena sesungguhnya berita dan artikel lainnya harus menyesuaikan dengan tajuk rencana.

5.1.5. Memunculkan Konteks dalam Pemberitaan

Satu hal yang penting dan kurang dimunculkan dalam penulisan hardnews atau pun feature yang dianalisis dalam penelitian ini adalah penempatan persoalan dalam konteks yang tepat. Apakah yang dimaksud dengan konteks itu? Dalam Kamus *Webster's New World College Dictionary* (1996) kata konteks ditulis dengan *context* yang artinya: (1) *the parts of a sentence, paragraph, discourse etc. immediately next to or surrounding a specified word or passage and determining its exact meaning;* atau (2) *the whole situation, background, or environment relevant to a particular event, personality, creation etc.* Artinya sebuah konteks menjelaskan seluruh situasi latarbelakang atau pun lingkungan yang relevan dengan sebuah kejadian, kepribadian, kreasi dst. Mengenai konteks ini ada baiknya kita meminjam elemen ketujuh dari sembilan elemen jurnalisme yang disusun oleh Committee for Concerned Journalist yakni wartawan harus membuat hal yang penting menjadi menarik dan relevan, salah satu pendekatan untuk itu adalah bagaimana menghubungkan berita pada tema yang lebih dalam yakni penyingkapan. Penyingkapan yang terbaik adalah bila sebuah berita berhubungan dengan tema tertentu yang tak terduga dan lebih dalam. Tema-tema itu tidak dinyatakan oleh wartawan tapi diperlihatkan atau disingkap. Dengan cara apa wartawan menyingkapkannya, melalui kutipan yang tepat, gambar yang tepat dst. “Berita yang bagus membawa anda sampai pada kebenaran; mereka tidak menceritakan kebenaran kepada anda,” kata John Larson, koresponden *NBC News*. (Bill Covach dan Tom Rosenstiel, 2001, hal, 187 – 205).

Dalam mencoba memahami sebuah persoalan, konteks menjadi penting karena hal itu merupakan pengakuan bahwa sebuah “masalah” itu merupakan sesuatu yang kompleks dan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan maupun faktor-faktor eksternalnya. Sebuah masalah, persoalan, atau konflik, pada dasarnya adalah kumpulan berbagai interaksi yang tidak sempurna antara satu dengan lainnya. Dengan demikian, meminjam konsep yang dikembangkan oleh pakar *system thinking* Kambis E. Maani, bahwa sebuah persoalan selalu punya banyak dimensi

dan keruwetannya sehingga memahami konteks menjadi sangat penting dalam upaya memecahkannya (Maani dan Cavana, 2007, hal, 39), atau dalam hal peliputan berita memahami konteks sangat diperlukan dalam upaya memahami esensi persoalan. Tanpa pemahaman terhadap konteks, sebuah peristiwa akan dilaporkan begitu saja sebagai rentetan kejadian, tanpa kedalaman.

Dalam peliputan kerusuhan di Temanggung itu, ada dua hal yang kurang diungkap oleh wartawan *Kompas* maupun *Media Indonesia*, yakni, pertama, menggali lebih jauh siapa sosok KH Syihabuddin dan motif atau ajaran apa yang membuatnya memprovokasi para santri dan pengikutnya untuk berunjukrasa di setiap proses persidangan demi menuntut hukuman mati. Kedua, mengapa para aparat keamanan, khususnya anggota Polri, tidak berani bertindak represif terhadap para perusuh. Upaya menyingkap kedua hal itu adalah upaya untuk memahami konteks persoalan, dan dapat menjelaskan mengapa proses persidangan di PN Temanggung itu kemudian berkembang menjadi kerusuhan dan perusakan/pembakaran tiga buah gereja dan sebuah sekolah Kristen.

Sebagaimana kita tahu, dalam sejarah modern fatwa hukuman mati yang melewati batas negara (bersifat internasional) kepada orang yang menista (*blasphemy*) agama Islam dikeluarkan oleh tokoh spiritual Iran, Ayatollah Khomeini, pada awal 1989 kepada penulis Inggris, Salman Rushdie, yang menulis buku *Satanic Verses* (Ayat-Ayat Setan). Dalam fatwanya tersebut, dia menyebutkan menjadi kewajiban bagi Muslim untuk memburu dan mengeksekusi Rushdie karena tindakannya menghina dan mencemarkan agama Islam. Akibatnya, Rushdie harus bersembunyi, dan selalu berada di bawah perlindungan aparat keamanan selama hampir satu dekade. Sementara itu, penerjemah buku novelnya yang berkewarganegaraan Jepang terbunuh, penerjemah lainnya dan para penerbitnya juga mengalami tindak penyerangan, dan toko-toko buku Amerika serta sebuah hotel di Turki dilempari bom molotov. Meski telah ada kesepakatan antara pemerintah Inggris dan Iran untuk mengakhiri kasus Salman Rushdie, dan dia sudah berani keluar dari persembunyiannya, tetap ada elemen-elemen di Iran yang menilai fatwa mati untuknya belum berakhir dan hal itu masih berlaku. (Marshall and Shea, 2011, hal. 177)

Kasus lain yang memicu kerusuhan global dan merenggut nyawa ratusan nyawa jauh dari asal muasal persoalan, terkait dengan pembuatan kartun Nabi Muhammad di Denmark. Pemuatan kartun Nabi Muhammad yang dinilai menista agama Islam itu pertama kali terjadi di surat kabar Jyllands-Posten pada September 2005. Namun, kerusuhan yang terjadi setelah pemuatan itu baru terjadi pada Februari 2006, atau lima bulan setelah pemuatannya untuk pertama kali. Pada 10 Februari 2006, puluhan atau ratusan ribu umat Muslim di Afrika, Asia, dan Timur Tengah melancarkan aksi protes usai sholat Jumat menentang pembuatan kartun yang dinilai menghina tersebut. Berbagai aksi protes itu ada yang damai, ada pula yang rusuh, dan di seluruh dunia sebagai dampak aksi penistaan agama Islam itu, ada 241 nyawa melayang di seluruh dunia. (Marshall and Shea, 2011)

Di Indonesia, kasus-kasus yang terkait penistaan agama dan memicu kerusuhan bukan hanya sekali terjadi. Misalnya saja, pada 2009, Wilhelmina Hole, seorang guru yang beragama Kristen di Seram, Maluku, dituduh menghina agama Islam ketika mengajar di kelas enam. Salah seorang siswa mengadu kepada orangtuanya bahwa gurunya menghina agama Islam, dan berkembanglah desas-desus di kalangan komunitas Muslim mengenai penistaan agama ini. Akibatnya pecah kerusuhan antara agama di Seram, dimana 67 rumah terbakar, termasuk sejumlah gedung gereja dan sebuah klinik kesehatan. Dalam kasus ini Wilhelmina Hole, dan seorang tokoh Muslim Asmara Wasahua, ditangkap dan diadili karena telah memicu kerusuhan. Wilhelmina didakwa melanggar Pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. (Marshall and Shea, 2011). Dan kasus-kasus sejenis dapat ditemukan dalam satu atau dua dekade belakangan ini, yang memperlihatkan ada gejala radikalisme di kalangan tertentu umat Islam, termasuk yang berpandangan seperti KH Syihabuddin bahwa hukuman mati adalah yang paling tepat untuk siapa pun yang dianggap telah menghina Islam.

Dalam kasus rusuh di Temanggung, dan dari berkas-berkas persidangan yang didapat peneliti, ternyata banyak dari para terdakwa yang divonis karena terlibat dalam rusuh 8 Februari 2011 tersebut hanyalah ikut-ikutan dan mengikuti saja arahan dari KH Syihabuddin untuk ikut dalam aksi protes atas vonis 5 tahun terhadap Antonius Richmond Bawengan, terdakwa kasus penistaan agama Islam.

Hal ini yang tidak banyak digali pada awal-awal kerusuhan itu pecah, padahal kedua surat kabar menilai peristiwa ini besar dan penting. Fenomena yang terjadi di Temanggung ini adalah salah satu wujud terjadinya konservatisme dan radikalisme yang sangat cepat dalam masyarakat Muslim di Indonesia selama dua dekade terakhir ini. Apa penyebabnya, banyak teori dan penjelasan mengenai hal itu, namun peneliti hanya mau meminjam pemikiran mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Dr Ahmad Syafii Maarif bahwa maraknya fundamentalisme di Nusantara lebih disebabkan oleh kegagalan negara mewujudkan cita-cita kemerdekaan berupa tegaknya keadilan sosial dan terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Korupsi yang menggurita adalah bukti nyata dari kegagalan tersebut. Dan bagi kaum fundamentalis, untuk menegakkan keadilan itu cara pintas untuk menegakkan keadilan itu adalah dengan melaksanakan syariat Islam melalui kekuasaan. (KH Abdurahman Wahid ed., 2009, hal, 9). Penjelasan mengenai background sebuah kejadian akan sangat membantu masyarakat memahami konteks bahwa upaya kaum radikal untuk “menyeragamkan” Indonesia yang sangat majemuk akan berdampak pada diskriminasi, persekusi, pelanggaran HAM bagi kaum minoritas.

Penjelasan mengapa polisi tidak berani bertindak represif terhadap kaum anarkistis, tidak didapat baik dari *Kompas* maupun *Media Indonesia*, padahal Kapolda Jawa Tengah ketika itu juga ada di Temanggung untuk memantau situasi dan para wartawan juga dapat diminta untuk menggali aspek ini. Penjelasan mengenai motif aparat kepolisian tidak berani represif dan tegas juga akan menolong polisi untuk bagaimana mengambil sikap yang tepat dalam situasi rusuh seperti itu. Mengenai hal ini, mantan Ketua Dewan Pers, Atmakusumah, menjelaskan bahwa pasca turunnya Soeharto, dalam kasus-kasus pers dimana ada media yang digruduk massa dan polisi diam saja sudah kerap terjadi. “Tetapi saya sangat setuju bila alat negara bertindak tegas dan keras terhadap mereka yang berbuat kekerasan terhadap masyarakat. Sebab, di era reformasi ini ternyata lebih

banyak kekerasan yang dialami oleh publik dan dibiarkan atau tidak dibela oleh polisi dan aparat negara,” katanya.²⁹

Misalnya, pada awal reformasi, ketika dia masih menjadi ketua Dewan Pers, *Radio Rasia* di Solo dalam sebuah diskusi hanya menghadirkan seorang pendeta Kristen. Akibatnya radio tersebut diprotes oleh Front Pemuda Islam Solo yang menuntut radio itu ditutup. Oleh polisi alat-alat milik Rasia diambil sehingga tidak bisa siaran, akhirnya kesepakatannya radio itu tidak siaran selama seminggu. Jelas dalam hal ini polisi telah melanggar kebebasan pers, dan alasan yang mereka kemukakan adalah hal itu demi menyelamatkan radio itu sendiri maka alat-alat siarannya diambil. Kemudian, harian *Sinar Indonesia Baru* (SIB) memuat karikatur orang yang sedang sholat di bulan puasa tapi sambil mengeritik dan menyindir. Akibatnya kantor SIB didemo oleh sekelompok massa. Oleh polisi bukan massanya yang dihalau, tetapi malah menginterogasi para staf SIB dan dicari-cari dimana gambar asli karikatur itu. Lalu rumah pemimpin umum SIB digeledah.

“Itu semua adalah contoh-contoh dimana dalam kasus pers atau kekerasan lainnya polisi sudah terbiasa bertindak dengan tidak melindungi korban kekerasan, malah menindas mereka, dengan alasan itu merupakan langkah preventif demi melindungi si korban itu sendiri. Sehingga dapat diperkirakan polisi memang takut kepada kaum radikal. Atau bisa jadi kaum radikal itu menjadi bagian dari tentara (atau polisi) untuk menakut-nakuti rakyat, setelah di era reformasi tentara tidak bisa lagi menekan rakyat seperti semasa Orde Baru. Jadi, kalau polisi hari ini tidak mau melindungi korban kekerasan itu bahkan mempersalahkan korban kekerasan, maka hal itu memang sudah menjadi pola kerja mereka,” katanya.³⁰

Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Hukum 2007-2009 (Wantimpres) Prof. Dr Adnan Buyung Nasution dalam bukunya *Nasihat untuk SBY* (diluncurkan akhir Mei 2012) menuliskan bahwa Republik Indonesia didirikan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

²⁹ Wawancara dengan Atmakusumah, Rabu, 30 Mei 2012, di kediamannya.

³⁰ Ibid

darah Indonesia, sehingga negara harus obyektif dan netral. Tidak boleh ada anak bangsa, apa pun agamanya, tersisihkan apalagi terdiskriminasi, dan haruslah dilindungi. Namun sangat disayangkan, setelah lebih setengah abad merdeka masih ada sekelompok anak bangsa yang diperlakukan diskriminatif, negara dengan segala perangkatnya nampak kurang berperan dalam memberikan jaminan perlindungan hukum dan hak-hak asasi manusia kepada rakyatnya. Dalam hal penegakan hukum, kerap korban ditempatkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan sedangkan pelaku kekerasan tidak dijamah oleh hukum, sehingga tidak terjadi efek jera.

Terkait dengan kasus-kasus kekerasan atas nama agama itulah, Wantimpres bidang hukum kemudian menggelar seminar mengenai masalah itu, dan hasilnya dijadikan rekomendasi untuk Presiden SBY. Di antara rekomendasi yang mencapai 12 butir, ada disebutkan bahwa supremasi hukum harus ditegakkan, dan pemerintah tidak boleh tunduk kepada kelompok milisi agama atau kelompok yang menggunakan agama sebagai alat kekerasan. Lalu aparat kepolisian harus menjunjung tinggi supremasi hukum, bertindak netral dan aktif, tanpa diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu, demi menjamin perlindungan terhadap setiap warga negara. (Adnan Buyung Nasution, 2012, hal. 108-123)

Pandangan-pandangan dari sejumlah tokoh tersebut hanya ingin menunjukkan ada persoalan dengan aparat kepolisian kita tatkala mereka harus berhadapan dengan kasus-kasus kekerasan yang bernuansakan agama. Apabila di kedua surat kabar tersebut memiliki unit riset yang kuat, atau ada seorang redaktur yang terus mengikuti berbagai perkembangan terkait konflik-konflik bernuansa agama di Indonesia maupun global, tentu konteks mengapa polisi tidak mampu bertindak tegas dapat segera dimunculkan dalam laporan-laporan yang dibuat. Dan hal itu akan sangat memperkuat framing yang dibuat.

5.2. Kesimpulan dan Saran

Sebuah media ketika membuat framing terhadap sebuah peristiwa atau gejala tentulah dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sesuai

dengan misi, visi dan ideologi media tersebut. Analisis framing terhadap *Kompas* dan *Media Indonesia*, terkait dengan pemberitaan mereka pada kasus di Temanggung yang terjadi pada 8 Februari 2011 lalu, yakni mulai dari penyerangan terhadap tiga properti milik umat Kristiani di Temanggung, sampai kepada proses hukum terhadap para pelaku kekerasan itu mendapati bahwa kedua surat kabar tersebut memang membuat framing dalam pemberitaan mereka. Tujuan yang ingin dicapai dari framing tersebut juga jelas: yakni meminta dan mendorong kepada Negara agar aparat keamanannya bertindak tegas dan adil dalam melindungi sesama rakyat dan warga negara dari tindak kekerasan yang diskriminatif dan melanggar hak-hak asasi manusia. Dan framing itu diwujudkan kedua surat kabar dalam dua bingkai: negara gagal melindungi warga negaranya, bubarkan ormas anarkistis. Penelitian ini mengungkapkan bahwa framing (pembingkai) yang dibuat oleh dua surat kabar mainstream, yakni *Kompas* dan *Media Indonesia*, pada berita, feature dan tajuk rencana dalam kasus kerusuhan di Temanggung dilaksanakan dengan baik, namun kurang memperhatikan konteks situasi yang berkembang di lapangan dan lingkungan.

Dalam kesimpulan peneliti, ada faktor-faktor teknis di kedua surat kabar itu sehingga framing yang mereka buat kurang kontekstual. Namun hal yang sangat baik adalah, meski ada kecenderungan terjadi konservatisme agama di lingkungan sosial, politik, ekonomi (eksternal) pasca kejatuhan Orde Baru, namun di kedua surat kabar tersebut hal itu belum berdampak, mereka masih tetap menjunjung nilai-nilai kebersamaan sebagai bangsa yang majemuk. Dari hasil analisis framing terhadap kedua surat kabar itu terkait kasus kerusuhan Temanggung, maka kesimpulan yang didapat dan saran yang diberikan adalah:

1. *Kompas* dan *Media Indonesia* konsisten dengan nilai-nilai dasar dan ideologi yang diyakini, khususnya menyangkut penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, penegakan hukum dan demokratisasi di Indonesia. Hal itu terwujud dalam framing yang dilakukan khususnya pada periode dua minggu pertama setelah pecah kerusuhan pada 8 Februari 2011. Keduanya mengangkat tema (salah satu atau keduanya) yakni “negara gagal melindungi warga negaranya” dan “bubarkan ormas anarkistis”,

tema-tema itu mewarnai pemberitaan mereka baik melalui berita keras (hardnews), feature/softnews, tajuk rencana, artikel-artikel opini, wawancara maupun tanggapan pembaca. Maka, demi mempertahankan nilai-nilai dasar dan ideologi surat kabar juga harus didukung dengan meningkatkan ketrampilan dan kompetensi untuk menjalankannya.

2. Dalam membuat pemberitaan ada kecenderungan di *Kompas* maupun *Media Indonesia* kurang mengoptimalkan peran feature/softnews atau pun bentuk-bentuk pelaporan interpretatif (*interpretative reporting*) padahal apabila hal itu dikembangkan akan sangat kuat mengekspresikan hal-hal yang ingin dikemukakan oleh kedua surat kabar dalam upaya membangun pendapat umum untuk membela kemajemukan Indonesia. Juga, mengembangkan jurnalisme yang interpretatif atau pun investigatif yang mengedepankan kedalaman dan konteks menjadi tantangan ke depan bagi persuratkabaran di Indonesia agar dapat bertahan hidup (*survive*) di tengah gempuran perkembangan media digital dan mobile. Bagaimana pun surat kabar dapat dimasukkan dalam kategori media konvensional yang paling terancam eksistensinya di abad digital ini, dari sisi kecepatan ia sudah tidak mampu menandingi media digital dan mobile. Di tengah situasi itu, dalam analisis data terbukti bahwa baik *Kompas* maupun *Media Indonesia* sama-sama menyajikan berita yang sudah basi terkait kerusuhan di Temanggung, sepertinya kedua surat kabar melaporkan sesuatu yang belum diketahui oleh sebagian masyarakat (*breaking the news*), kenyataannya kejadian itu sudah diliput secara luas oleh berbagai stasiun televisi lengkap dengan gambar atau pun laporan pandangan mata, juga oleh berbagai media online, dan laporan audio oleh berbagai stasiun radio berita. Sebagai dua surat kabar nasional yang termasuk besar, sesungguhnya hal itu tidak boleh terjadi, selang waktu yang cukup panjang tentulah memungkinkan mereka membuat laporan berita yang jauh lebih baik dan maju atau *analytical* dan interpretatif.

3. Dalam penyajian berupa *hardnews* dan *feature/softnews* kedua surat kabar harus memperkuat penambahan unsur konteks dan latarbelakang peristiwa hal itu untuk menghindarkan agar laporan-laporan yang dibuat oleh para wartawan tidak menjadi sekadar laporan pandangan mata, kronologis, dan *compiling* pendapat. Ada baiknya upaya-upaya untuk menggali motif, dalam kasus ini para pelaku kerusuhan, maupun motif aparat keamanan yang enggan bertindak represif, diperkuat. Bila motif-motif tersebut berhasil digali akan membuat framing yang mereka buat berada dalam konteks yang tepat dan terkuaklah kerangka persoalan yang lebih besar dan mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Kemampuan untuk berpikir secara sistem (*system thinking*) ada baiknya dikembangkan di berbagai ruang redaksi (*newsroom*) berbagai media massa di Indonesia sehingga mereka dapat lebih baik lagi dalam menyikapi dan melaporkan sebuah kejadian dengan memahami relasi dan kompleksitas masalahnya, dengan demikian akan berkurang kecenderungan memberitakan semata dengan prinsip *bad news is a good news* dan berkembang pemberitaan yang menempatkan sebuah peristiwa dalam konteks yang lebih tepat dan relevan.
4. Dalam menangani pemberitaan sebuah isu yang tengah dibingkai terdapat kecenderungan *Kompas* dan *Media Indonesia* tidak konsisten mempertahankannya dalam suatu rubrik yang tepat dan sesuai dengan konteksnya. *Kompas* selain menempatkan pada halaman 1, kasus ini mendapat porsi di halaman Politik dan Hukum, lalu dimasukkan ke halaman Nusantara kalau kasusnya dirasa sudah mereda. Sedangkan *Media Indonesia* selain menempatkan laporan di halaman 1, juga menempatkan di halaman lain di bawah rubrik Amuk Massa, rubrik Politik dan Keamanan, serta rubrik Tanah Air. Dalam pandangan peneliti, penempatan-penempatan itu, sekalipun sporadis, akan menjadi lebih kuat dampaknya kalau kasus-kasus kerusuhan atas nama agama diberi nama rubrik atau kelompok sebagai Diskriminasi, Pelanggaran HAM, atau Persekusi maka proses framing itu akan berjalan dengan sangat efektif dan mengingatkan siapa

pun yang membaca bahwa itulah sebenarnya konteks berbagai kasus kekerasan atas nama agama di Indonesia. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa meski melancarkan upaya framing kedua surat kabar tidak tuntas menggarapnya.

5. Kasus-kasus kekerasan atas nama agama di Indonesia dan pembiaran kekerasan itu oleh aparat keamanan memperlihatkan bahwa lingkungan eksternal telah berubah menjadi semakin konservatif. Namun meski demikian, kedua suratkabar itu tetap teguh dengan nilai-nilai ideologi dan misi maupun visi mereka. Dalam analisis didapati bahwa kedua suratkabar tetap memberitakan secara proporsional dan tegas sikap mereka menentang kekerasan dan diskriminasi agama oleh sekelompok Islam konservatif. Padahal pada kedua suratkabar itu jumlah wartawannya seimbang antara yang Muslim dan non-Muslim. Juga tercermin bahwa kepentingan bisnis kedua suratkabar tidak terganggu atau ada kekuatiran bakal kehilangan pembaca karena sikap yang tegas itu, meski mereka berminggu-minggu menayangkan berita-berita terkait kerusuhan di Temanggung tersebut. Peneliti meyakini, sikap kedua suratkabar nasional itu dihargai oleh para pembaca mereka karena sebenarnya masyarakat yang mencintai perdamaian dan keharmonisan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara jauh lebih besar, mereka adalah *silent majority* yang enggan bersuara dan beraksi.
6. Dari hasil wawancara terindikasikan bahwa media massa di Indonesia memerlukan pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi untuk meliput keragaman (pluralitas) Indonesia baik dari sisi suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA). Berbagai konflik di Indonesia membuktikan bahwa faktor SARA masih sangat dominan sebagai penyebab konflik. Khusus untuk peliputan masalah-masalah agama, ada baiknya di masa depan dikembangkan sebuah keahlian mengenai bagaimana meliput agama-agama (*how to cover religions*) karena titik buta (*blind spot*) yang terjadi di ruang redaksi mengenai faktor agama

dan berbagai implikasi yang diciptakannya dalam relasi antar masyarakat yang majemuk akan berdampak besar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia dan keutuhan bangsa ini. Menurut Roberta Green Ahmanson, agama adalah salah satu akar konflik di dunia, sehingga sudah sepatutnya konflik-konflik atas nama agama diberitakan secara tepat. “*We need ot look for the story behind the story, the history and religion that created the present momen,*” katanya. (Marshall, Gilbert and Ahmanson, 2009, hal 159-171)

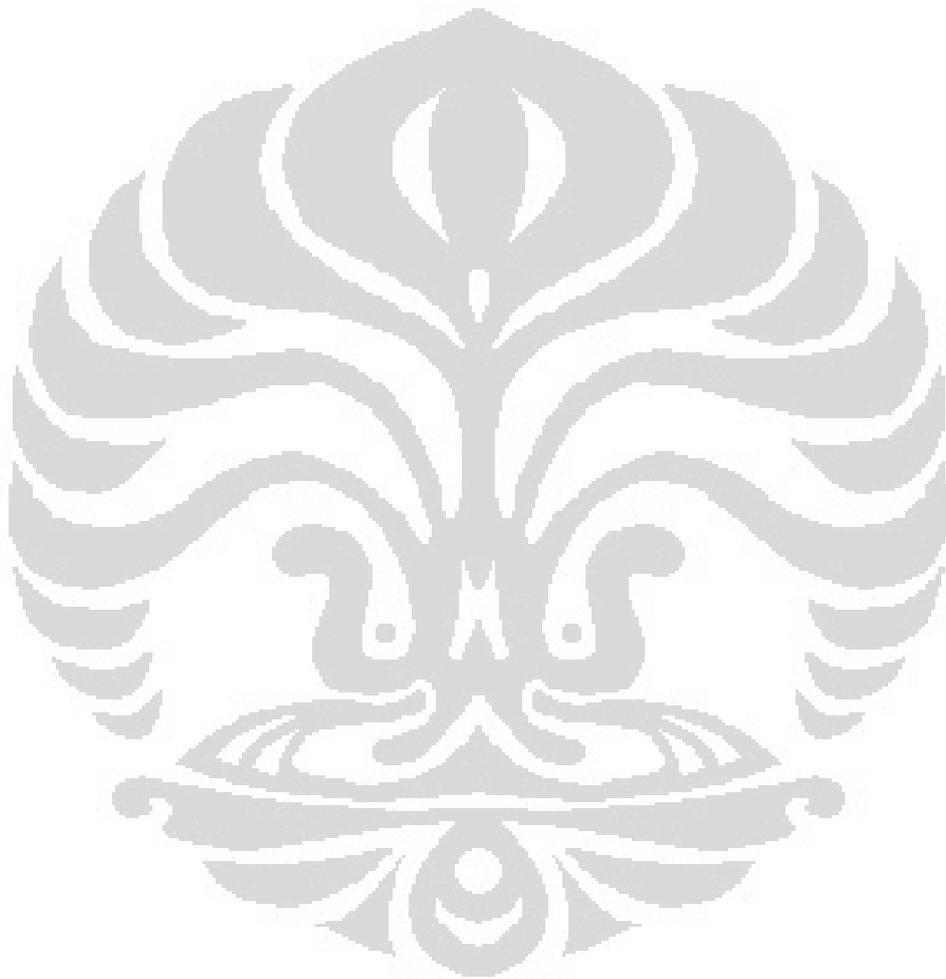


LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku dan Tesis:**

- Brooks, Brian S. et all, 1980, *News Reporting and Writing*, St. Martin's Press, New York.
- Brunken, Brigitte Lynn, 2006, Tesis Master, *Hurricane Katrina: A Content Analysis of Media Framing, Attribute Agenda Setting, and Tone of Government Response*, Louisiana State University.
- Burton, Graeme, 2009, *Media and Society Critical Perspective*, Rawat Publication, New Delhi.
- Entman, Robert M., 1993, "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm", *Journal of Communication* 43(4), Autumn, halaman 51 - 58.
- Eriyanto, 2007, *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, cetakan IV, LKiS, Yogyakarta
- Eriyanto, 2001, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, cetakan I, LKiS, Yogyakarta
- Eriyanto, 2003, *Media dan Konflik Ambon*, Radio 68H, Jakarta
- Fealy, Greag and White, Sally (eds). 2008, *Expressing Islam*, ISEAS, Singapore
- Hakim, Abdul dan Latif, Yudi eds, 2007 *Bayang-Bayang Fanatisme Esai-esai untuk Mengenang Nurcholish Madjid*, Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, 1st edition.
- Hill, David T, *Pers di Masa Orde Baru*, 2011, Yayasan Pustaka Obor dan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).
- Institut, Setara, 2008, *Berpihak dan Bertindak Intoleran*, Jakarta.
- Kovach, Bill, and Rosenstiel, Tom, 2004, *Elemen Elemen Jurnalisme – Apa yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan yang Diharapkan Publik*, Institut Studi Arus Informasi, edisi 2, Jakarta.

Louw, Eric, 2005 *The Media and Political Process*, 1st edition, Sage



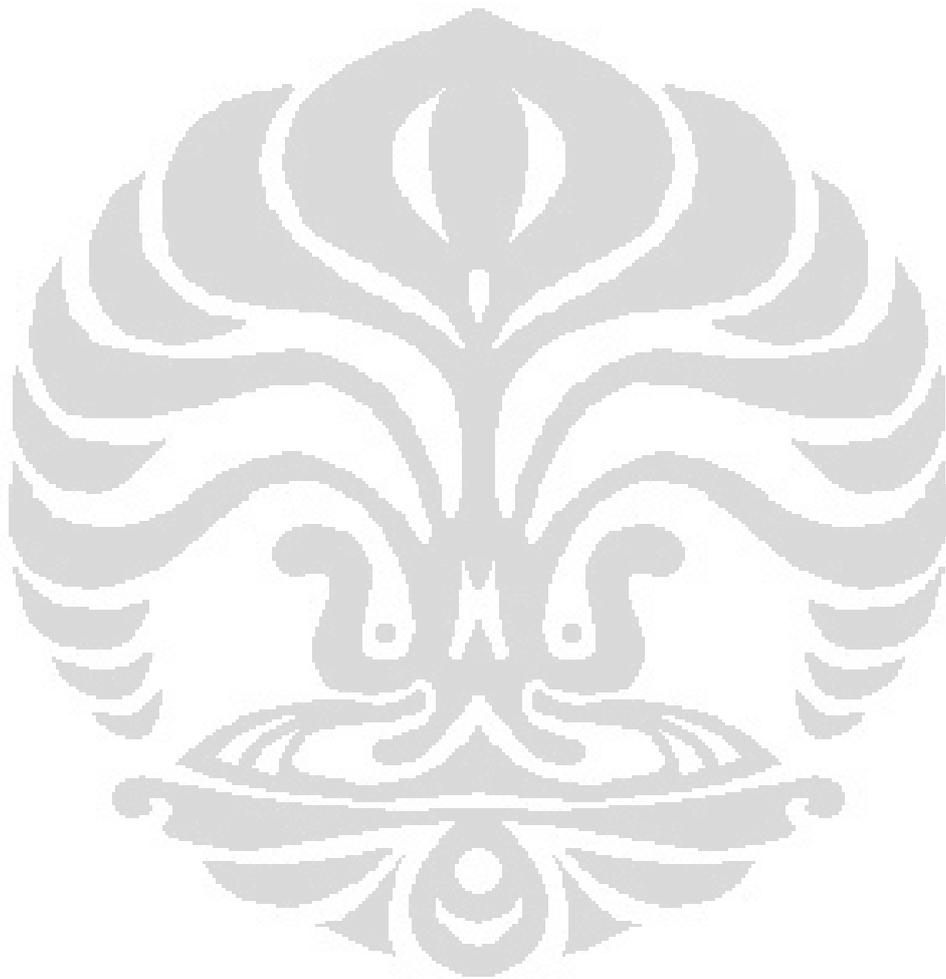
Universitas Indonesia 2012

LAMPIRAN

Publication.

- LP3ES, Tim Redaksi, 2002, *Politik Editorial Media Indonesia*, 2003, edisi I, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Maani, Kambiz E, and Cavana, Robert Y. 2007, *System Thinking, System Dynamics Managing Change and Complexity*, 2nd edition, Pearson Prentice Hall, New Zealand
- Maarif, Prof. Dr Ahmad Syafii, 2009, “Masa Depan Islam Indonesia”, dalam Wahid, KH Abdurrahman, *Ilusi Negara Islam*, LibForAll Foundation, Jakarta.
- Marshall, Paul. Gilbert, Lela (eds.), 2009, *Blind Spot When Journalists Don't Get Religion*, New York: Oxford University Press.
- Marshall, Paul, Shea, Nina, 2011, *Silenced How Apostasy & Blasphemy Codes are Choking Freedom Worldwide*, Oxford University Press, New York.
- McQuail, Dennis 2005. *McQuail's Mass Communication Theory 5th edition*, London: Sage Publications, 205.
- Mubarak, M. Zaki, 2007, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Nasution, Adnan Buyung, 2012, *Nasihat untuk SBY*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Jakarta
- Nugroho, Bimo. Eriyanto. Surdiasis, Frans, 1999 *Politik Media Mengemas Berita*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Neufeldt, Victoria ed., Guralnik, David B, 1996, *Webster's New World College Dictionary*, 3rd edition, Macmillan USA.
- Neuman, Lawrence, 2006, *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approachs 6th* , Pearson International Edition,
- Oates Sarah, 2008, “Terrorism and Media”, Kaid, Linda Lee dan Bacha, ChristinaHoltz (eds) *Encyclopedia of Political Communication Vol. 2*. Hal. 783-787.
- Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). “Framing analysis: An Approach to News

Discourse”, *Political Communication*, , 10 (1), halaman 55-76.



LAMPIRAN

- Patton, Michael Quinn, 1990, *Qualitative Evaluation and Research Methods* 2nd, Sage Publication.
- Shah, Timohy Samuel Shah and Toft, Monica Duffy, “God is Winning: Religion in Global Politics”, dalam Marshall, Paul et all (ed), *Blind Spot When Journalists Don't Get Religion*.
- Shively, W. Phillips, *Power and Choice: an Introduction to Political Science*, 3rd edition.
McGraw-Hill, Inc, New York, 1993.
- Siradjuddin, Effendi, 2009, *Memerangi Sindrom Negara Gagal Transformasi Indonesia 2020 Mencapai Negara Entrepreneur Maju*, Kata Hasta, Jakarta.
- Shoemaker, Pamela J., and Resse, Stephen D., 1996, *Mediating the Message: Theories of Influence Mass Media Content*, 2nd edition, Longman Publishers USA.
- Shoemaker, Pamela J., and Vos Tim P., 2009, *Gatekeeping Theory*, 1st edition, Routledge, New York and London.
- Smith, Michael Ray, 2005 *Feature Writing.Net – Timeless Feature Story Ideas in an Online World*, Epistelagic, Bloomington, Ill.
- Sularto, St ed., 2007 *Kompas Menulis dari Dalam*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, November 2007.
- Williamson, Daniel R., 1975, *Feature Writing for Newspapers*, Hasting House, New York.
- Wilson, Ian Douglas, 2008 “As long as it is Halal: Islamic Preman in Jakarta”, dalam Fealy Greag and Sally White, *Expressing Islam*, 192 – 210, ISEAS, Singapura.
- Zain, Drs Umar Nur, *Penulisan Feature*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993

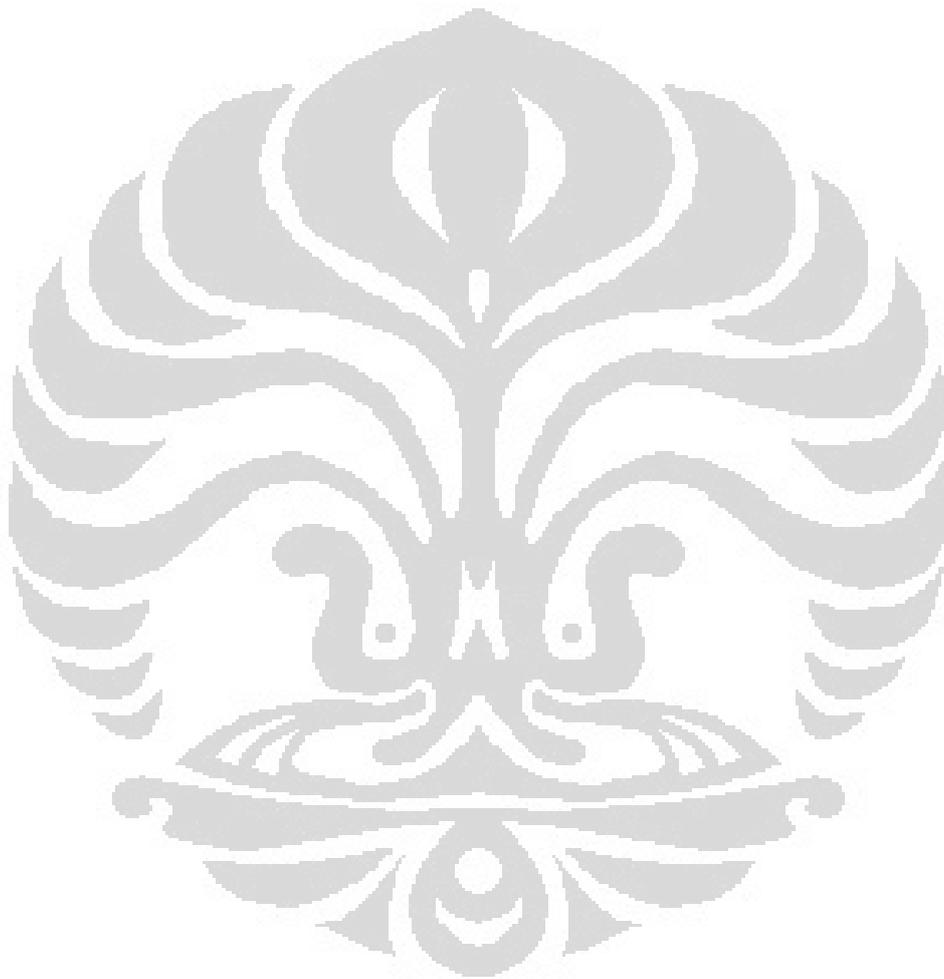
LAMPIRAN

B. Jurnal, Makalah:

- Baysha, Olga and Hallahan, Kirk, 2004, “Media Framing of the Ukrainian Political Crisis, 2000–2001”, *Journalism Studies*, Volume 5, Number 2, halaman. 233–246
- De Vreese, Claes H., 2005, “News framing: Theory and typology”, *Information Design Journal + Document Design* 13(1), 2005, halaman 51–62
- Gavilan, Teresa Nicolas, 2011, paper “Framing the News: From Political Conflict to Peace. How the ‘Framing Theory’ and the ‘Political Context Model’ can Enhance the Peace Journalism Model”,. Universidad Panamericana, Mexico, hal.1-13
- Harmon, Mark and Muenchen Robert, 2009, “Semantic Framing in the Build-Up to The Iraq War: Fox K, CNN, and Other US Broadcast News Programs”, *ETC January 2009*, halaman 12 – 26.
- K, Fisher, 1997, “Locating Frames in the Discursive Universe”, *Sociological Research Online*, Vol. 2, No. 3, <http://www.socresonline.org.uk/2/3/4.html>
- Kohlbacher, Florian, *Forum Qualitative Social Research*, Volume 7, No.1, Art. 21 – January 2006, “The Use of Qualitative Content Analysis in Case Study Research”, <http://www.qualitativeresearch.net/index.php/fqs/article/view/75/153>
- London, Scott, 1993, “How the Media Frames Political Issues”, this literature review was written in 1993 as part of a background study prepared for the Kettering Foundation.
- Pew Research Center, 24 Februari 2011, PEJ/Pew Forum Joint Release “Religion in the News: Islam Was No. 1 Topic in 2010,”
- Pintak, Lawrence and Setiyono Budi, “The Mission of Indonesian Journalism:

Balancing Democracy, Development, and Islamic Values”, *The International Journal of Press/Politics*, sagepublications.com, published online 20 December 2010.

Weaver, David H., 2007, “Thoughts on Agenda Setting, Framing, and Priming” *Journal of Communication* 57 (2007), hal. 142–147



LAMPIRAN

C. Koran:

Kompas, 9 Februari 2011
Kompas, 10 Februari 2011
Kompas, 11 Februari 2011
Kompas, 12 Februari 2011
Kompas, 13 Februari 2011
Kompas, 14 Februari 2011
Kompas, 16 Februari 2011
Kompas, 17 Februari 2011
Kompas, 18 Februari 2011
Kompas, 19 Februari 2011
Kompas, 21 Februari 2011
Kompas, 23 Februari 2011
Kompas, 12 Maret 2011
Kompas, 24 Juni 2011
Media Indonesia, 8 Februari 2011
Media Indonesia, 9 Februari 2011
Media Indonesia, 10 Februari 2011
Media Indonesia, 11 Februari 2011
Media Indonesia, 12 Februari 2011
Media Indonesia, 13 Februari 2011
Media Indonesia, 14 Februari 2011
Media Indonesia, 16 Februari 2011
Media Indonesia, 17 Februari 2011
Media Indonesia, 18 Februari 2011
Media Indonesia, 19 Februari 2011
Media Indonesia, 20 Februari 2011
Media Indonesia, 21 Februari 2011
Media Indonesia, 22 Februari 2011

LAMPIRAN

Media Indonesia, 24 Februari 2011

Media Indonesia, 26 Februari 2011

Media Indonesia, 28 Februari 2011

Media Indonesia, 2 Maret 2011

Media Indonesia, 8 April 2011

Media Indonesia, 20 Mei 2011

Media Indonesia, 10 Juni 2011

Media Indonesia, 15 Juni 2011

Media Indonesia, 13 Juli 2011

D. Website:

<http://icrp-online.org>, 24 Oktober 2011

[http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/02/10/163503-menyingskap-sosok-](http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/02/10/163503-menyingskap-sosok-antoniush-richmond-bawengan)

[antoniush-richmond-bawengan](http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/02/10/163503-menyingskap-sosok-antoniush-richmond-bawengan)

<http://www.sabili.co.id/indonesia-kita/buku-putih-kerusuhan-temanggung-sejuk.org>, Selasa, 15 November 2011

<http://www.suarapembaruan.com/home/2011-tak-ada-kemajuan-kebebasan-beragama/15051>.

Thejakartapost.com, 25 Agustus 2011.

Vivanews.com, 14 Februari 2011.

LAMPIRAN

Wawancara Usman Kansong - - Pemimpin Redaksi Media Indonesia

Bertempat di: Lantai 2 Kantor Redaksi Media Indonesia, Kedoya, Jakarta Barat

Hari/Tanggal: Selasa, 29 Mei 2012

Waktu: 09.30 – 10.30

Bagaimana Media Indonesia menyikapi dan memahami berbagai kekerasan yang bernuansa agama belakangan ini, termasuk kerusuhan di Temanggung Jawa Tengah, 8 Februari 2011, yang berujung pada perusakan dan pembakaran tiga buah gereja?

Terkait dengan berbagai kekerasan atas nama agama belakangan ini kami memahami bahwa ada kelompok tertentu yang menggerakkan berbagai aksi kekerasan tersebut, termasuk dalam kasus kerusuhan di Temanggung yang bermuara pada perusakan dan pembakaran tiga buah gereja. Kami meyakini mereka semua berasal dari jaringan dengan ideologi yang sama, termasuk dengan yang melancarkan aksi penyerangan terhadap anggota jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Provinsi Banten, dua hari sebelumnya. Kami berpandangan demikian karena dalam kasus kerusuhan di Temanggung sudah ada pemanasan untuk berbuat rusuh, yakni pada dua persidangan sebelumnya terhadap terdakwa kasus penistaan agama atas nama Antonius Richmond Bawengan, yang mana kami juga meliputnya. Jadi berbagai kekerasan itu adalah serangan terhadap pemikiran dan kelompok minoritas, apakah itu kasus penyerangan di Cikeusik terhadap jemaah Ahmadiyah, atau pun perusakan tiga gereja di Temanggung. Dalam kasus Temanggung, langkah kelompok itu tidak betul, seharusnya mereka menyerahkan kepada pengadilan untuk menghukum Antonius Richmond Bawengan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku kalau memang dirasa terdakwa bersalah, bukan memaksakan pemahaman mereka sendiri. Sedangkan dalam kasus jemaah Ahmadiyah, atau kasus Lia Eden, misalnya, Media Indonesia tidak melihat isi ajaran mereka, karena itu adalah buah

Universitas Indonesia 2012

LAMPIRAN

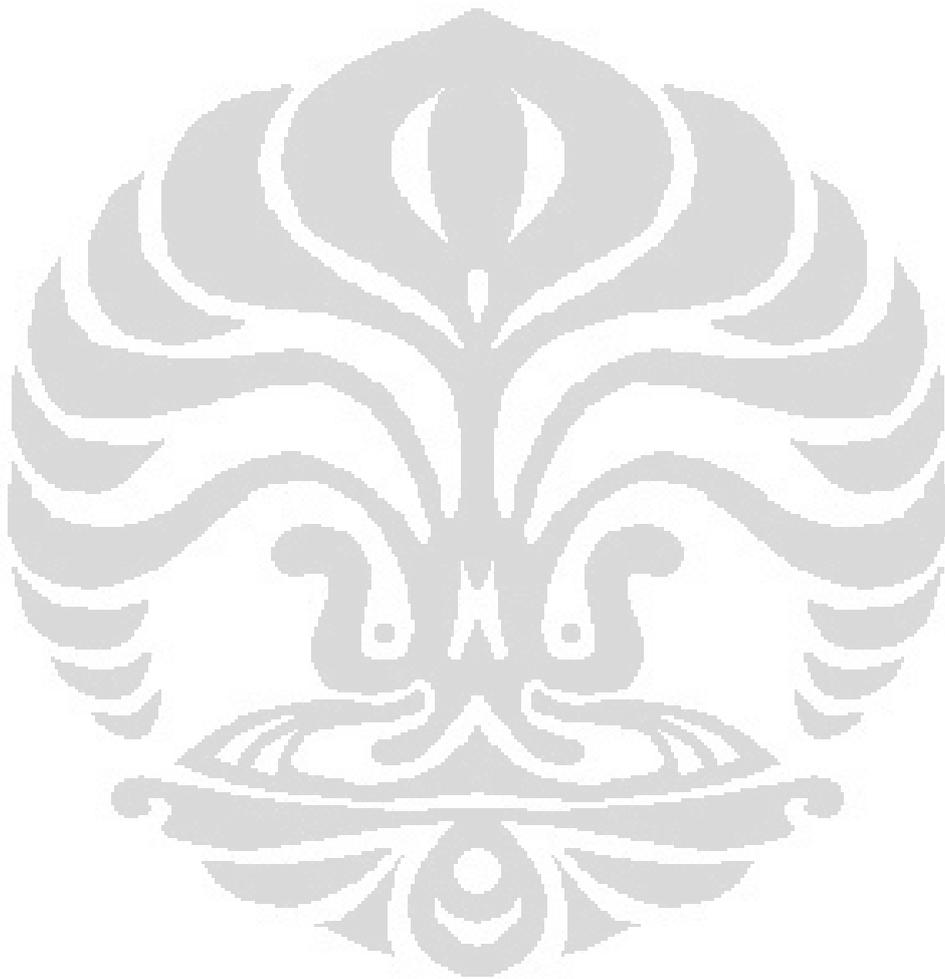
pikiran atau sebuah *ijtihad*, kalau ajaran mereka itu salah bukan berarti mereka yang merasa benar lalu bebas berbuat kekerasan.

Dalam kasus Temanggung, massa merusak tiga gereja yang sama sekali tidak terlibat dengan terdakwa kasus penistaan agama tersebut. Dan ketika kejadian, saya sedang berada di Kupang menghadiri Hari Pers Nasional (HPN) 2011, yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika mendengar kejadian itu saya perintahkan berita dari Temanggung dijadikan berita utama supaya menjadi perhatian semua pihak. Ketika itu kami memilih judul “Giliran Temanggung Rusuh” pada penerbitan tanggal 9 Februari 2011. Kami memilih kata “giliran” karena mencoba mengaitkan dengan penyerangan di Cikeusik, kami melihat ada benang merahnya yakni kekerasan oleh kelompok “mayoritas” terhadap “minoritas”. Artinya, meski para pelaku dipastikan kelompok minoritas di dalam Islam, namun secara konteks jumlah, maka agama Islam dipeluk oleh mayoritas rakyat di Indonesia.

Dalam pemberitaan kasus kekerasan atas nama agama, khususnya di Temanggung (dan Cikeusik) Media Indonesia memakai dua konsep framing yakni “negara gagal” dan “bubarkan ormas anarkistis” apa alasannya?

Kami memakai istilah negara gagal, karena negara terbukti gagal menciptakan rasa aman terhadap masyarakat, negara gagal melindungi umat yang minoritas jumlahnya, bahkan negara melakukan pembiaran terhadap berbagai aksi kekerasan tersebut. Sedangkan mengenai ormas anarkistis, itu mengacu kepada kelompok Islam garis keras, yang karena aksi-aksi mereka yang brutal itu seharusnya negara membubarkan mereka. Hal itu pun diucapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada HPN di Kupang, sehingga seharusnya negara membubarkan berbagai ormas anarkistis itu, namun sayangnya hal itu tidak pernah terjadi.

Dalam rangkaian pemberitaan kasus kerusuhan di Temanggung, Media Indonesia pada umumnya memilih narasumber dari pihak pemerintah



LAMPIRAN

atau mereka yang berpandangan mendukung pembubaran ormas anarkistis, apa pertimbangannya?

Kami secara sadar memilih narasumber dari tokoh-tokoh yang mendukung pembubaran ormas anarkistis, bahkan kami sama sekali tidak ingin memberi panggung kepada tokoh-tokoh kelompok radikal. Itu sebabnya kalau sudah berbicara kepada peraturan dan perundangan, maka kami mencari narasumber dari para pejabat pemerintah seperti menteri dalam negeri, misalnya. Sedangkan pengamat kami hubungi dalam upaya mencari pendapat yang sedikit berbeda, jadi walau tidak sempurna memberi perimbangan kami tidak mau memberi panggung kepada kaum radikal. Bahkan Majelis Ulama Indonesia pun kami jarang kutip, juga para *lawyer* kelompok radikal. Karena menyangkut pembubaran ormas anarkistis, kami tidak ingin ada perdebatan publik atau *public discourse* tampil dan terjadi di Media Indonesia, maka paling jauh kami mencari sumber pemerintah Mendagri, misalnya, sebagai pihak yang berbeda pendapat dengan kami.

Namun Media Indonesia tetap menampilkan respon dari publik dan pembaca dalam rubrik bedah editorial, misalnya, dan itu ada yang tidak sependapat dengan pandangan surat kabar?

Kami memang memberi kesempatan kepada publik untuk berbicara, namun itu dalam konteks interaksi melalui *social media*, tidak lebih. Dalam konferensi WAN IFRA (World Association of Newspaper and Newpublisher) saya mendapati bahwa surat kabar harus melibatkan interaksi dengan para pembaca melalui social media seperti facebook, email, twitter dan khusus untuk bedah editorial di Metro TV digunakan telepon. Itu semua merupakan kesadaran kami bahwa para pembaca juga harus terlibat dalam proses produksi konten. Sehingga dalam peliputan kami terhadap kasus kerusuhan di Temanggung pun masalah tersebut kami lemparkan ke publik, dan terus terang saja pesan-pesan yang kami pilih itu tidak harus yang sejalan dengan pendapat

LAMPIRAN

Media Indonesia, boleh memunculkan pendapat yang berbeda. Namun sejauh ini berbagai pandangan yang disampaikan itu yang sejalan dengan pandangan kami. Prinsipnya, komentar tersebut bukan fitnah, tidak memaki atau mengumpat, dan harus disampaikan secara sopan.

Apakah tidak ada kekuatiran tanggapan pembaca itu akan berpengaruh pada framing yang tengah dilancarkan?

Tidak, karena bedah editorial atau suara anda itu sifatnya hanya pesan-pesan singkat, narasinya pendek. Maka kami jarang mengizinkan ada komentar atau tanggapan dari pembaca terhadap pemberitaan yang kami muat di rubrik Surat Pembaca, karena ia bisa lebih panjang dan cenderung merupakan opini pendek. Karena itulah Surat Pembaca kami batasi dan prioritaskan hanya untuk layanan publik, misalnya jalan rusak atau pungli di penyeberangan feri, dan melayani hak jawab. Itu sebabnya kami memuat surat pembaca dari kantor Menko Polhukham yang merupakan hak jawab dari mereka terkait sebutan kami terhadap “negara gagal”. Kami juga tidak pernah menerima surat pembaca atau hak jawab dari FPI, FUI atau MUI, misalnya, karena biasanya mereka memilih mendatangi kantor redaksi ketimbang mengirimkan hak jawab. Dalam pengamatan saya untuk kasus Temanggung tanggapan dari pembaca tidak terlalu luas, mungkin sudah dihabiskan untuk kasus Cikeusik. (Dalam data ternyata ada sejumlah Surat Pembaca yang isinya pendapat mengenai kasus kerusuhan di Temanggung dan mendukung pandangan *Media Indonesia*, dan tidak ditemukan surat dari pembaca yang menentang sikap *Media Indonesia*)

Ketika memberitakan kasus kerusuhan Temanggung, Media Indonesia menempatkan laporan-laporan atau pun artikel dalam sejumlah halaman dan rubrik, misalnya di Rubrik Amuk Massa, Rubrik Nusantara dll. Apa pertimbangan penempatan dalam rubrik-rubrik tersebut, apakah tidak diperhitungkan nilai strategis penempatan-penempatan tersebut dan sekadar kebiasaan?

LAMPIRAN

Kami pada periode 2009-2011 menerapkan kebijakan kalau ada kasus besar, maka kasus tersebut boleh dijadikan nama rubrik. Misalnya rubrik Amuk Massa kami tempatkan di halaman Politik Keamanan. Peristiwa yang terus berlangsung lebih dari satu atau dua bulan akan kami putuskan untuk menjadi nama rubrik-rubrik khusus, misalnya Demo Buruh, Kenaikan BBM dst secara sengaja, karena secara jurnalistik kami ingin tuntas. Namun sejak 2012 kebijakan itu kami ubah dari generik ke spesifik, misalnya halaman Politik Keamanan tidak ada lagi, yang ada langsung nama rubriknya, misalnya Suriah, atau Lumpur Lapindo dll.

Mengapa kasus kerusuhan atas nama agama dan persekusi agama tidak dinamakan dengan rubrik “Pelanggaran HAM”, atau “Diskriminasi” yang saya rasa lebih kontekstual dan tegas ketimbang Amuk Massa?

Ya, anda benar, dan harus diakui hal itu memang merupakan kelemahan kami, karena di antara kami sendiri juga kerap tidak ada pemahaman yang sama mengenai esensi dan konteks sebuah peristiwa. Misalnya dalam insiden di Cikeusik semula teman-teman di redaksi sempat menggunakan kata “bentrok” untuk kasus tersebut yang sebenarnya lebih tepat disebut sebagai “penyerangan” terhadap rumah kaum Ahmadiyah. Atau pernah saya sendiri memindahkan foto para pengungsi jemaah Shiah di Madura yang diserang kelompok lain dari halaman dalam ke halaman depan, karena mereka tidak melihat foto yang dramatis itu sebagai hal yang penting dan menarik. Jadi memang pemahaman mengenai pelanggaran HAM atau diskriminasi belumlah merata.

Sebenarnya memang dalam pemberitaan kami harus menempatkan sebuah persoalan dalam konteks yang tepat, hanya saja kebijakan kami di *Media Indonesia* adalah konteks ditempatkan dalam halaman Opini, atau kolom para pakar.

LAMPIRAN

Seberapa penting Media Indonesia melihat peran feature dalam proses framing terhadap sebuah persoalan?

Sebenarnya kami melihat feature sangat penting, dan dalam kasus kerusuhan Temanggung kami juga menampilkan beberapa buah feature dengan perspektif jurnalisme damai. Namun persoalannya tidak semua wartawan kami, khususnya mereka yang berada di daerah kompetensinya terbatas, sehingga tidak semua memiliki kemampuan yang cukup baik untuk menulis feature apalagi dalam perspektif untuk membawa perdamaian.³¹

Mengapa Media Indonesia tidak secara tuntas meliput kasus di Temanggung itu sampai kepada vonis terhadap para pelaku kerusuhan, karena selama proses persidangan ternyata banyak terungkap mengenai motif maupun berbagai fakta mengenai latar belakang yang mendorong para pelaku tersebut berbuat rusuh?

Ya, kami terlewat mengenai hal itu, memang ada pemberitaan proses persidangan namun tidak komprehensif. Saya kira hampir semua media massa ada kecenderungan seperti itu, yakni tidak komprehensif ketika memberitakan sebuah kejadian, saya kira hal ini menjadi pekerjaan rumah buat kita semua yang bergerak di media. Para wartawan kita perlu lebih banyak dilatih dan ditingkatkan kemampuan mereka, termasuk untuk mencermati dan mengikuti sebuah kasus sampai tuntas.

Dalam melaksanakan misinya, ideologi apa yang dijunjung oleh Media Indonesia?

³¹ Dalam prakteknya, jurnalisme damai (peace journalism) mengemukakan sejumlah ciri seperti: informasi yang diberikan haruslah rinci dan berimbang, bukan semata pertentangan dan para aktor yang terlibat, namun juga penyebab-penyebabnya. Kemudian diungkapkan sejarah dan akar konflik itu, semua pihak yang terlibat diberi suara yang sama, juga diungkap betapa masyarakat umum yang tidak ada kaitannya dengan konflik ikt terkena dampaknya, menginformasikan bila ada kehendak-kehendak untuk bernegosiasi bagi sebuah upaya penyelesaian, dan di atas itu semua mengedepankan perdamaian sebagai sebuah solusi.

Pancasila adalah ideologi kami, dengan mengedepankan semangat kebangsaan, dan kami akan menjunjung empat pilar bangsa yakni Undang

LAMPIRAN

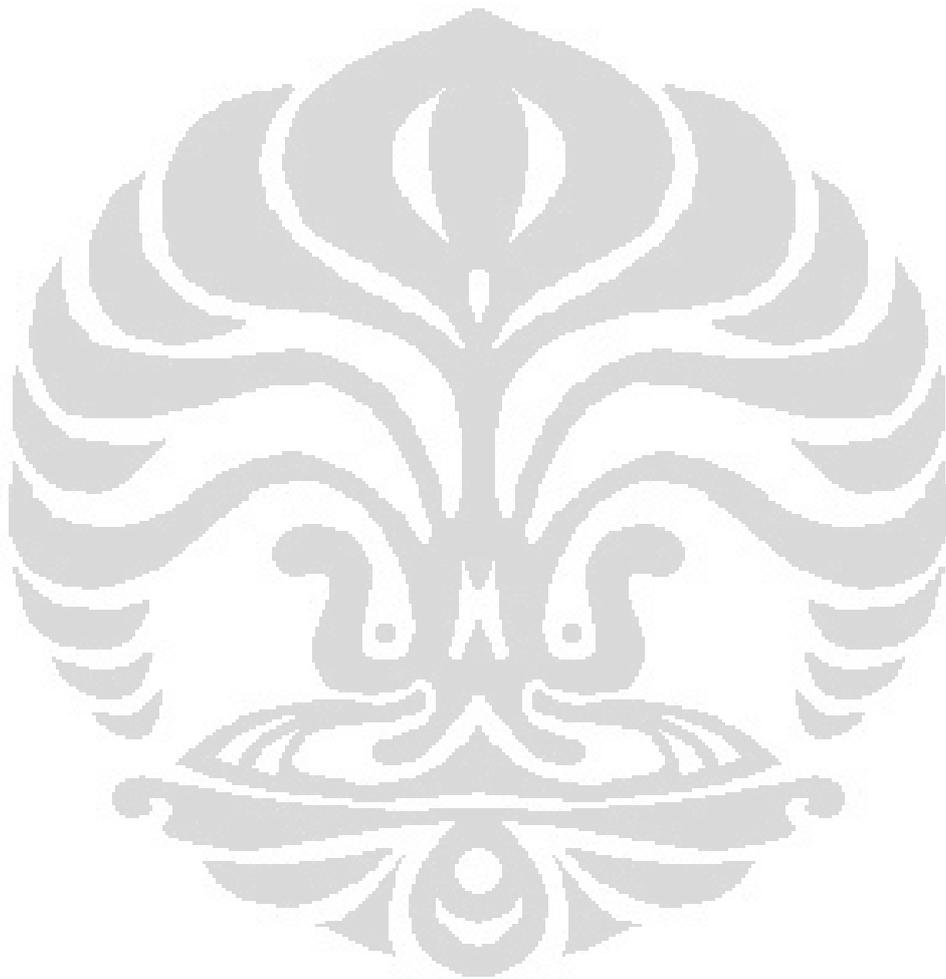
Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut kami itu yang menjadi benang merah kami dalam menjalankan misi surat kabar. Sehingga di ruang redaksi kami komposisi agama tidak menjadi masalah karena semua yang menjadi wartawan di *Media Indonesia* paham ideologi kami tersebut. Komposisi wartawan antara yang muslim dan non-muslim 50:50 namun itu tidak berpengaruh pada sikap kami. Maka dalam pemberitaan kami menyangkut konflik-konflik bernuansa agama, bila terjadi pemakaian konsep atau istilah yang tidak sesuai segera dikoreksi. Misalnya dalam kasus kekerasan di Cikeusik sempat wartawan kami memakai istilah “bentrok” yang segera kami koreksi dengan “penyerangan” karena kedua kata itu secara makna sangatlah berbeda.

Apakah Media Indonesia merasa perlu mendidik para wartawannya dengan pemahaman mengenai “bagaimana meliput peristiwa keagamaan”?

Pertama-tama mengenai isu keagamaan kami tidak akan pernah menjadikan agama sebagai sebuah rubrikasi khusus di surat kabar kami, karena kalau itu terjadi maka setiap hari Jumat kami harus memuat mengenai khotbah Jumat untuk agama Islam atau kalau hari Minggu harus memuat khotbah Minggu untuk yang beragama Kristen dst. Karena itu isu-isu agama kami masukkan dalam rubrik lain, misalnya politik keamanan, kalau hal itu terkait ritual kami masukkan dalam rubrik humaniora dst. Misalnya kasus pembahasan RUU Halal, maka itu kami masukkan dalam rubrik humaniora.

Lalu soal melatih wartawan spesialis agama, sejauh ini kami tidak melakukan hal itu, pertama karena pelatihan mengenai hal itu di luar juga tidak banyak, atau kalau ada workshop mengenai konflik-konflik agama kami akan kirim salah seorang staf untuk hadir dan meliputnya sekaligus. Sedangkan di dalam, kami juga belum pernah mengadakan pelatihan khusus mengenai

bagaimana meliput isu-isu keagamaan. Saya sendiri sadar bahwa meliput isu-isu agama bukanlah hal yang mudah dan perlu keahlian khusus.



LAMPIRAN

Dalam kasus kerusuhan Temanggung, apakah Media Indonesia menilai misinya telah berhasil khususnya dengan framing yang dibuatnya?

Kami tidak melihat framing yang kami buat cukup berhasil, karena sepertinya Pemerintah sudah kebal terhadap kritik, kita (media) sudah tidak didengar lagi. Dan secara khusus dalam kasus-kasus kekerasan atas nama agama tersebut ada sejumlah hal yang menyebabkan Pemerintah melakukan pembiaran. Pertama, Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkepentingan “memelihara” kelompok-kelompok garis keras itu dalam upaya menjaga dukungan dari kelompok Islam. Nyatanya, Partai Keadilan Sejahtera dijadikan bagian dari koalisi. Kedua, Pemerintah tidak merasa penting mempedulikan kritik dari media selama itu ditujukan kepada Pemerintah. Tetapi persoalan menjadi lain kalau kritik dan kecaman itu ditujukan langsung ke pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pasti akan muncul tanggapan dan reaksi dari Istana. ***

LAMPIRAN

Wawancara Trias Kuntjahjono – Wakil Pemimpin Redaksi Kompas

Bertempat di: Lantai 3 Kantor Redaksi Kompas, Pal Merah Selatan, Jakarta Barat

Hari/Tanggal: Kamis, 31 Mei 2012

Waktu: 14.00 – 15.00

Bagaimana Kompas menyikapi dan memahami berbagai kekerasan yang bernuansa agama belakangan ini, termasuk kerusuhan di Temanggung Jawa Tengah, 8 Februari 2011, yang berujung pada perusakan dan pembakaran tiga buah gereja?

Begini, kami setiap hari mempunyai dua forum rapat. Pertama adalah rapat pagi pada pukul 8.00 yang merupakan rapat perencanaan dan dihadiri juga oleh Pak Jacob Oetama (sekurangnya dua kali dalam seminggu), di situ hadir pemimpin redaksi, dan para redaktur. Dalam rapat itu kami mengevaluasi berbagai pemberitaan, termasuk di *Kompas*, dan kemudian memutuskan peristiwa-peristiwa apa yang akan kami liput pada hari itu untuk dimuat keesokan harinya. Misalnya, kalau hari ini (Kamis, 31 Mei 2012) kami menyoroti soal kelangkaan minyak di Kalimantan, dimana empat gubernur telah mendeklarasikan akan melancarkan boikot terhadap kegiatan penambangan batubara, maka kami melihat kasus tersebut dalam konteks yang lebih luas yakni pembangkangan daerah terhadap Jakarta atau relasi buruk pusat-daerah.

Lalu pada rapat sore pukul 16.00, hal-hal yang sudah diputuskan pada rapat pagi ditagih kepada para redaktur apakah sudah terpenuhi atau belum. Kalau kami menetapkan headline mengenai kelangkaan minyak maka ditetapkan isinya apa, arahnya kemana. Maka sebenarnya di situ sudah terjadi kesengajaan memilih sebuah obyek secara subyektif, dan itulah framing yang kami buat. Nah, dalam kasus kerusuhan di Temanggung kami juga mempelajari apa masalahnya. Misalnya, di Jawa Tengah pada umumnya soal agama tidak menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat. Di desa saya di

LAMPIRAN

Yogyakarta, kalau ada kenduri oleh seorang warga yang beragama Katolik, maka para tetangga yang bukan Katolik juga hadir dan ikut mengamankan kenduri tersebut, itu tidak ada masalah. Namun suasana guyub di pedesaan itu makin terkikis ketika muncul kompleks perumahan dan banyak orang luar atau pendatang tinggal. Di Temanggung saya rasa situasinya juga demikian, masyarakat di kota itu damai-damai saja dan kerusuhan itu semua dipicu oleh orang luar.

Dalam menyikapi peristiwa tersebut, *Kompas* berusaha konsisten yakni kami menghormati dan mengutamakan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), kelompok-kelompok anarkistis itu harus ditindak, kalau negara tidak berani menindak mereka, maka boleh dikata kita menuju sebuah negara gagal.

Dalam pemberitaan kasus kekerasan atas nama agama, khususnya di Temanggung (dan Cikeusik) Kompas memakai konsep framing yakni “negara gagal” apa alasannya?

Kami punya tujuan besar yakni menjunjung demokratisasi, sehingga kasus-kasus seperti kerusuhan di Temanggung yang tidak mencerminkan semangat demokrasi akan kami sorot dan angkat, kalau mungkin selengkap mungkin. Dalam kasus Temanggung ini kami menilainya sebagai sebuah peristiwa besar, sehingga saya kira selama lebih dari dua minggu kami konsisten memberitakannya, artinya bila isu tersebut penting maka dia akan bertahan lebih dari seminggu.

Kami menggunakan framing “negara gagal” sebenarnya bukan hanya dalam kasus kerusuhan di Temanggung, bahkan sampai tadi pun kami masih memperdebatkannya, karena kegagalan negara itu terjadi di hampir semua sektor kehidupan negara, misalnya dalam kasus kelangkaan BBM di Kalimantan itu. Dalam kasus Temanggung, sebenarnya sudah ada perkiraan akan terjadi kerusuhan, Kapolda Jateng Irjen Edward Aritonang ada di tempat kejadian, ada penambahan pasukan dari polres-polres terdekat, ada sekolah-

LAMPIRAN

sekolah Kristen yang diliburkan karena khawatir bakal pecah kerusuhan dll. Namun, itu semua tidak mampu mencegah massa yang mengamuk di PN Temanggung bergerak membakar tiga buah gereja yang ada di sana.

Jadi, kami lebih suka memakai framing negara gagal ketimbang bubarkan ormas anarkistis, karena negara gagal adalah akar masalahnya mengapa aparat negara tidak berani menindak ormas-ormas antitoleransi itu.

Dalam rangkaian pemberitaan kasus kerusuhan di Temanggung, Kompas pada umumnya memilih narasumber dari pihak pemerintah, atau mereka yang berpandangan mendukung pandangan “kita sedang menuju negara gagal”, apa pertimbangannya?

Kalau kami memilih narasumber pada umumnya lebih berorientasi pada kepakaran atau kompetensinya, atau pun orang-orang yang paham persoalan, sehingga mereka yang paham persoalan pasti akan sepaham dengan kami, dan tentu saja orang-orang sengaja dipilih. Dalam kasus-kasus kekerasan atas nama agama, pada umumnya kami mencari narasumber tokoh yang matang dan *mendep* (mengendap), misalnya, Buya Prof. Dr Ahmad Syafii Maarif, yang dulu pernah punya pandangan radikal, namun kini berubah drastis setelah dia paham persoalannya. Atau Prof. Dr Komarudin Hidayat dll. Sedangkan sumber-sumber dari kelompok radikal kami tidak menutup pintu terhadap mereka, namun kalau pun ada porsi buat mereka kecil saja.

Ketika memberitakan kasus kerusuhan Temanggung, Kompas menempatkan laporan-laporan atau pun artikel dalam sejumlah halaman dan rubrik, misalnya di halaman satu, halaman politik dan hukum, nusantara dll. Apa pertimbangan penempatan dalam rubrik-rubrik tersebut, apakah tidak diperhitungkan nilai strategis penempatan-penempatan tersebut dan sekadar kebiasaan?

Kami selama ini memakai pertimbangan bahwa kalau sebuah persoalan masih hangat dan diikuti pembaca maka akan ditempatkan di halaman satu.

LAMPIRAN

Kalau dirasa sudah mulai berkurang kehangatannya akan dimasukkan ke halaman politik, dan kalau sudah menjadi persoalan lokal, seperti dalam kasus kerusuhan Temanggung, pada akhirnya akan bermuara di halaman Nusantara.

Kasus kerusuhan di Temanggung selama beberapa hari selalu menjadi berita di halaman satu, itu artinya peristiwa tersebut kami anggap penting dan mendapat perhatian dari para pembaca kami.

Seberapa penting Kompas melihat peran feature dalam proses framing terhadap sebuah persoalan?

Kami melihat feature adalah hal yang penting dan kalau dalam sebuah proses pemberitaan kami menyertakan feature selain *hardnews* maka itu semua sudah dirancang. Misalnya, bila menjelang hari raya Natal atau Lebaran selalu dirancang tulisan-tulisan yang mencerminkan semangat gotong royong, dimana masyarakat tanpa memandang latarbelakang agama bahu membahu dan bekerjasama atau bersilaturahmi, kisah-kisah itu sebenarnya klise tetapi harus muncul. Sehingga dalam kasus-kasus kerusuhan di Temanggung pun para wartawan kami yang ada di lapangan memahami hal itu, sehingga mereka juga menulis laporan feature dari lapangan. Kalau ditanya apakah itu termasuk pemahaman kami mengenai jurnalisme damai, paham atau tidak paham jurnalisme damai, para wartawan kami semua paham mengenai filosofi *Kompas* sehingga mereka akan membuat feature dengan *angle* sesuai dengan filosofi itu.

Kalau kemudian jumlah feature yang kami buat tidak banyak itu mungkin dirasa cukup, dan sama sekali bukan karena wartawan kami tidak bisa menulis feature. Sebab, ketika kami merekrut dan mendidik wartawan, baik yang ada di Jakarta maupun di daerah-daerah, semua diberii dan dilatih dengan kemampuan dasar jurnalistik yang sama, dan terutama pemahaman terhadap filosofi dan *angle* *Kompas*. Tapi memang dalam perkembangannya, mungkin yang di Jakarta kompetensinya lebih ketimbang mereka yang ada di daerah.

LAMPIRAN

Mengapa Kompas tidak secara tuntas meliput kasus di Temanggung itu sampai kepada vonis terhadap para pelaku kerusuhan, karena selama proses persidangan ternyata banyak terungkap mengenai motif maupun berbagai fakta mengenai latar belakang yang mendorong para pelaku tersebut berbuat rusuh?

Wah, saya tidak berpikir sampai ke situ, ya saya kira kami luput tentang proses persidangan itu. Padahal, dalam rapat-rapat sudah ada wacana mengenai siapa mereka yang menyerang itu, kenapa aparat keamanan diam saja, dst. Dan tidak ditindaklanjuti karena dianggap mengembangkan teori konspirasi. Namun saya kira hampir semua media juga tidak melihat persoalan sampai sejauh ini, kalau dirasa kasusnya sudah lewat dan orang sudah lupa, ya sudah dianggap sudah selesai. Kami akui kami kurang tekun dalam hal ini.

Apakah Kompas tidak merasakan kecenderungan konservatisme agama yang terjadi di luar juga berpengaruh kepada para wartawannya, khususnya yang Muslim?

Tidak ada. Jumlah wartawan yang non-muslim dan muslim komposisinya 50:50, namun itu bukan masalahnya, sebab ketika kami merekrut wartawan maka yang pertama dilihat bukanlah latarbelakang agama atau suku atau apa, melainkan nomor satu dia berkarakter baik, dan kedua intelektualitasnya. Agama itu nomor kesekian dan cenderung tidak diperhitungkan, karena kalau ada yang atheis pun kami tidak mempermasalahkannya. Karena itulah di ruang redaksi kami bila ada berbagai *joke* yang vulgar terkait dengan agama tidak akan menjadi masalah atau ada yang marah. Atau ketika bulan puasa, dan di kantor disediakan hidangan buka puasa bila waktu buka tiba yang menyerbu duluan adalah yang non-muslim, sementara yang muslim diteriaki agar sembahyang dahulu, dan itu biasa saja. Di sini juga ada musholla, setiap tahun selalu ada satu jatah bagi yang muslim untuk pergi naik

haji, karena itu adalah rukun Islam kelima. Sementara buat yang non-muslim tidak ada jatah ziarah ke

LAMPIRAN

Yerusalem atau Vatikan, karena itu bukan perintah agama. Tapi saya tidak keberatan menugaskan wartawan untuk pergi ke tempat-tempat itu dalam rangka tugas liputan.

Apakah Kompas merasa perlu mendidik para wartawannya dengan pemahaman mengenai “bagaimana meliput peristiwa keagamaan”?

Wah kalau itu terkait *how to cover religions* kami memang tidak pernah memikirkan atau terbersit bahwa hal itu perlu diadakan, anda benar juga kalau di sektor lain seperti keuangan, industri, politik dll ada pelatihan bagi para wartawan, ternyata untuk peliputan agama saya tidak pernah mendengar ada pelatihan seperti itu. Saya kira memang ada baiknya diadakan pelatihan-pelatihan seperti itu, karena bangsa kita memang sangat plural dan hal itu perlu untuk menjaga pluralitas tersebut. Sejauh ini yang kami adakan di *Kompas* terbatas pada kuliah-kuliah dengan mengundang pembicara dari luar seperti Anies Baswedan, misalnya, untuk menjelaskan tentang kecenderungan dan perkembangan ajaran dalam Islam, tetapi tidak untuk bagaimana meliput agama-agama.

Dalam pemberitaan kasus kerusuhan Temanggung, apakah Kompas menilai misinya telah berhasil khususnya dengan framing yang dibuatnya?

Kami tidak melihat ini berhasil atau tidak, melainkan sebuah proses panjang yang harus dilakukan terus menerus. Betul, Pemerintah sepertinya sudah tuli dan memakai filosofi “biarlah anjing menggonggong, khafilah tetap berlalu”. Artinya, pembiaran terhadap aksi-aksi kekerasan atas nama agama itu bisa jadi akan tetap terjadi, dan tugas kita sebagai media untuk terus-menerus meneriakkan kepada Pemerintah untuk berbuat melindungi warga negaranya dalam kerangka membangun masyarakat yang demokratis. ***

LAMPIRAN

**Wawancara Atmakusumah – Mantan Ketua Dewan Pers, pengajar di
Lembaga Pers Dr Soetomo**

**Bertempat di: Jalan Kantor Berita No J-143 Komplek PWI, Kebon Nanas,
Jakarta Timur**

Hari/Tanggal: Rabu, 30 Mei 2012

Waktu: 17.30 – 20.00

Pak Atma, apakah pandangan anda jika ada media massa yang sama sekali tidak memberi ruang kepada kelompok-kelompok radikal dan antitoleran dalam pemberitaannya?

Saya lahir sebagai wartawan di *Harian Indonesia Raya*, lalu berkelana di berbagai media termasuk di *Pers Biro Indonesia* bersama Adam Malik, *Radio Jerman*, *Antara*, dan berakhir di *Indonesia Raya* lagi yang kemudian ditutup pemerintah. Setelah itu saya bekerja di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Nah kalau hari ini *Indonesia Raya* masih ada maka pertama-tama sikapnya adalah harus independen, dan independen bukan berarti netral namun harus berpihak. Maka dalam menghadapi kelompok-kelompok radikal mungkin *Indonesia Raya* akan lebih keras sikapnya terhadap kelompok-kelompok radikal tersebut, karena kelompok-kelompok itu tidak berbeda dengan kaum pendukung fasisme, seperti Nazi Jerman, sehingga mereka harus ditolak dan sama sekali tidak usah diberi panggung. Jadi, kalau *Indonesia Raya* masih ada dia akan lebih keras dibandingkan sikap *Media Indonesia* hari ini, misalnya.

Saya pernah membaca di *Jakarta Post* bahwa Islam yang baik itu merupakan perpaduan antara Ulil Absar Abdalla dan Rizieq Shihab, pandangan tersebut menurut saya sangat tidak mungkin, sebab kaum radikal dan antitoleransi itu adalah kelompok yang menganut paham fasisme yakni orang-orang yang tidak bisa berbeda pendapat dan ideologi dengan orang lain, itu sudah watak yang inheren dan susah diubahnya.

Universitas Indonesia 2012

LAMPIRAN

Ada beberapa surat kabar yang mendukung pembubaran terhadap kelompok-kelompok anarkistis, dan hal itu pun sempat dilontarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika memberi sambutan pada Hari pers Nasional di Kupang pada 9 Februari, apa pendapat anda?

Kita sebagai negara demokrasi tentu susah untuk membubarkan sebuah organisasi massa, seradikal apa pun organisasi tersebut. Tetapi saya sangat setuju bila alat negara bertindak tegas dan keras terhadap mereka yang berbuat kekerasan terhadap masyarakat. Sebab, di era reformasi ini ternyata lebih banyak kekerasan yang dialami oleh publik dan dibiarkan atau tidak dibela oleh polisi dan aparat negara. Misalnya, pada awal reformasi, ketika saya masih menjadi ketua Dewan Pers, *Radio Rasitania* di Solo dalam sebuah diskusi hanya menghadirkan seorang pendeta Kristen. Akibatnya radio tersebut diprotes oleh Front Pemuda Islam Solo yang menuntut radio itu ditutup. Oleh polisi alat-alat milik *Rasitania* diambil sehingga tidak bisa siaran, akhirnya kesepakatannya radio itu tidak siaran selama seminggu. Jelas dalam hal ini polisi telah melanggar kebebasan pers, dan alasan yang mereka kemukakan adalah hal itu demi menyelamatkan radio itu sendiri maka alat-alat siarannya diambil.

Kemudian, di Padang ada *Tabloid Bijak* yang diserbu oleh para dosen dan mahasiswa sebuah sekolah tinggi olahraga di kota itu yang tidak senang dengan pemberitaannya yang dinilai tidak obyektif. Sejak penyerangan tersebut, tabloid tersebut tidak terbit lagi. Kemudian, harian *Sinar Indonesia Baru* (SIB) memuat karikatur orang yang sedang sholat di bulan puasa tapi sambil mengeritik dan menyindir. Akibatnya kantor SIB didemo oleh sekelompok massa. Oleh polisi bukan massanya yang dihalau, tetapi malah menginterogasi para staf SIB dan dicari-cari dimana gambar asli karikatur itu. Lalu rumah pemimpin umum SIB digeledah. Itu semua adalah contoh-contoh dimana dalam kasus pers atau kekerasan lainnya polisi sudah terbiasa bertindak dengan tidak melindungi korban kekerasan, malah menindak

LAMPIRAN

mereka, dengan alasan itu merupakan langkah preventif demi melindungi si korban itu sendiri. Sehingga dapat diperkirakan polisi memang takut kepada kaum radikal. Atau bisa jadi kaum radikal itu menjadi bagian dari tentara (atau polisi) untuk menakut-nakuti rakyat, setelah di era reformasi tentara tidak bisa lagi menekan rakyat seperti semasa Orde Baru. Jadi, kalau polisi hari ini tidak mau melindungi korban kekerasan itu bahkan mempersalahkan korban kekerasan, maka hal itu memang sudah menjadi pola kerja mereka.

Ada kecenderungan di banyak media bahwa mereka memilih dan mengutip narasumber yang tidak beragam atau tidak berimbang, menurut bapak apa yang mendorong mereka berbuat demikian?

Bisa saja memang mereka tidak sepaham dengan kelompok-kelompok radikal tersebut sehingga sengaja dibuat tidak berimbang, namun menurut saya kecenderungan yang lebih kuat adalah mereka tidak memahami standar media yang profesional. Karena pihak-pihak yang dirugikan atau korban jarang atau bahkan tidak dimunculkan sama sekali. Saya pernah melatih ketrampilan jurnalistik ke daerah-daerah, dan ternyata kompetensi mereka banyak yang kurang atau tidak kompeten, terutama dalam memilih dan menentukan narasumber. Jadi, saya meminta mereka belajar ke *Koran Tempo*, misalnya, yang kalau tidak dapat menjangkau sebuah sumber berita maka dibuat alasan sang narasumber sudah dicoba dihubungi berkali-kali namun tidak bisa, lalu yang dimunculkan adalah pandangan atau pendapat narasumber itu seminggu yang lalu.

Juga ada kecenderungan bahwa berita-berita baik yang dibuat oleh Kompas maupun Media Indonesia cenderung tidak mempedulikan konteks dan hanya berfokus pada konflik yang terjadi. Menurut Bapak, mengapa hal ini terjadi?

LAMPIRAN

Sebenarnya ketika meliput konflik para wartawan harus memperhatikan segi-segi kemanusiaan, khususnya yang terkait dengan para korban, tujuannya agar si pelaku kekerasan tersentuh hatinya dan menghentikan aksinya. Dalam berbagai pertemuan UNESCO beberapa tahun lalu, saya kerap diminta berbicara mengenai demokratisasi dan kebebasan berekspresi. Dan ketika berbicara itulah baru saya sadar bahwa di antara peserta banyak yang berasal dari negara-negara yang tidak demokratis di Timur Tengah dan Afrika Utara, dimana kata kebebasan tidak dikenal. Mengapa di kawasan itu tidak ada kebebasan, itu tak lain karena para penguasa di sana umumnya berasal dari suku-suku tertentu saja, sehingga mengekang kebebasan adalah salah satu instrument untuk mempertahankan kekuasaan. Namun Timur Tengah perlahan-lahan mulai berubah. Misalnya, di Qatar, yang merupakan tempat lahir stasiun televisi berita *Al-Jazeera* maka kehadirannya untuk mengimbangi siaran televisi yang didominasi Barat, namun pada sisi lain dia juga banyak dikecam dari kalangan dunia Arab karena mengungkap kebobrokan mereka. Saya memperkirakan kalau kawasan di Timur Tengah menjadi semakin demokratis maka hal itu juga akan berdampak pada kaum konservatif di sini yang berorientasi semata ke Timur Tengah. Karena itu, menurut saya, jurnalisme harus diajarkan sejak dini di sekolah-sekolah agar anak-anak sejak dini sudah paham mengenai konsep berimbang, mencari konfirmasi dll. Saya pernah mengajarkan dasar-dasar jurnalisme kepada sekitar 160 guru di Pondok Pesantren Modern Al-Zaitun dan mereka lalu yang mengajarkan kepada para murid. Hasilnya cukup baik karena para murid diajarkan dan diperkenalkan pada prinsip-prinsip cek dan recek atau pun konfirmasi.

Bila di sektor ekonomi para wartawan terus dilatih oleh industri itu agar mereka dapat meliput dengan baik dan akurat, demikian pun di dunia politik/parlemen, hukum, pertahanan dll, maka di dunia agama tidak jelas siapa yang harus bertanggungjawab. Apakah Bapak setuju apabila ada

LAMPIRAN

wartawan spesialis yang memang dilatih khusus untuk meliput masalah-masalah bernuansa agama?

Saya kira kita memang perlu melatih para wartawan untuk menjadi spesialis dalam meliput masalah-masalah keagamaan, karena bangsa kita sangatlah majemuk. Berbagai konflik bernuansa agama itu terjadi karena banyak di antara kita yang tidak bisa menerima adanya perbedaan. Namun, dalam dunia jurnalistik, apakah itu liputan agama atau politik, ekonomi atau apa saja, maka standarnya sama, yakni: faktual, akurat, dan obyektif. Dengan demikian bila dalam meliput persoalan keagamaan wartawannya sudah dilatih, dan kemudian menerapkan prinsip-prinsip faktual, akurat, dan obyektif maka diharapkan mereka dapat melaporkan secara adil demi menjaga agar hubungan antar manusia menjadi lebih baik.

Menurut Bapak, mengapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak berani bertindak terhadap kelompok-kelompok anarkistis dan radikal tersebut?

Tentu saja yang paling tahu hanya SBY sendiri mengapa dia bersikap demikian. Namun pers bertugas untuk terus mengingatkannya agar negara berani bertindak tegas dan keras kepada kaum perusuh tersebut. Apa pun yang terjadi, pers harus tetap menjadi dan berada di garda terdepan untuk membawa perubahan bangsa. ***

LAMPIRAN

Wawancara tertulis dengan Romo Antonius Benny Susetyo, Pr Sekretaris Eksekutif Setara Institute, juga Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan (HAK) Konferensi Waligereja Indonesia Rabu, 6 Juni 2012

Belakangan ini kekerasan atas nama agama marak di Indonesia, dan terutama dialami oleh kaum minoritas yakni Jamaah Ahmadiyah, Shiah, maupun umat Kristiani. Menurut anda apa yang mendorong gejala tidak sehat tersebut?

Gejala tidak sehat itu terjadi karena hukum tidak ditegakkan, akibatnya kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu itu merasa mereka punya kekuasaan untuk melancarkan berbagai aksi kekerasan tersebut, sehingga menyebabkan hilangnya kewibawaan aparat keamanan di mata publik. Pembiaran yang terus terjadi seperti itu akan menciptakan lingkaran kekerasan dan akan terus terjadi

Khusus terkait kasus kerusuhan di Temanggung (yang dipicu vonis lima tahun terhadap terdakwa kasus penistaan agama Islam Antonius Richmond Bawengan) apakah anda melihat ada benang merah ideologi/ajaran dengan para pelaku kerusuhan di Cikeusik, misalnya?

Saya menilainya tidak demikian, saya melihat ada faktor pemahaman agama yang tidak utuh alias dangkal, dan pemahaman yang dangkal itu semakin berkembang karena faktor politik kepentingan, sehingga akhirnya ajaran itu menyebar luas di kalangan masyarakat akar rumput. Paham radikal seperti itu sangat mudah digerakkan oleh kelompok-kelompok dengan kepentingan politik sempit dengan tujuan politik kekuasaan

Dalam meliput kasus kerusuhan di Temanggung (dan juga di Cikeusik) Kompas dan Media Indonesia memakai frame “negara gagal” dan “bubarkan ormas anarkistis” menurut Anda apakah frame tersebut sudah tepat?

LAMPIRAN

Menurut saya frame yang dikembangkan tersebut kurang tepat, karena sebenarnya media mampu membawa persoalannya lebih fokus pada masalah penegakan hukum. Kalau konteks penegakan hukum itu terus menerus digelorakan, maka media bisa lebih jelas lagi memainkan peranannya sebagai kekuatan alternatif pemegang otoritas. Sayangnya hal ini tidak terjadi karena fokus media bercabang-cabang.

Selama lebih dua minggu kedua surat kabar memberitakan perkembangan kasus Temanggung, namun dalam halaman dan rubrik yang berubah-ubah, umumnya dengan pesan sama: mendesak pemerintah berani bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan. Namun ternyata pada ujungnya tetap tidak ada sikap dan ketegasan dari Pemerintah. Apakah menurut anda media telah gagal melaksanakan perannya?

Media dalam menyajikan berita kurang bijaksana karena masih menonjolkan isu-isu kekerasan tetapi tidak optimal dalam upaya mendidik masyarakat untuk melancarkan gerakan anti kekerasan. Saya tidak menganggap dalam hal ini media telah gagal, melainkan media belum mampu mengerahkan rakyat untuk bergerak mewujudkan visi yang sama yakni anti-kekerasan. Pemahaman bahwa berbagai aksi kekerasan itu berlawanan dan tidak sesuai dengan konsitusi belum tergarap dengan baik. Karenanya, di masa depan, media harus memainkan peranan sebagai kekuatan untuk mendorong rakyat bergerak untuk gerakan anti-kekerasan tersebut.

Apakah anda melihat konservatisme berkembang di tengah-tengah masyarakat kita? Apakah hal itu menurut anda juga berdampak kepada para pengelola ruang redaksi (newsroom) di berbagai media mainstream?

Ya, betul saya melihat hal itu terjadi dan berkembang dengan sangat masif di tengah-tengah masyarakat kita. Dan parahnya, kelompok-kelompok dengan pandangan dan ideologi konservatif itu mendikteke kebijakan publik, akibatnya ruang publik telah direduksi atas nama kepentingan agama

LAMPIRAN

tertentu. Jelas perkembangannya seperti ini akan membahayakan keutuhan Republik Indonesia.

Apakah anda melihat Pancasila akan dapat bertahan sebagai perekat untuk mempertahankan Indonesia yang majemuk ini?

Sejauh ini Pancasila akan tetap bertahan karena hasil riset menyebutkan lebih 50 persen orang masih mengakui Pancasila, tetapi masalahnya ada kecenderungan yang makin kuat bahwa falsafah dalam Pancasila tidak lagi dijadikan acuan dalam membuat berbagai kebijakan publik, perkembangan inilah yang sebenarnya membuat Pancasila menjadi tidak efektif untuk menjadi rumah bersama bangsa Indonesia.

Apakah anda menilai berbagai media di Indonesia sudah cukup baik dalam meliput berbagai kejadian bernuansa agama, khususnya yang mengandung konflik? Perlukah para wartawan dilatih agar lebih paham cara-cara meliput kemajemukan (khususnya agama) dan konteks HAM yang ada di dalamnya?

Belum karena banyak media yang masih menonjolkan kasus-kasus kekerasan bernuansa SARA tapi belum meliputnya dengan menerapkan prinsip-prinsip jurnalisisme damai ini, hal ini yang menjadi faktor mengapa media akhirnya juga menjadi provokator dan mengobarkan potensi kekerasan. ***